



BUKU I

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA SUKABUMI
TAHUN 2025

BERDASARKAN PERATURAN
WALI KOTA SUKABUMI
NO. 21 TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Selanjutnya, dokumen Rancangan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 ini, kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, 5 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI



KUSMANA HARTADJI

DAFTAR ISI [DAFTAR ISI](#) ii

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-7

1.3 Hubungan Antar Dokumen.....I-12

1.4 Maksud Dan Tujuan.....I-14

1.5 Sistematika I-14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Kondisi Umum Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi.....II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-36

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-79

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD II-93

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
2023 II-93

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-123

2.3.1 Aspek Geografis dan Demografi.....II-123

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional III-3

3.1.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonnomi Provinsi Jawa Barat III-6

3.1.3 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kota Sukabumi III-9

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III-17

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan...III-19

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-21

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....III-28

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....III-34

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah III-38

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025..... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 IV-1

 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
 Tahun 2025 IV-4

 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
 Tahun 2025 IV-15

 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi IV-19

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 IV-31

 4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....IV-31

 4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025..IV-42

 4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-56

 4.2.4 Isu strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 Kota Sukabumi IV-63

 4.2.5 Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 IV-78

 4.2.6 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kota
 Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2025 ..IV-124

 4.2.7 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan IV-181

 4.2.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....IV-187

4.3 Inovasi Daerah IV-197

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025..... V-1

5.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025..... V-1

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 V-15

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI-1

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-3

6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Daerah (IKD)..... VI-4

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur dan Tahapan Proses Penyusunan Subtansi RKPD
Kota Sukabumi Tahun 2025 I-6

Gambar 1.2 Jadwal Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 I-6

Gambar 1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-13

Gambar 2.1 Presentase Luas Daratan Berdasarkan Kecamatan
di Kota Sukabumi..... II-2

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kota Sukabumi II-3

Gambar 2.3 Peta Topografi Kota Sukabumi II-4

Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi..... II-5

Gambar 2.5 Peta Rawan Gerakan Tanah di Kota Sukabumi II-6

Gambar 2.6 Peta Geologi Kota Sukabumi II-8

Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi II-10

Gambar 2.8 Peta Tutupan Lahan Kota Sukabumi II-12

Gambar 2.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kota
di Jawa Barat Tahun 2023 II-18

Gambar 2.10 Realisasi Indeks Gini di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2019-2023 II-21

Gambar 2.11 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023 II-23

Gambar 2.12 Perbandingan Capaian IPM Kota di Jawa Barat Tahun 2023 II-25

Gambar 2.13 Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sukabumi Tahun 2020-2023 ..II-16

Gambar 2.14 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) Kota Sukabumi Tahun 2020-20223 II-28

Gambar 2.15 Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023 II-29

Gambar 2.16 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 II-32

Gambar 2.17 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi,
dengan Kota Lainnya di Jawa Barat Tahun 2023 II-32

Gambar 2.18 Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2023 II-33

Gambar 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota
Sukabumi dengan Kota Lainnya di Jawa Barat Tahun 2023..... II-33

Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sukabumi
dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 II-35

Gambar 2.21 Jumlah Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria Capaian
Anggaran dan Kinerja Tahun 2023 II-109

Gambar 4.1 Pendekatan Perencanaan berbasis T-H-I-S IV-1

Gambar 4.2 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Kota Sukabumi Tahun 2025 IV-4

Gambar 4.3 Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*).....IV-6

Gambar 4.4 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025 IV-7

Gambar 4.5 Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....IV-8

Gambar 4.6 Tantangan Multi Dimensi RKP 2025..... IV-13

Gambar 4.7 Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025..... IV-31

Gambar 4.8 Prioritas Nasional IV-37

Gambar 4.9 Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan
Penjabarannya ke dalam RKPD IV-78

Gambar 4.10 Tema dan Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2024-2026 IV-79

Gambar 4.11 Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan IV-94

Gambar 4.12 Peta Rencana Kawasan Strategis IV-176

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daratan Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi II-5

Tabel 2.2 Luas Potensial Gerakan Tanad di Kota Sukabumi II-5

Tabel 2.3 Luas dan Jenis Batuan di DAS Cilandir.....II-7

Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Sukabumi II-9

Tabel 2.5 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Pengamatan Cilandir Tahun 2023..... II-11

Tabel 2.6 Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana di Kota Sukabumi Tahun 2023 II-13

Tabel 2.7 Jumlah Kejadian Bencana Menurut Bukan di Kota Sukabumi Tahun 2023 II-13

Tabel 2.8 Nilai Kerugian Akibat Bencana Menurut Jenis Bencana di Kota Sukabumi (Rp) Tahun 2023 II-14

Tabel 2.9 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2023 II-15

Tabel 2.10 Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2023..... II-15

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023 II-17

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 II-20

Tabel 2.13 PDRB Perkapita Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 II-20

Tabel 2.14 Persentase Pertumbuhan Perkapita Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 II-20

Tabel 2.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2023 II-26

Tabel 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi Tahun 2020-2023.....II-31

Tabel 2.17 Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2020-2023 II-32

Tabel 2.18 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2023 II-35

Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2023 II-37

Tabel 2.20 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2023 II-38

Tabel 2.21 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2023 II-39

Tabel 2.22 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Tahun 2023 II-42

Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2020-2023 II-44

Tabel 2.24 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2023 II-46

Tabel 2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2020-2023 II-47

Tabel 2.26 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023.....II-48

Tabel 2.27 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2023 II-49

Tabel 2.28 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....II-51

Tabel 2.29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2023 II-51

Tabel 2.30 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun
2023 II-53

Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2023 II-54

Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2020-2023 II-55

Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2023.....II-56

Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2023 ..II-57

Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2020-2023 II-57

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2020-2023 II-59

Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2020-2023 II-60

Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020
-2023 II-61

Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2023.....II-62

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah Tahun 2020-2023.....II-63

Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020
-2023 II-64

Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2023.....II-64

Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020
-2023 II-65

Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2023 II-66

Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2023 ...II-66

Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020
-2023 II-67

Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2023.....II-68

Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun
2020-2023 II-69

Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2023...II-69

Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2023 II-71

Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2023 II-71

Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020
-2023 II-72

Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2020-2023.....II-74

Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2020-2023 ...II-74

Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2023 II-75

Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan Tahun
2020-2023 II-76

Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi
Publik Tahun 2020-2023 II-77

Tabel 2.58 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota
Sukabumi Tahun 2019-2023 II-79

Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....II-84

Tabel 2.60 Persentase Kategori Capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2023
Berdasarkan Misi RPJMD II-87

Tabel 2.61 Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 II-94

Tabel 2.62 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....II-110

Tabel 2.63 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2024
Triwulan I II-111

Tabel 3.1 Proyeksi Target Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi
disandingkan dengan Provinsi dan Nasional III-12

Tabel 3.2 Proyeksi Capaian dan target PDRB Sektor Kota Sukabumi Tahun
2025 III-12

Tabel 3.3 Pendapatan Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun
2024-2025 III-23

Tabel 3.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun 2025.....III-36

Tabel 4.1 Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2025.....IV-11

Tabel 4.2 Indikasi Intervensi/ProP Per Transformasi di Provinsi Jawa Barat..IV-11

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....IV-17

Tabel 4.4 Sandingin Misi, Sasaran Pokok dan Arahkan Kebijakan RPJPD, Isu Strategis Aktual serta Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 IV-21

Tabel 4.5 Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 IV-23

Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Transformasi Sosial IV-32

Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi.....IV-33

Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Transformasi Tata Kelola.....IV-34

Tabel 4.9 Sasaran Pembangunan Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia.....IV-35

Tabel 4.10 Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial Buadaya dan Ekologi IV-36

Tabel 4.11 Sasaran PembangunanPer Prioritas Nasional.....IV-38

Tabel 4.12 Proses Penyusnan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 IV-47



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 264);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022-2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025.

Pasal 1 ...

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Pasal 3

Dalam hal RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbeda dengan RAPBD hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menggunakan RAPBD Tahun 2025 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang disusun dalam rangka mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah sampai ditetapkannya RPJMD periode 2025-2030 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2030.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengusung tema **“Memperkuat Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema ini memiliki makna bahwa Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan dimana kepala daerah hasil pilkada sudah diketahui. Situasi transisi ini perlu ditangani secara *smooth* dengan mengesampingkan perbedaan disaat kontestasi pilkada. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus lebih inklusif dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan kondusifitas kota dengan memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, penguatan kondisi sosial, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban;
2. Optimalisasi sektor perdagangan dan jasa meliputi revitalisasi pariwisata dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penguatan budaya kreatif dan inovatif melalui peningkatan inovasi pelayanan publik dalam kerangka *smart city*.

Adapun usulan dan program strategis Tahun 2025 diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan program seperti Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), Honor Ketua RT-RW, BPJS Tenaga Kerja untuk Ketua RT, Ketua RW, Anggota Linmas dan Kader. Termasuk didalamnya penanganan kekumuhan dan *stunting*. Sementara usulan Tahun 2025 prioritas untuk 5 usulan fisik, 5 usulan non fisik, sarana prasarana dan

pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan serta inovasi. Untuk strategi percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui konvergensi 3F (3 Fokus), yaitu : Fokus Lokasi (Kelurahan), Fokus Intervensi Aksi (Sensitif dan Spesifik), dan Fokus Kelompok Sasaran (1000 Hari Pertama Kehidupan).

RKPD merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun sesuai dengan tahapan dan alur yang telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara umum, dokumen RKPD ini mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2025; dan
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RPKD.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 diawali dengan *Kick Off Meeting* perencanaan tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023, selanjutnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan kemudian Tingkat Kecamatan, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran penyempurnaan yang berasal dari berbagai *stakeholder* pembangunan di Kota Sukabumi. Berikutnya yaitu tahap Forum Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan tetap menjaring masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2025.

Selanjutnya tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendapat dari kalangan akademisi, dunia usaha dan komunitas.

Adapun penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan metode pendekatan melalui:

1. *Top down* yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
2. *Bottom-Up* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (FPD), dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan berupa matriks program/kegiatan prioritas.
3. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *pentahelix* – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, Media*). *Academic* meliputi unsur perguruan tinggi dan peneliti yang berperan sebagai konspetor dengan melakukan identifikasi potensi daerah dan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi pembangunan daerah. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori baru dan relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. *Business* meliputi unsur pengusaha/swasta yang berperan sebagai *enabler*. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis yang memberikan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor swasta dapat berperan sebagai *enabler* menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. *Community* meliputi unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, tidak terkecuali kaum perempuan, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini komunitas juga berperan sebagai akselerator seiring dengan modal sosial yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Komunitas juga bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar

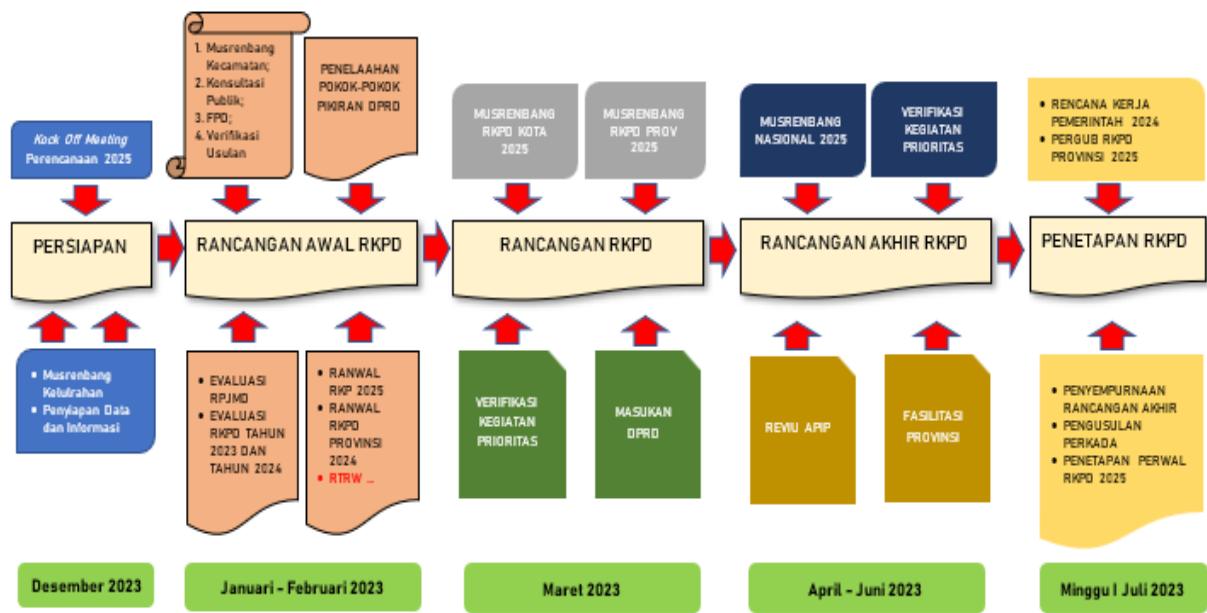
adopsi proses ekonomi. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki oleh suatu wilayah. *Government* atau pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan peraturan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijak inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan potensi suatu wilayah. *Media* bertindak sebagai *expander* yang berperan untuk mendukung publikasi dan promosi serta membuat *brand image*. Dalam menjalankan perannya ini, media juga berfungsi sebagai perantara diseminasi informasi diantara pemangku kepentingan dan konsep *pentahelix*.

4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, Pinjaman Daerah, obligasi daerah, dana masyarakat/umat, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah, serta melibatkan secara aktif *stakeholder* diluar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial didalam penjabaran prioritas pembangunan daerah. Tentunya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, swasta dan lain-lain menjadi *support* anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diolah sedemikian rupa sehingga tepat sasaran dan tepat guna.
5. Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilihan-pilihan kebijakan yang ditetapkan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang sering mengalami perubahan sehingga lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan serta senantiasa menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

6. Implementasi *Scenario Planning (Scoppi)* untuk perencanaan inklusif guna mendorong keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga akan berdampak pada optimalisasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan masukan, saran dan ide bagi proses perencanaan pembangunan yang dilakukan. Melalui *Scoppi* disediakan fasilitas bagi individu/kelompok masyarakat dalam memberikan saran dan masukan sebagai sarana mengakomodir kelompok tertentu dalam pembangunan diantaranya remaja, disabilitas, dan lansia untuk memberikan saran dan masukan.
7. Sinkronisasi aplikasi dan dan interkoneksi data melalui:
 - a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terintegrasi;
 - b. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. *e-Walidata* Kota Sukabumi.

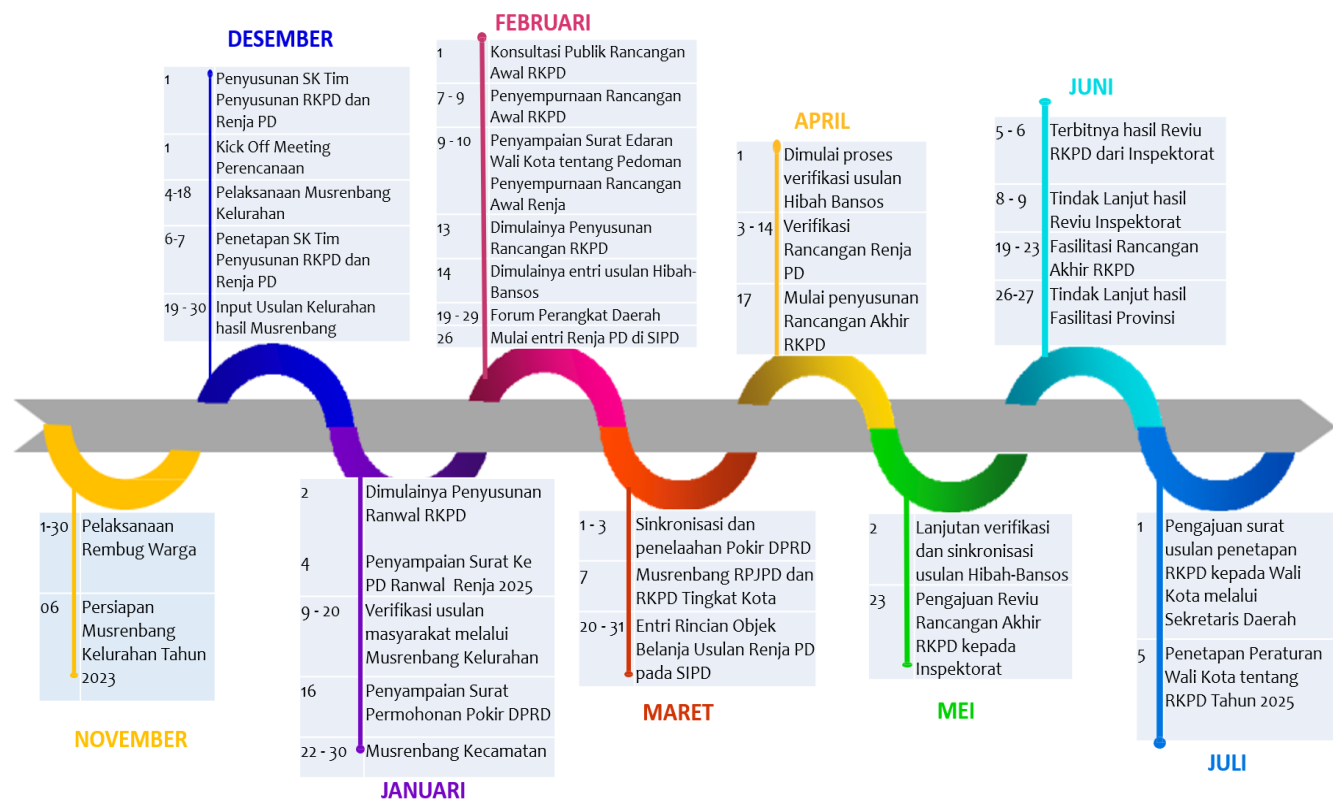
Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Diawali dengan *Kick Off Meeting* Perencanaan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023, dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran pembangunan dari berbagai *stakeholder* pembangunan di Kota Sukabumi. Kemudian tahapan Forum Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta rencana anggarannya dengan tetap menjaring masukan dan saran untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Rangkaian ini diakhiri dengan Musrenbang Tingkat Kota Sukabumi sebagai forum pertemuan antar pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka membahas dokumen Rancangan RKPD Tahun 2025. Beberapa alur dan tahapan proses penyusunan substansi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 yang dilaksanakan, sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Alur dan Tahapan Proses Penyusunan Substansi RKPD
Kota Sukabumi Tahun 2025



Adapun rencana jadwal penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 disajikan dalam Gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Jadwal Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah

- Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 264);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022-2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
42. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dikarenakan ada kekosongan pimpinan daerah, maka dokumen perencanaan daerah RPJMD diganti oleh dokumen RPD, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

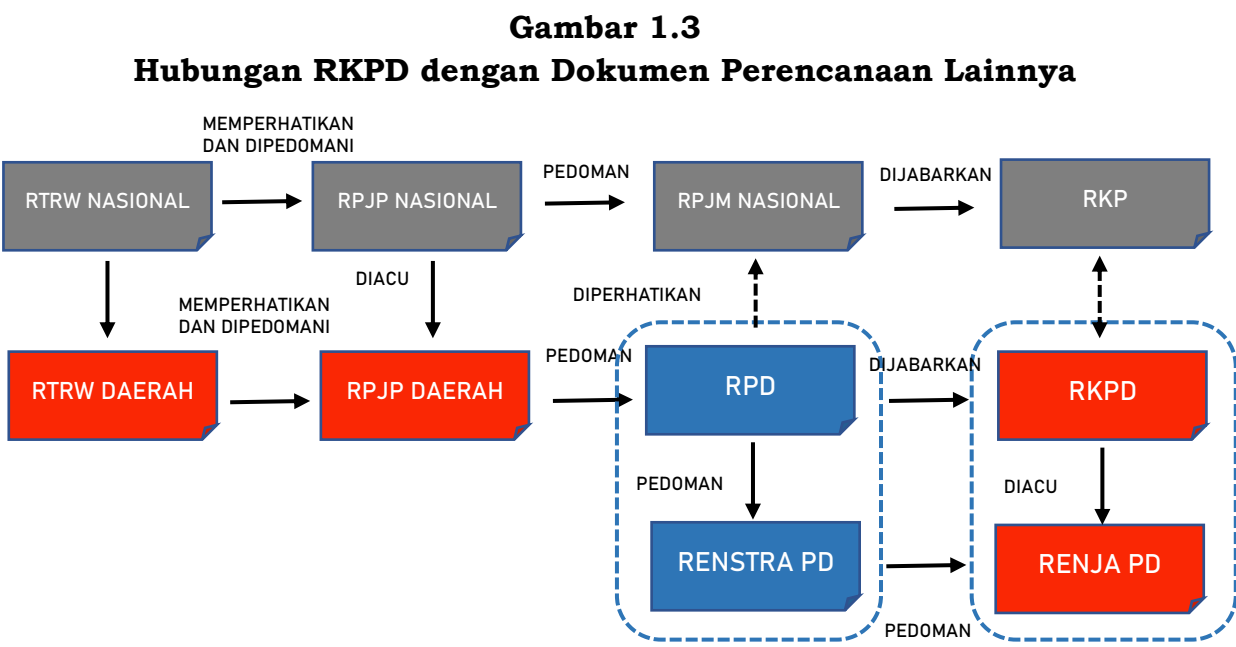
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) mengamanahkan bahwa Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang secara fungsi dan manfaat, kedudukannya sama dengan RPJMD. Penyusunan RPD tidak melalui pendekatan politis, sehingga tidak menjabarkan visi misi dan janji kepala daerah terpilih. Akan tetapi, hubungan antara Dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya sama maknanya dengan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya. Sehingga RPD menjadi bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Secara struktur, dokumen perencanaan terbagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang ruang lingkup perencanaan berskala daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah yang berpedoman pada dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Sukabumi Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Hubungan antar dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Berdasarkan Gambar diatas, RPJMN dan RPD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah yang saling berhubungan dan bersinergi. RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun kedua dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Sukabumi;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2025;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD disesuaikan dengan alokasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dan diharapkan akan memberi arah rencana kerja pembangunan di Tahun 2025 bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan RPD dan Renstra Perangkat Daerah terkait. RKPD Kota Sukabumi.

1.5 Sistematika

Penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025, yang terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen

- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan yang terdiri dari:

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri dari:
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi;
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum;
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan serta realisasi RPD
 - 2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - 2.2.2 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - 2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, terdiri dari:

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi dan Kota Sukabumi Tahun 2025, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2025.
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2025 serta pendanaan pembangunan lainnya.
- 3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan dan rancangan kerangka ekonomi serta kerangka pendanaan, terdiri dari:

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai penjelasan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang program prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Sukabumi Tahun 2025

4.3 Inovasi Daerah

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025

Menjelaskan tentang sinkronisasi program prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, serta kegiatan prioritas Kota Sukabumi dalam rencana program dan kegiatan tahun 2025.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan tentang realisasi dan proyeksi Indikator Makro Kota Sukabumi, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2025 serta kaidah pelaksanaan RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum ini memberikan gambaran pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, juga mengidentifikasi faktor-faktor dan berbagai hal yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan di Kota Sukabumi dilihat dari beberapa aspek.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu selain tentunya memperhatikan Dokumen RPJMD dan Dokumen RPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi dari aspek geografi dan demografi Kota Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

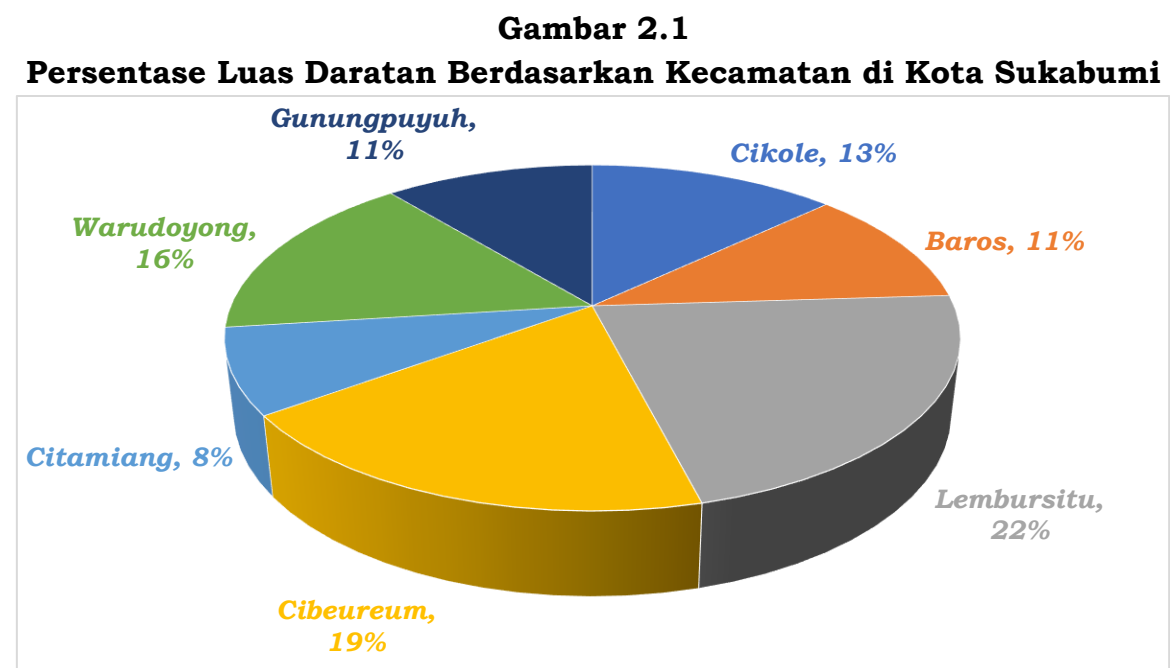
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran dari 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Dengan demikian, wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Wilayah Kota Sukabumi berbatasan dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.1		
Luas Dataran Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi		
No	Kecamatan	Luas (Km ²)
(1)	(2)	(3)
1	Baros	5,58
2	Lembursitu	10,70
3	Cibeureum	9,13
4	Citamiang	4,00
5	Warudoyong	7,56
6	Gunungpuyuh	5,13
7	Cikole	6,21
Luas Total		48,31

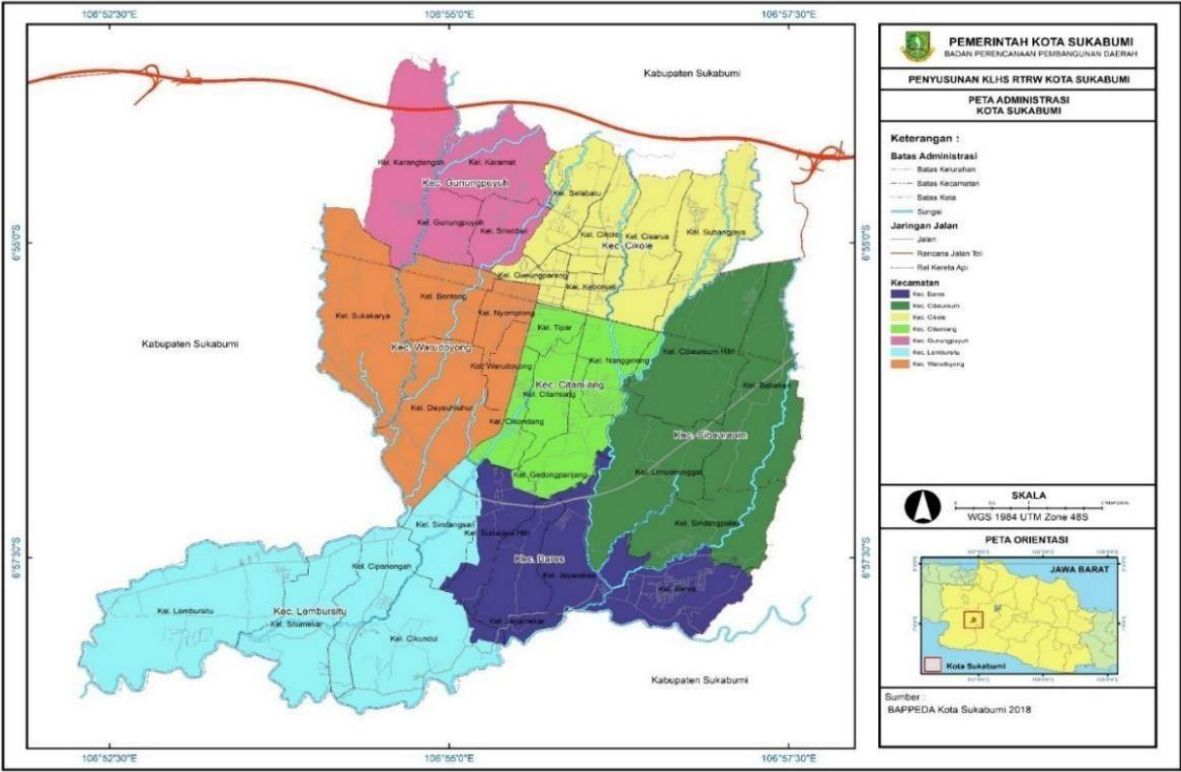
Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Peta wilayah administrasi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat 106⁰ 45' 50" BT – 106⁰ 45' 10" BT sampai dengan 6⁰ 49' 29" LS – 6⁰ 50' 44" LS, secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibukota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lahan

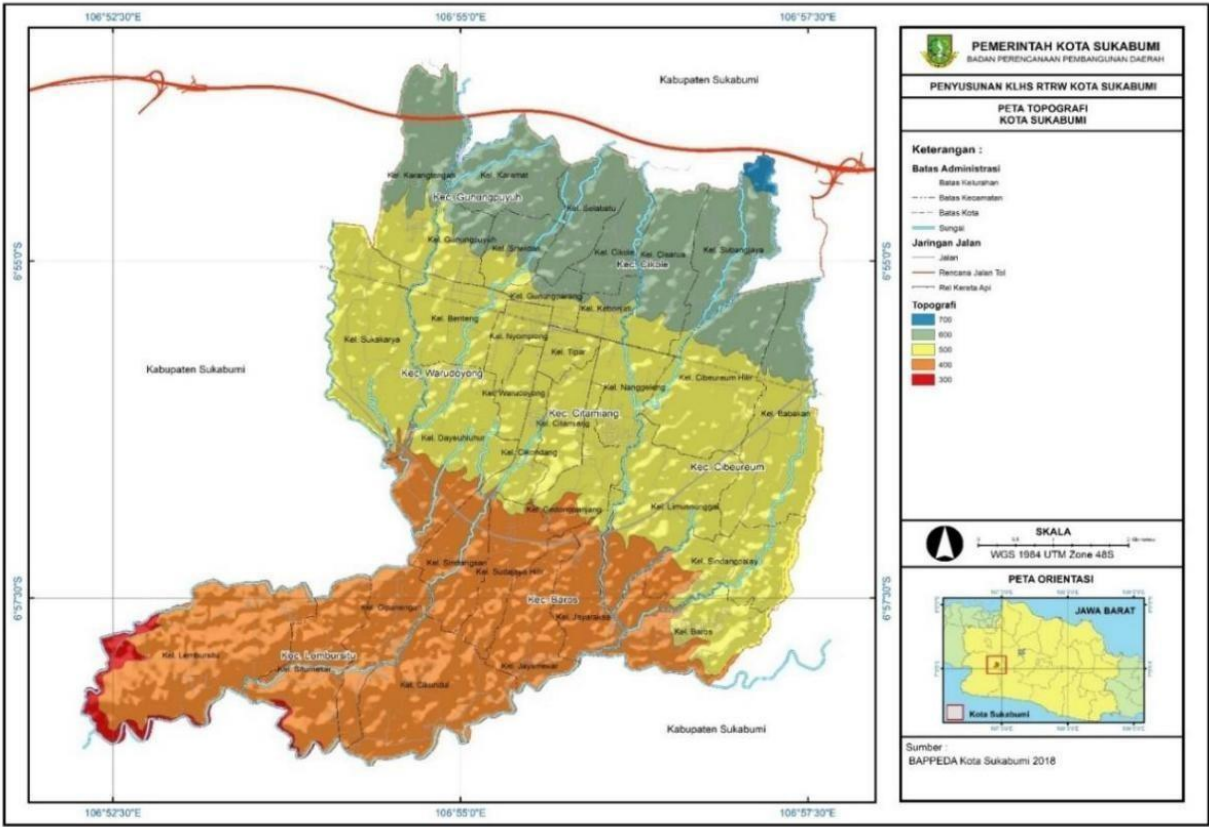
Wilayah Kota Sukabumi merupakan dataran rendah terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada pada ketinggian 584 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah berupa daratan seluas 48,31 Km². Secara morfologi, Kota Sukabumi dapat dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu morfologi daratan dengan elevasi 385-600 mdpl,

morfologi medan bergelombang dengan elevasi 350-975 mdpl, morfologi pegunungan ber-relief sedang dengan elevasi 375-975 mdpl, dan pegunungan ber-relief kasar dengan elevasi 375-900 mdpl.

Kota Sukabumi memiliki tiga stasiun pengamatan cuaca yaitu Stasiun Cimandiri, Stasiun Situmekar dan Stasiun Ciaul. Jumlah curah hujan paling tinggi tercatat di Stasiun Ciaul di Bulan November yaitu sebesar 615 mm dengan total jumlah hari hujan sebanyak 24 hari.

Sementara dibagian tengah mempunyai ketinggian rata-rata 650 meter dari permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Sukabumi berupa perbukitan bergelombang dengan sudut lereng beragam. Wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh kemiringan lereng 0- 2% dan 2-15%. Peta kondisi topografi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

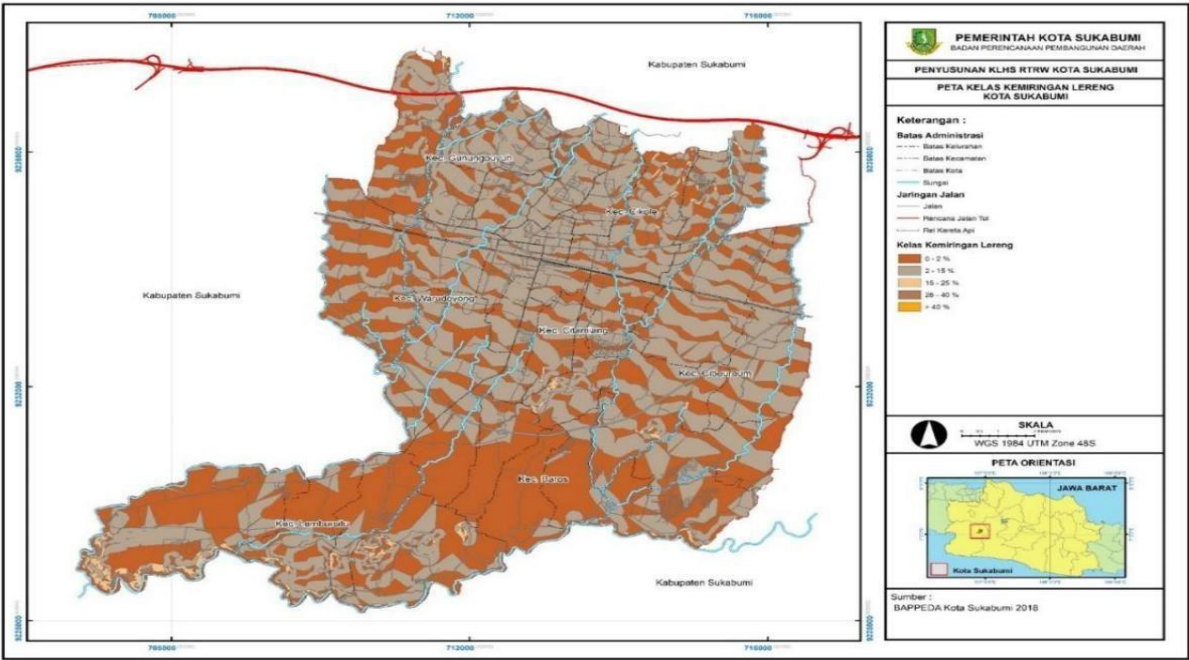
Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

Luas Daerah Kota Sukabumi dengan kemiringan lereng 0-2% mencapai 2.228,795 Ha atau sekitar 45,59% dari total luas kota, dan kemiringan lereng 2-15% mencapai 2553.219 Ha atau sekitar 52,22% dari total luas kota. Adapun kondisi kemiringan lereng di wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4
Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Kota Sukabumi termasuk kepada zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah dan sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini masih mungkin terjadi adanya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan yang tinggi. Zona gerakan tanah sedang merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan gerakan tanah menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama masih mungkin dapat aktif kembali terutama oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia. Adapun luas gerakan tanah di Kota Sukabumi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

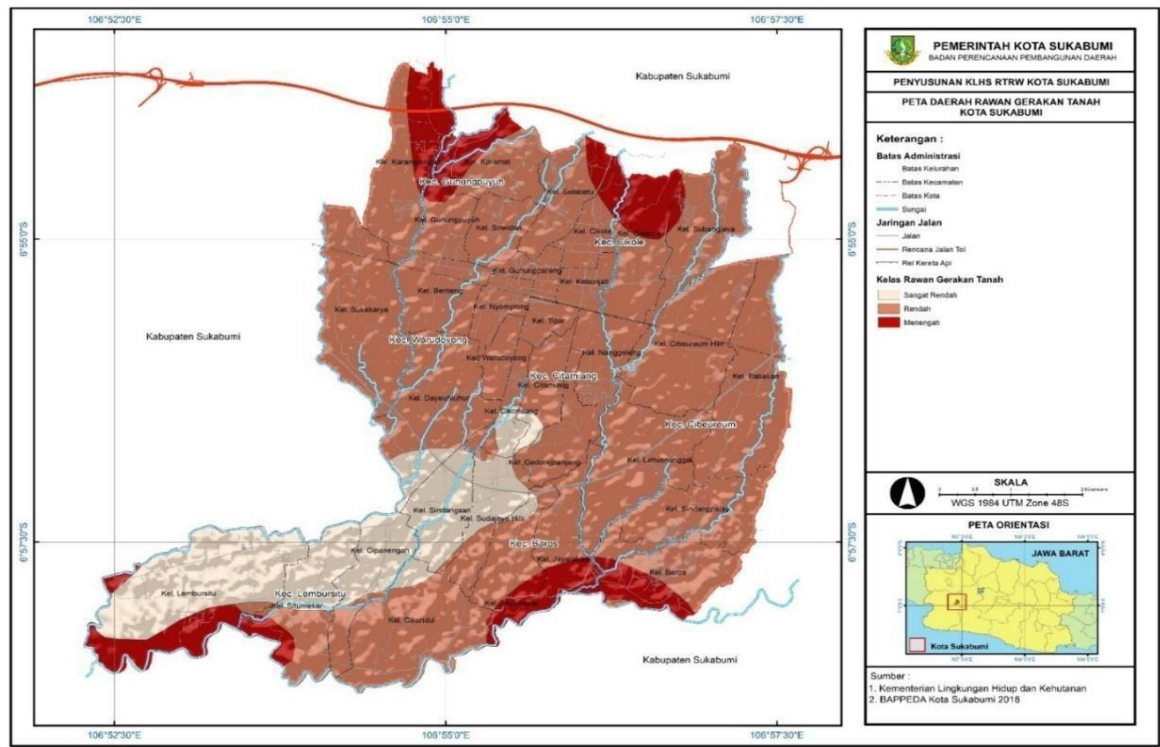
Tabel 2.2
Luas Potensi Gerakan Tanah di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baros	Menengah	137,97
		Rendah	345,31
		Sangat Rendah	77,20
2	Cibeureum	Rendah	932,21
3	Cikole	Menengah	140,05

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rendah	504,32
4	Citamiang	Rendah	343,29
		Sangat Rendah	39,67
5	Gunungpuyuh	Menengah	145,73
		Rendah	368,50
6	Lembursitu	Menengah	135,26
		Rendah	351,54
		Sangat Rendah	608,55
7	Warudoyong	Rendah	722,65
		Sangat Rendah	36,99

Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

Gambar 2.5
Peta Rawan Gerakan Tanah di Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

2.1.1.4 Struktur Geologi

Berdasarkan peta geologi susunan litologi batuan di wilayah Kota Sukabumi dan daerah sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur Holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari Formasi Walat berumur Oligosen Awal yang merupakan satuan yang tertua dijumpai di daerah ini. Formasi Walat

ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari Oligosen Akhir sampai Miosen Awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur Miosen Awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi.

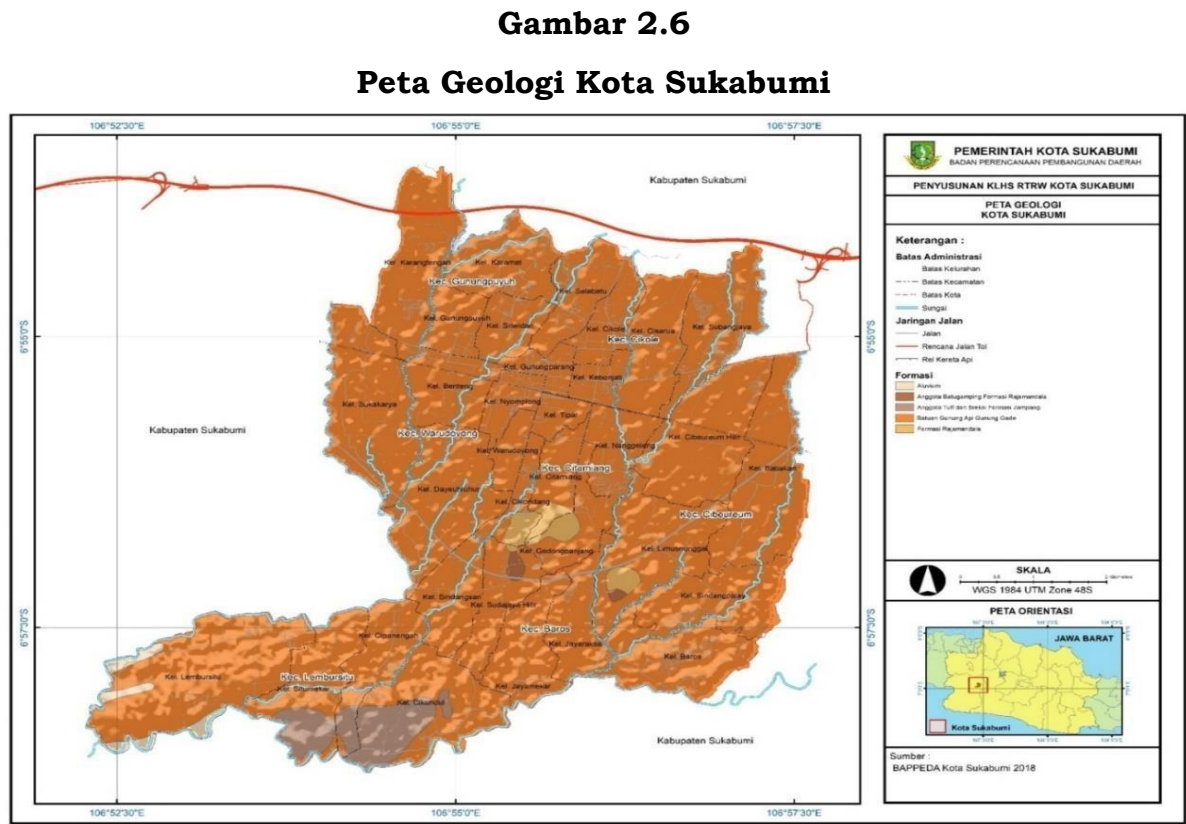
Formasi batuan sedimen di atas ditutupi oleh endapan vulkanik berumur Holosen yaitu batuan produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Satuan batuan vulkanik ini tersebar secara luas sehingga sebagian besar dari wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh singkapan batuan vulkanik. Endapan vulkanik Gunung Gede (Qvg) terdiri dari breksi tufan dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, piroksen dan banyak sekali hornblenda, tekstur seperti trachit, umumnya lapuk sekali. Batuan ini tersebar pada wilayah yang cukup luas mulai dari bagian timur sampai bagian tengah dan mulai dari bagian utara sampai bagian selatan Kota Sukabumi. Sedangkan endapan vulkanik Gunung Pangrango (Qvpo) merupakan endapan yang lebih tua yang tersusun dari lahar dan lava, basal-andesit dengan oligoklas-andesin, labradorit, olivin, piroksen, dan hornblenda. Posisi stratigrafi satuan batuan ini relatif lebih tua daripada endapan vulkanik Gunung Gede dan penyebaran satuan ini terbatas di bagian barat dan barat laut wilayah Kota Sukabumi. Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Kecamatan-nya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.3
Luas dan Jenis Batuan di DAS Cilandiri

No	Kecamatan	Simbol	Formasi		Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Baros	Qvg	Batuan Gunung Gede	Gunung Api	550,52
		Tmol	Anggota Formasi Rajamandala	Batugamping	8,66
		Tmor	Formasi Rajamandala		1,31
2	Cibeureum	Qvg	Batuan Gunung Gede	GunungApi	913,46
		Tmol	Anggota Formasi Rajamandala	Batugamping	3,65
		Tmor	Formasi Rajamandala		15,09
3	Cikole	Qvg	Batuan Gunung Gede	Gunung Api	644,37
4	Citamiang	Qvg	Batuan Gunung Gede	GunungApi	333,51

No	Kecamatan	Simbol	Formasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tmor	Formasi Rajamandala	49,45
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	514,23
		Qa	Aluvium	43,42
6	Lembursitu	Qvg	Batuan GunungApi Gunung Gede	894,87
		Tmjt	Anggota Tuff dan Breksi Formasi	157,06
7	Warudoyong	Qvg	Batuan GunungApi Gunung Gede	759,64

Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026



Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan, sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan berpenyebaran luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produktivitasnya rendah hingga langka. Kondisi air permukaan maupun air tanah (groundwater) baik

dari sisi pergerakan, distribusi maupun kualitasnya di Kota Sukabumi sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sukabumi. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai-sungai yang melewati Kota Sukabumi dijelaskan tabel dan gambar berikut:

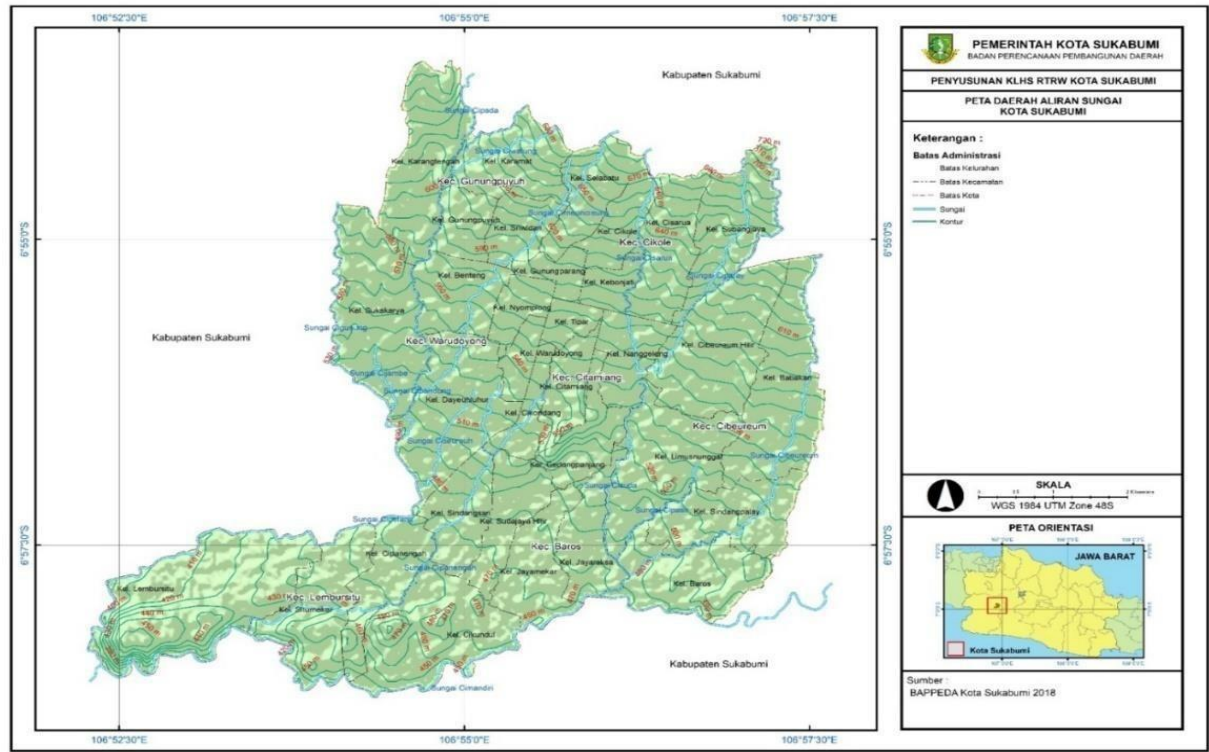
Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Sukabumi

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m3/dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ceger	0,004129	4,129	-
2	Cibeureum	0,0076	7,600	-
3	Salakaso	0,003244	3,244	-
4	Cibitung	0,006125	6,125	-
5	Cisuda	0,009659	9,659	0,40
6	Tonjong	0,004625	4,625	-
7	Cimandiri	0,012705	12,705	4,60
8	Cikapek	0,001851	1,851	0,01
9	Cipelang Leutik	0,003727	3,727	0,08
10	Cipelang	0,01508	15,080	1,26
11	Ciseureuh	0,004827	4,827	0,07
12	Cijambe	0,002252	2,252	0,20
13	Cigunung	0,004252	4,252	0,27
14	Bantarpanjang	0,001908	1,908	-
15	Gunungpuyuh	0,001068	1,068	-
16	Cikujang	0,001359	1,359	-
17	Cipanengah	0,005592	5,592	0,54
18	Ciseupan	0,003583	3,583	-
19	Ciparigi	0,001629	1,629	-
20	Cipada	0,001164	1,164	2,13
21	Ciwalung	0,001773	1,773	0,02
22	Cibandung	0,002847	2,847	0,06
23	Ciharempoy	0,004776	4,776	-
24	Cisarua	0,004127	4,127	0,36
25	Ciaul	0,003420	3,420	-
26	Cipicung	0,001503	1,503	-

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m3/dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Cisaray	0,002429	2,429	0,2
28	Tipar	0,003926	3,926	-
29	Cipasir	0,001948	1,948	-

Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Sukabumi berkisar antara 26^oC-28^oC. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Kota Sukabumi menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Nilai intensitas curah hujan maksimal sebesar 76 (tujuh puluh enam) mm dan curah hujan tahunan sebesar 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) mm. Jumlah bulan kering berkisar 1-2 bulan per tahun, namun mendapat pengaruh hujan orografis di sepanjang sungai merupakan perbukitan dan dataran bergelombang. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada

musim bulan Agustus. Berikut keadaan iklim menurut bulan di Stasiun Pengamatan Cimandiri:

Tabel 2.5
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan
di Stasiun Pengamatan Cimandiri Tahun 2023

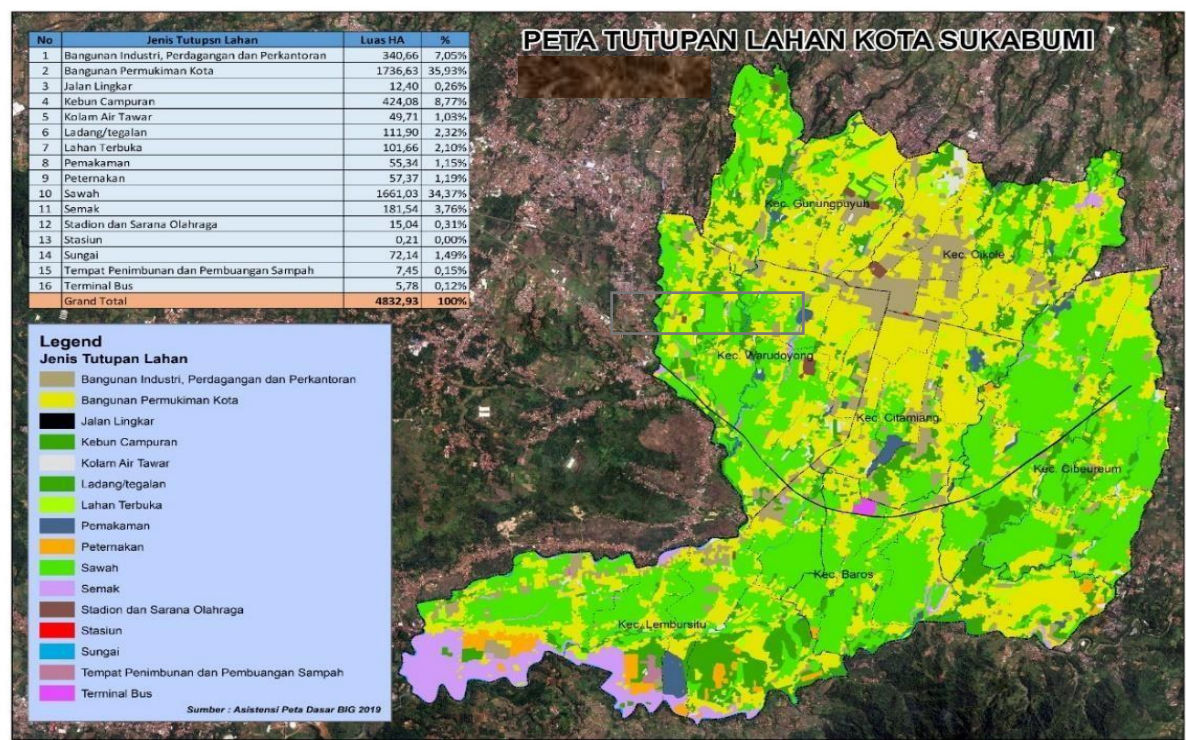
Bulan	Hujan Maksimum (mm)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Januari	16	49	19
Februari	43	266	24
Maret	48	324	23
April	44	152	13
Mei	49	148	10
Juni	66	178	10
Juli	5	9	2
Agustus	4	5	2
September	8	10	2
Oktober	38	84	7
November	55	322	15
Desember	85	264	11

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

2.1.1.7 Pola Penggunaan Lahan

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Sukabumi, sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan Iman dan Takwa. Kota Sukabumi juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional, sesuai dengan arahan dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Potensi pengembangan wilayah Kota Sukabumi pada masa-masa mendatang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.8
Peta Tutupan Lahan Kota Sukabumi



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi

2.1.1.8 Daerah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang pasang/abrasi, dan tanah longsor. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Daerah rawan bencana yang berada di wilayah Kota Sukabumi meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

1. Daerah rawan letusan gunung berapi karena berlokasi relatif dekat dengan kawasan Gunung Gede Pangrango;
2. Daerah rawan gempa yang terletak di jalur daerah rawan gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung;

- 3. Daerah rawan banjir yang tersebar di beberapa titik wilayah. Secara umum penyebab terjadinya genangan atau banjir di wilayah Kota Sukabumi lebih banyak diakibatkan oleh kondisi saluran yang tidak terawat, tersumbat oleh sampah dan tingginya sedimentasi;
- 4. Daerah rawan gerakan tanah zona patahan aktif, yaitu patahan Cimandiri;
- 5. Daerah longsor di beberapa bagian daerah wilayah kota.

Berikut tabel jumlah kejadian bencana dan area terdampak bencana tahun 2023:

Tabel 2.6
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana
di Kota Sukabumi Tahun 2023

Jenis Bencana	Kejadian Bencana
(1)	(2)
Kebakaran	33
Kabakaran Pemukiman	34
Kebakaran Transportasi	1
Banjir	13
Tanah Longsor	37
Angin Puting Beliung	6
Gempa Bumi	-
Cuaca Ekstrem	61
Bencana Non-Alam	-
Jumlah	185

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

Tabel 2.7
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Bulan
di Kota Sukabumi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Kejadian Bencana
(1)	(2)
Januari	1
Februari	16
Maret	25
April	10
Mei	11
Juni	10
Juli	8
Agustus	6

Bulan	Jumlah Kejadian Bencana
(1)	(2)
September	37
Oktober	25
November	24
Desember	12
Jumlah	185

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

Tabel 2.8
Nilai Kerugian Akibat Bencana Menurut Jenis Bencana
di Kota Sukabumi (Rp) Tahun 2023

Jenis Bencana	Nilai Kerugian
(1)	(2)
Kebakaran	36.100.000
Kabakaran Pemukiman	2.383.100.000
Kebakaran Transportasi	200.000.000
Banjir	624.875.000
Tanah Longsor	1.999.850.000
Angin Puting Beliung	38.400.000
Gempa Bumi	-
Cuaca Ekstrem	816.350.000
Bencana Non-Alam	-
Jumlah	6.098.675.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

2.1.1.9 Demografi

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau mempunyai Kartu Keluarga (beridentitas).

Sebagaimana karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas terbatas, yakni 48,31 Km², serta

jumlah penduduk Tahun 2023 sebanyak 360.644 jiwa, kepadatan penduduk 7.465 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan dan rasio jenis kelamin penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Baros	40,38	2,50
Lembursitu	43,84	2,08
Cibeureum	48,31	2,64
Citamiang	54,57	1,03
Warudoyong	60,72	1,07
Gunungpuyuh	49,58	0,96
Cikole	63,24	0,79
Jumlah	360,64	1,48

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Tabel 2.10
Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2023

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)
Baros	7.237	103
Lembursitu	4.098	98
Cibeureum	5.291	102
Citamiang	13.634	101
Warudoyong	8.030	103
Gunungpuyuh	9.656	103
Cikole	10.191	98
Jumlah	7.465	101

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9.801,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 477,72 miliar rupiah dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Kondisi perekonomian tampak berjalan relatif stabil di Kota Sukabumi selama 2 tahun terakhir, dengan nilai pertumbuhan dikisaran 5 persen.

Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 9,08 persen. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas 5 persen. Sementara enam lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif yang lebih rendah.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga delapan persen tersebut antara lain: lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,04 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 7,81 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,71 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,17 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,85 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,17 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,79 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 5,54 persen.

Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,64 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 3,80, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,33 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,19 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,09 persen serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 2,07 persen.

Berikut disajikan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha:

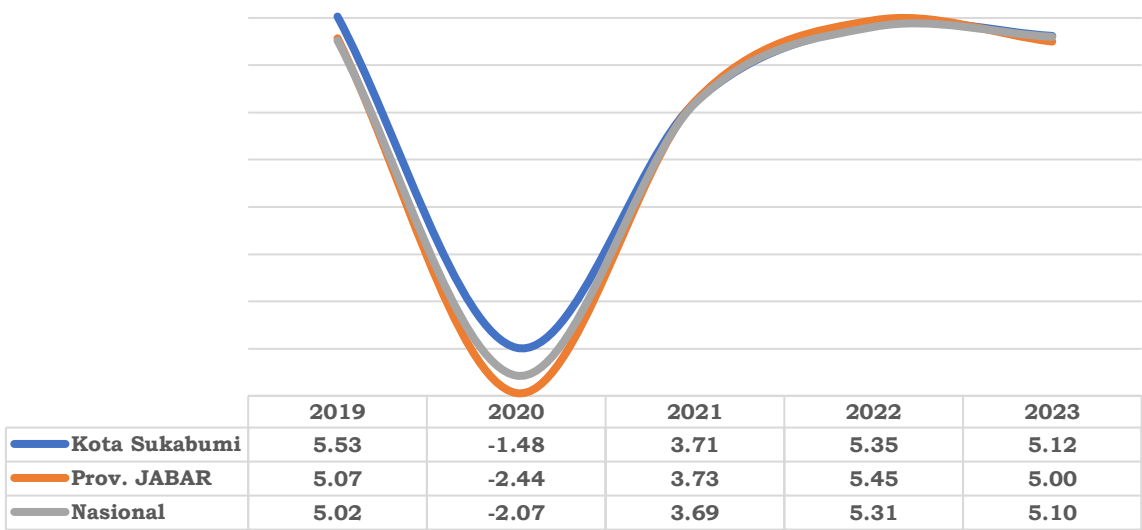
Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi
Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	0,62	0,76	3,58	7,17
Indusri Pengolahan	5,30	-1,93	2,49	4,81	4,64
Pengadaan Listrik dan Gas	2,95	2,99	8,98	5,90	3,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,60	6,85	8,02	6,32	2,09
Konstruksi	7,09	-4,06	4,00	-0,15	6,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	-2,68	3,64	5,47	3,80
Transportasi dan Pergudangan	7,17	-6,98	3,41	7,59	9,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	-3,41	2,74	9,70	7,81
Informasi dan Komunikasi	8,75	10,78	8,23	7,01	6,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,58	2,81	4,79	2,57	3,33
Real Estat	8,16	-0,86	7,76	6,30	5,54
Jasa Perusahaan	7,37	-7,67	7,87	9,13	8,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Soaial Wajib	0,21	-3,93	-2,76	-0,34	2,07
Jasa Pendidikan	6,34	4,39	2,88	8,09	5,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	1,82	7,82	9,85	5,72
Jasa lainnya	9,15	-0,82	1,42	11,67	7,71
Produk Domestik Regional Bruto	5,53	-1,49	3,71	5,35	5,12

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

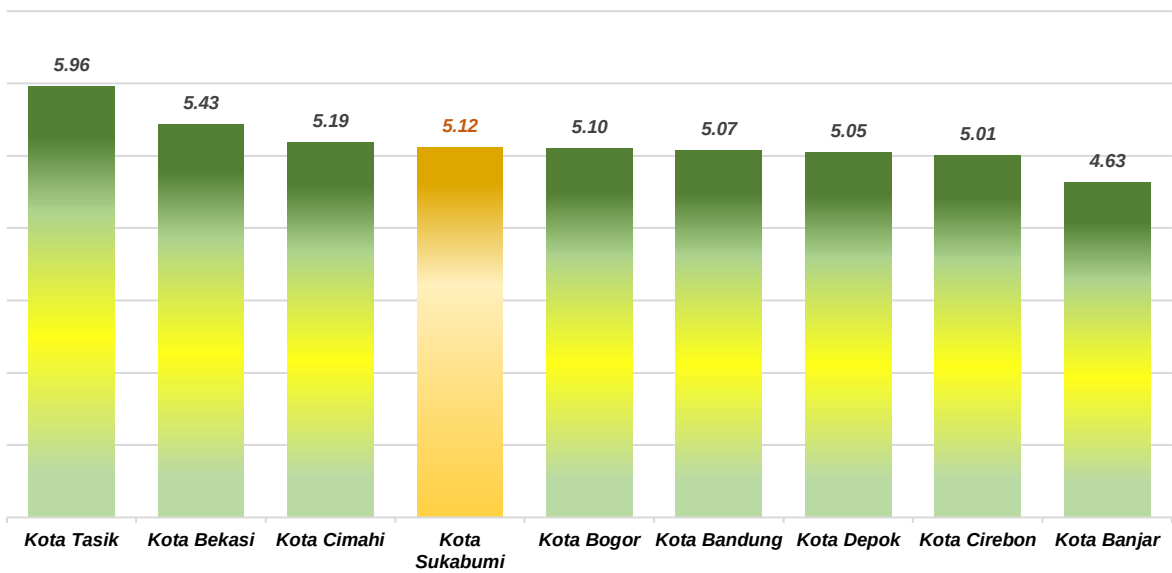
Berdasarkan data diatas, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi tahun 2023 adalah 5,12. Angka tersebut memang menurun dibandingkan angka tahun sebelumnya, hal tesebut memang terjadi merata di tingkat provinsi maupun nasional, namun demikian capaian Kota Sukabumi lebih tinggi dari angka Provinsi dan Nasional.

Gambar 2.9
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kota Sukabumi Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi

Gambar 2.10
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi

2.1.2.2 PDRB per Kapita

Data PDRB Kota Sukabumi yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian.

Secara umum, PDRB per Kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 42,56 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Sukabumi juga mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2023, masing-masing sebesar 26,53 juta rupiah dan 27,18 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena dalam hal ini pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi. Berikut disajikan Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Tahun 2019-2023:

Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi
Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	12.387.691,54	12.401.540,58	13.053.044,18	14.192.254,06	15.349.709,36
ADHK	8.664.017,06	8.534.716,50	8.851.051,49	9.324.164,63	9.801.880,80

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

Tabel 2.13
PDRB Perkapita Kota Sukabumi Tahun 2019-2023

PDRB Perkapita (Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	37.927.735,70	35.925.772,04	37.278.009,63	39.931.275,25	42.561.942,04
ADHK	26.526.859,19	24.724.047,59	25.277.596,39	26.234.436,27	27.178.826,77

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

Tabel 2.14
Persentase Pertumbuhan Perkapita Kota Sukabumi
Tahun 2019-2023

Persentase Pertumbuhan per Kapita (%)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,42	-6,80	2,24	3,79	3,60
Jumlah Penduduk (ribu orang)	326,61	345,20	350,15	355,42	360,64
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,10	5,69	1,44	0,50	0,49

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

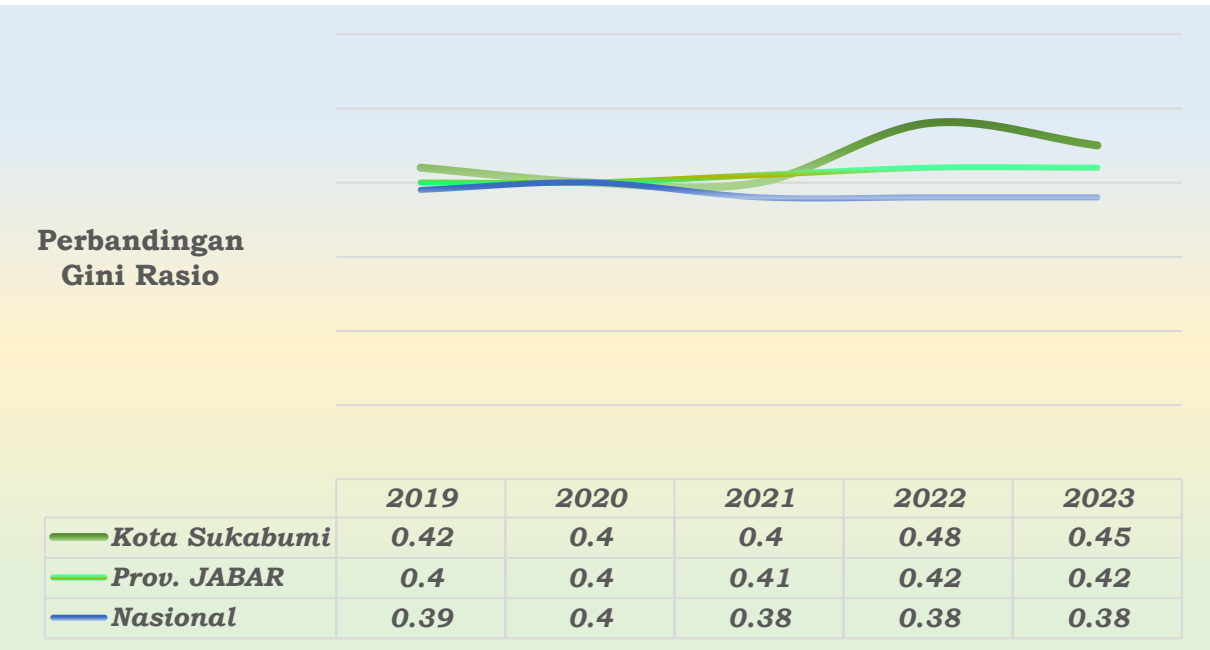
2.1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indikator gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan alam suatu populasi. Semakin tinggi indeks gini, semakin tinggi ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 (sama sekali tidak ada ketimpangan) hingga 1 (ketimpangan maksimal). Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Angka Indeks Gini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Pada Tahun 2023 tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,45 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Berikut disajikan perbandingan indeks gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama periode 2019-2023:

Gambar 2.11
Realisasi Indeks Gini di Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

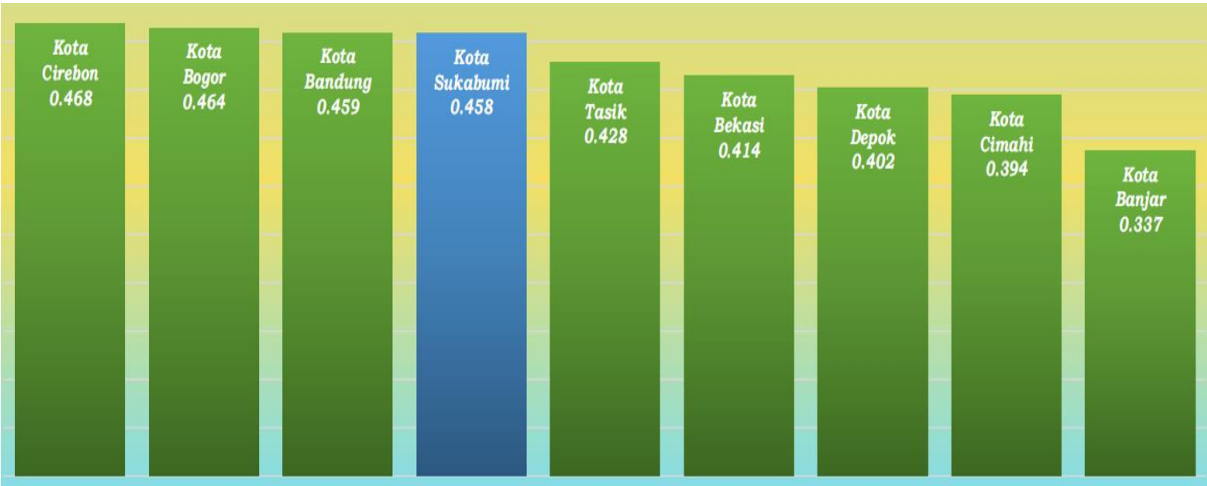
Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,45. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadaro, Kota Sukabumi termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini ratio berkisar 0.36-0,49). Kota Sukabumi termasuk wilayah yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunnya kesejahteraan sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu (1) Ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; (2) Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; (3) Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki asset keuangan seperti properti dan saham; dan (4) Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Hal ini terlihat saat terjadi guncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena menurunnya kemampuan untuk

memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Gambar 2.12
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

2.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human Development Index* atau *HDI* yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Penyempurnaan metode penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan secara berkala untuk memperoleh indikator yang lebih baik lagi dan relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perhitungan IPM ini mengacu kepada perhitungan BPS yang mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. Pada tahun

2023 Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF) digunakan sebagai dasar penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

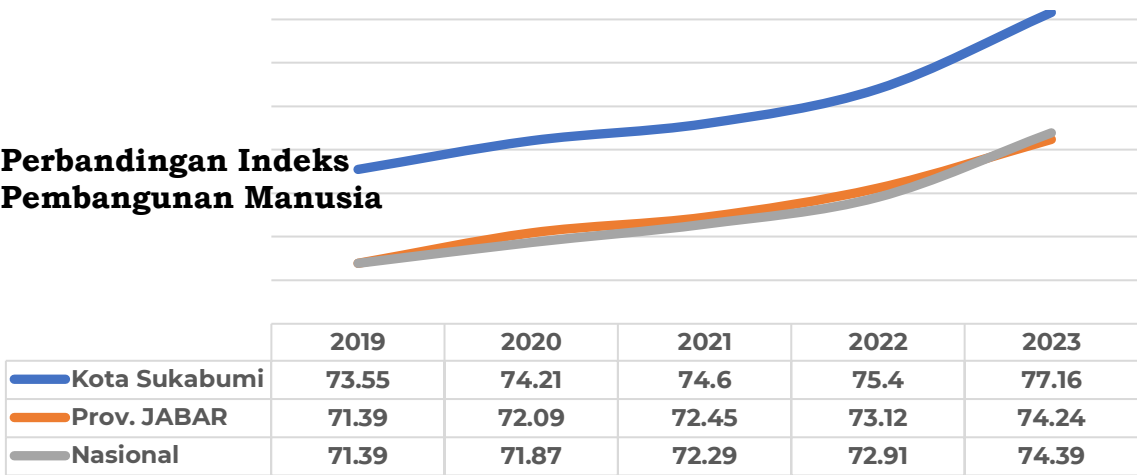
IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun melambat dibanding dua tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi tahun 2023 mencapai 77,16 poin meningkat sebesar 0,92 poin (1,21 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang

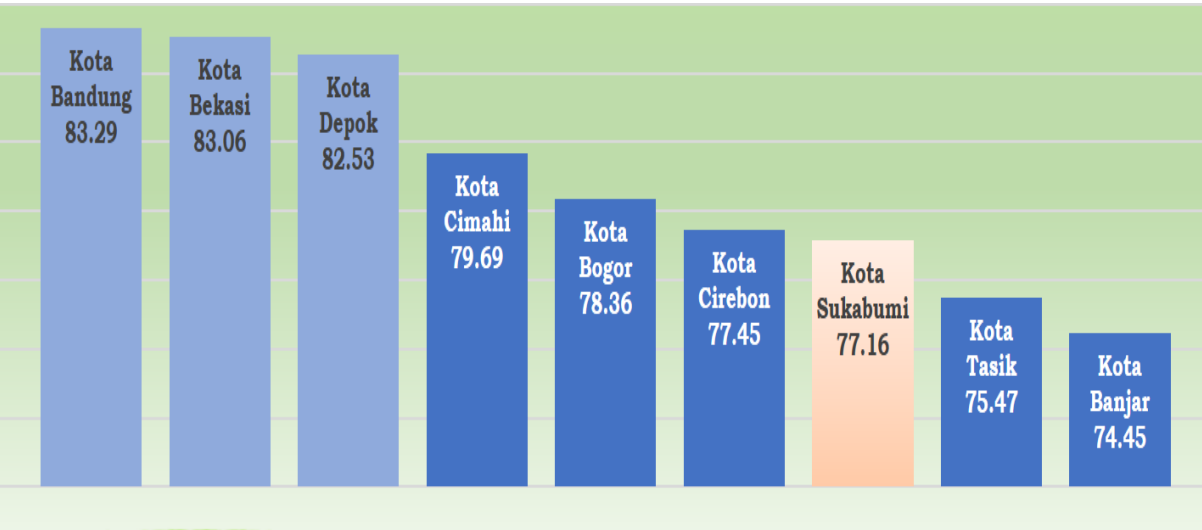
sebesar 76,24. Selama periode 2020-2023, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun.

Gambar 2.13
Capaian dan Perbandingan IPM Kota Sukabumi, Provinsi dan Nasional Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

Gambar 2.14
Perbandingan Capaian IPM Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

Peningkatan IPM Kota Sukabumi tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,89 tahun, lebih lama 0,25 tahun (0,33 persen) dibandingkan tahun 2022.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 13,59 tahun menjadi 13,60 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,23 tahun (2,27 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 10,14 tahun menjadi 10,37 tahun.

Dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2023 mengalami peningkatan 570 ribu rupiah (5,08 persen) dibanding tahun 2022 menjadi sebesar Rp 11,80 juta rupiah.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2023 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,16 pada tahun 2023. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat sepanjang periode 2020–2023. Peningkatan IPM tahun 2023 IPM didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami akselerasi pertumbuhan di 2023 sebesar 5,08 persen. Sedangkan dua indikator yang mengalami perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun sebelumnya adalah Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan masing-masing 0,33 persen dan 2,27 persen. Kecepatan pertumbuhan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) bergerak stabil sama seperti di tahun 2022, yaitu 0,07 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Menurut Dimensi Penyusunnya
Tahun 2020-2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	74,23	74,38	74,64	74,89

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,47	13,58	13,59	13,60
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,59	9,81	10,14	10,37
Sumber Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	10.999	10.942	11.229	11.799
Indeks Pembangunan Manusia		75,06	75,44	76,24	77,16

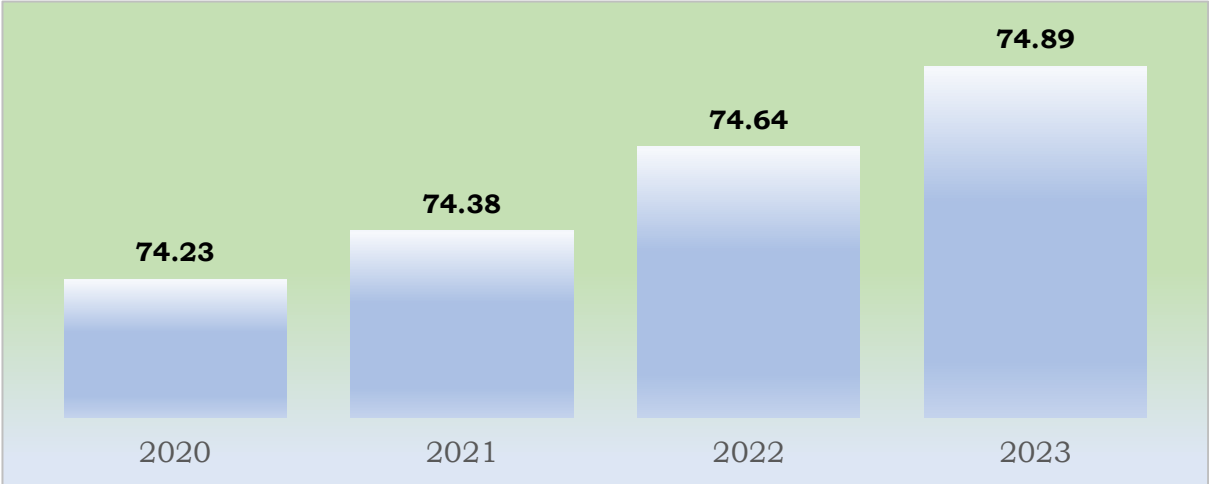
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Kota Sukabumi telah meningkat sebesar 0,66 tahun. Selama periode tersebut, rata-rata UHH Kota Sukabumi tumbuh sebesar 0,30 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Sukabumi adalah 74,23 tahun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,89 tahun. UHH tahun 2023 meningkat sebesar 0,25 tahun (0,33 persen) jika dibandingkan tahun 2022. Terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun 2022 yang mencapai 0,35 persen.

Penambahan umur harapan hidup dari bayi yang baru lahir merupakan dampak positif dari keberhasilan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik dari sisi prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.15
Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

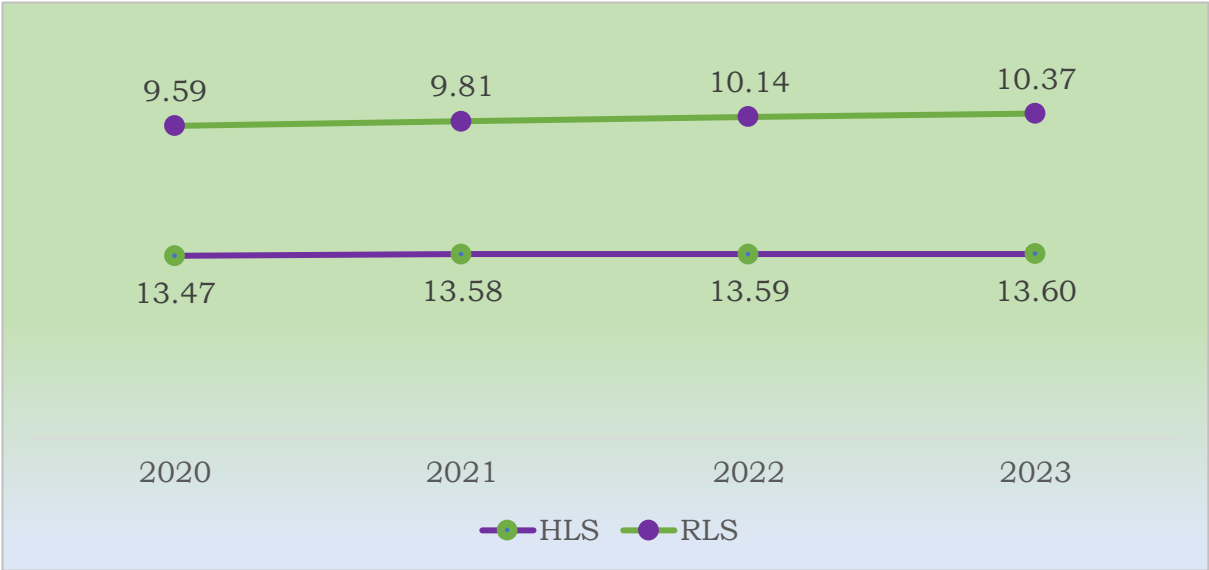


Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2020 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan HLS Kota Sukabumi sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2023, HLS Kota Sukabumi mencapai 13,60 tahun, yang berarti anak umur 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma II. Berikut gambaran Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2023:

Gambar 2.16
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

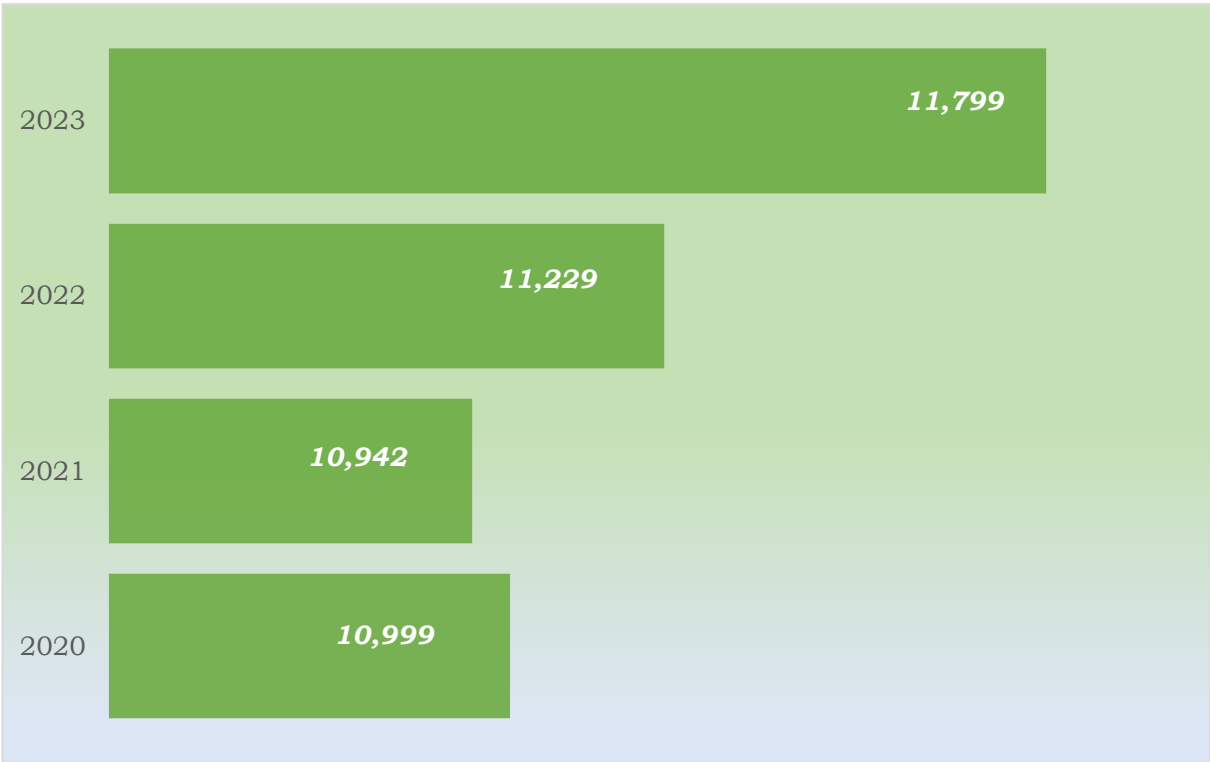


Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Sementara pada periode yang sama, RLS Kota Sukabumi rata-rata tumbuh sebesar 2,64 persen per tahun. Pada 2023, RLS Kota Sukabumi mencapai 10,37 tahun atau setara dengan menyelesaikan masa pendidikan hingga menamatkan SMA kelas X. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sukabumi yang lebih baik. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator proses pembangunan dari program-program yang bersifat jangka pendek. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan hasil upaya pembangunan yang bersifat jangka panjang. Kedua indikator ini saling melengkapi dalam menggambarkan capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita per tahun (harga konstan 2012). Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Kota Sukabumi mencapai Rp 11,80 juta per tahun. Angka ini meningkat Rp 570 ribu (5,08 persen) dibandingkan tahun 2022. Dalam kurun waktu 2020-2023, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 2,39 persen per tahun. Pengeluaran riil per kapita selama tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.17
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023 (Rp000)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Jika dibandingkan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi berada diatas IPM Provinsi Jawa Barat yang artinya bahwa secara rata-rata kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi melebihi rata-rata kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Apabila sejak tahun 2013 status pembangunan manusia Kota Sukabumi telah tergolong berkategori “tinggi”, karena IPM nya telah berada di atas 70, maka status “tinggi” dalam pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat baru tercapai di tahun 2016. Kecepatan dalam melakukan pembangunan di setiap wilayah tidaklah merata. Upaya yang dikerahkan untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kecepatan yang terjadi.

IPM di Kota Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang kurun waktu 2020-2023, IPM Kota Sukabumi telah mengalami kenaikan sebanyak 2,10 poin dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan per tahun sebesar 0,92 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan 0,74 persen per tahun dengan kenaikan IPM 1,63 poin dalam periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kota Sukabumi masih berada diatas rata-rata Jawa Barat.

Di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM di kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$), serta dua puluh kabupaten/kota dengan capaian IPM berkategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan tiga kabupaten/kota dengan capaian IPM di kategori “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$). Sejak tahun 2012 Provinsi Jawa Barat tidak memiliki wilayah kabupaten/kota dengan capaian pembangunan manusia berkategori “rendah”.

2.1.2.5 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan sering sekali menjadi penghambat laju pembangunan manusia, misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga berpengaruh buruk bagi hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding kondisi 2022 dari 8,02 persen menjadi 7,50 persen. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi tahun 2020-2023:

Tabel 2.16
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2020	25,42	7,70
2021	27,19	8,25
2022	26,59	8,02
2023	24,96	7,50

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Untuk mengukur kemiskinan, konsep yang digunakan BPS yaitu dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berikut tabel dalam kurun waktu empat tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Kota Sukabumi sebesar 1,39 persen pada tahun 2021, dan terendah sebesar 1,17 persen di tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 1,39 persen. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 2.17
Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

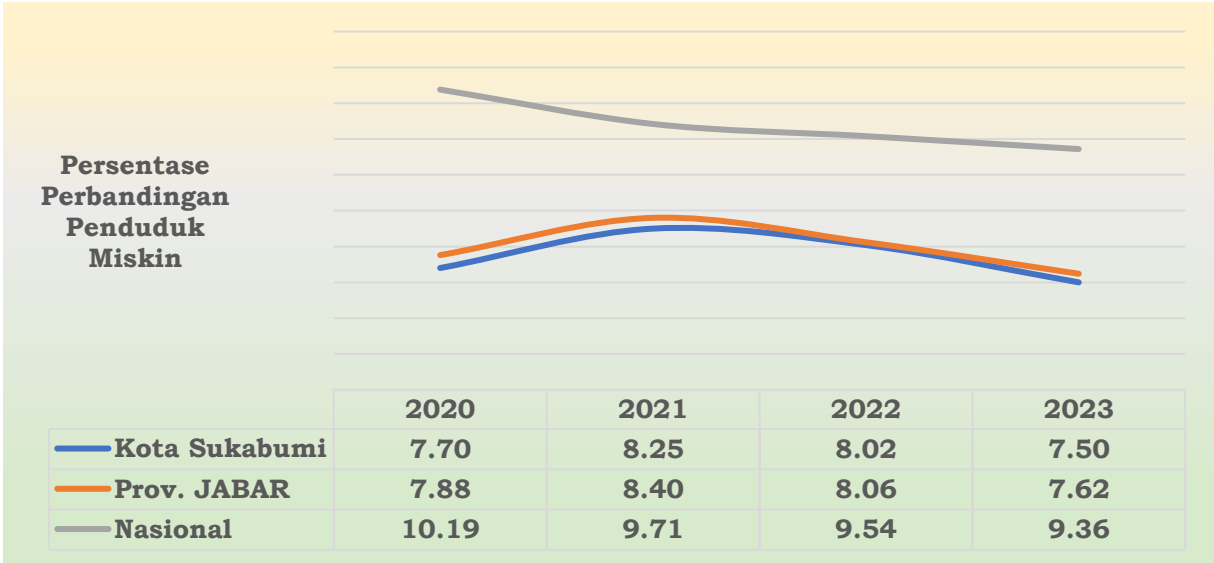
Indikator	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	25,42	27,19	26,59	24,96
Persentase Penduduk Miskin	7,70	8,25	8,02	7,50
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	547.415	567.734	594.118	644.276
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,17	1,39	1,27	1,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,36	0,38	0,31

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,38 persen di tahun 2022, dan terendah sebesar 0,22 persen di tahun 2020. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti naik dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sukabumi meningkat.

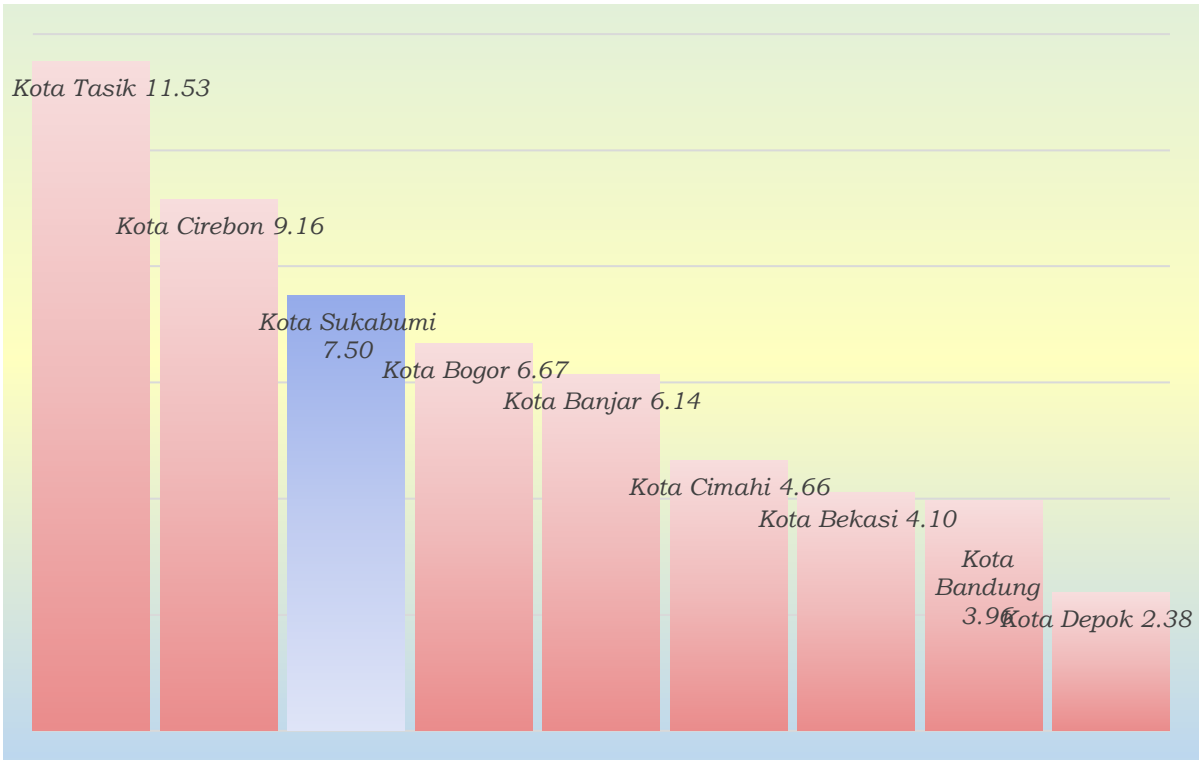
Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kota Sukabumi berada dibawahnya. Tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.18
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Gambar 2.19
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi dengan Kota Lainnya di Jawa Barat Tahun 2023



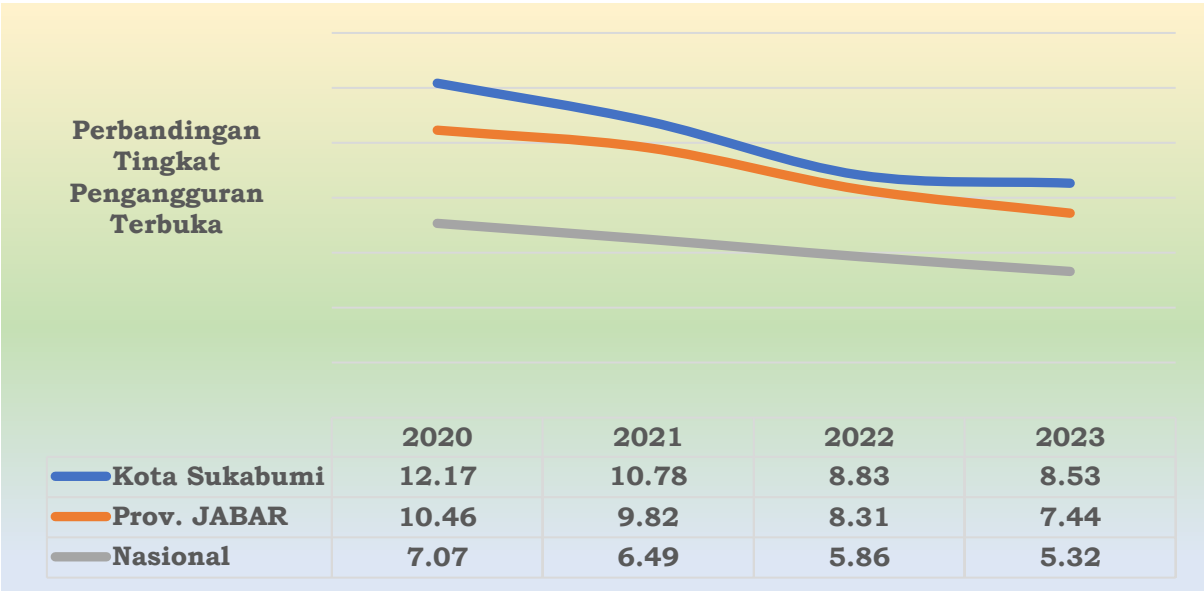
Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

2.1.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

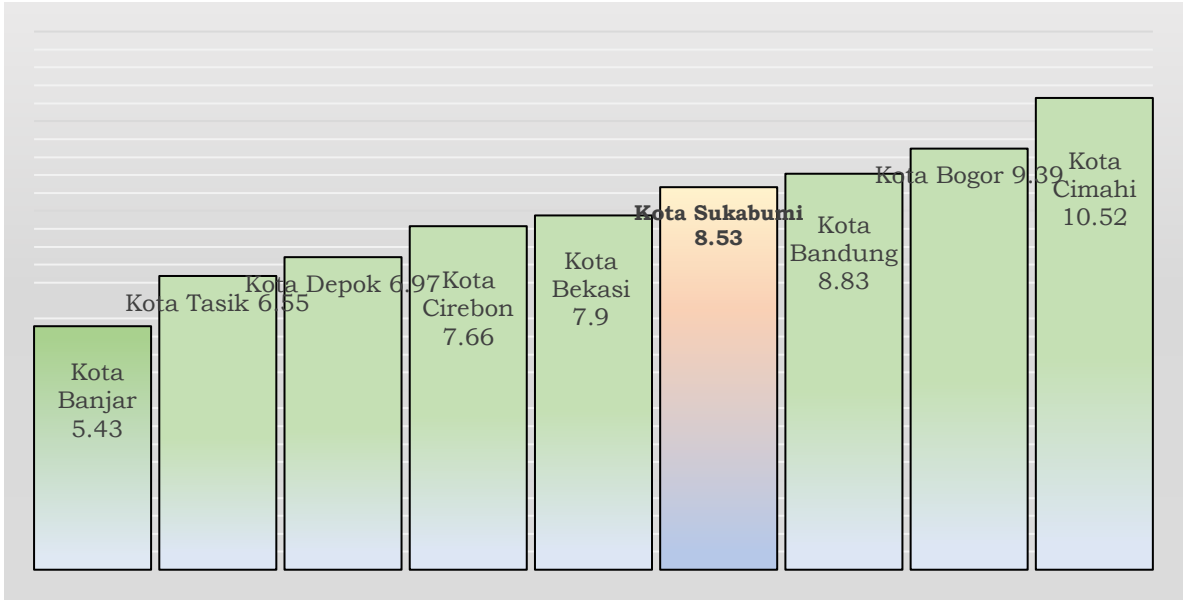
Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dirasa sangat kompleks dengan kondisi Kota Sukabumi yang tidak memiliki sumber daya alam dan angkatan kerja semakin meningkat. Selama periode 2020-2023, kondisi TPT Kota Sukabumi turun sebesar 3,64 persen. Berikut tabel perbandingan persentase TPT Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020-2023:

Gambar 2.20
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Gambar 2.21
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi
dengan Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2023 (Persen)



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

TPT Kota Sukabumi Tahun 2023 dibandingkan dengan Kota lain, berada pada urutan ke-4 (empat) tertinggi di Jawa Barat. Begitupun dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional, TPT Kota Sukabumi lebih tinggi. Permasalahan terkait pengangguran dan dunia kerja ini diantaranya yaitu jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan juga belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja. Berikut tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin:

Tabel 2.18
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kota Sukabumi Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	27.669	17.222	44.891
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	5.946	3.916	9.862
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	7.882	2.013	9.895
Buruh/Karyawan/Pegawai	48.733	23.731	72.464
Pekerja bebas	9.392	1.794	11.186
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.706	6.758	8.464
Jumlah	101.328	55.434	156.762

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

2.1.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

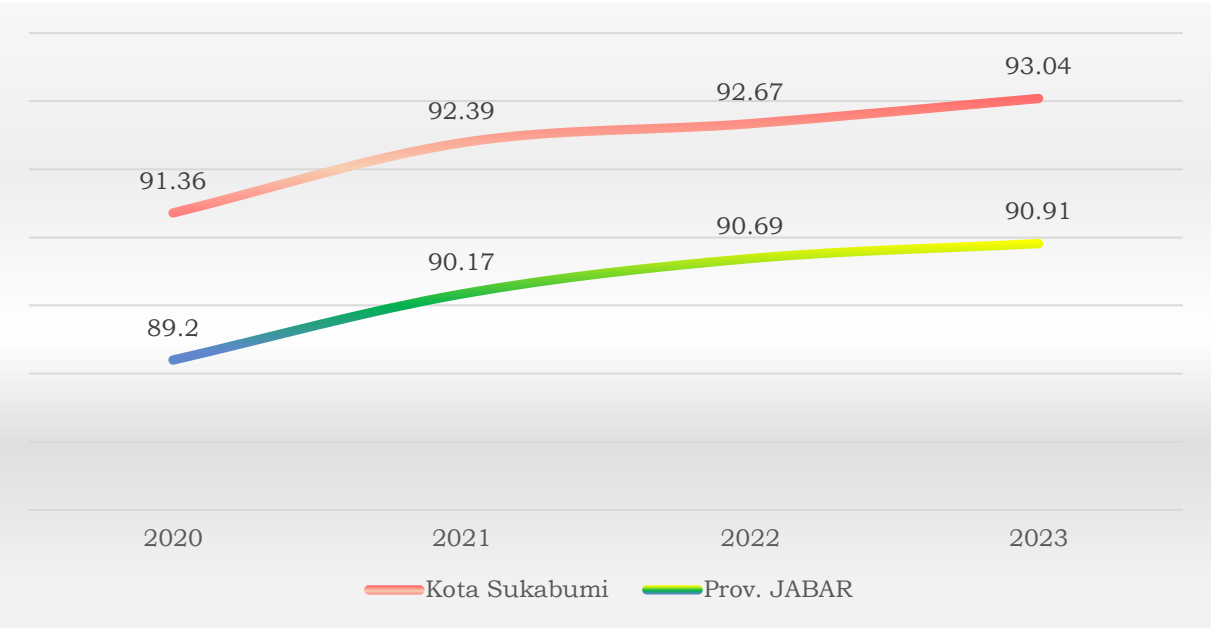
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai salah satu strategi pengarusutamaan gender dalam Pembangunan. Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPRG bukanlah anggaran yang terpisah antara laki-laki dan Perempuan akan tetapi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan persoalan laki-laki dan Perempuan serta memberikan dampak atau

manfaat yang setara. Dengan memperhatikan PPRG, kota sukabumi telah berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk mengetahui capaian pembangunan manusia secara gender digunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan membandingkan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Capaian IPG Kota Sukabumi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPG Provinsi Jawa Barat. Artinya pembangunan manusia secara gender di Kota Sukabumi lebih merata dibanding di tingkat Jawa Barat. Berikut grafik perbandingan capaian IPG Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat:

Gambar 2.22
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sukabumi
dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan di Kota Sukabumi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara untuk Tahun 2019 yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2023
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80,7	70,17	80,9	81,21
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	101,83	98,3	99,76	98,87
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	108,34	92,79	98,18	92,15
4	Tingkat partisipasiI warga negara usia -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian indikator urusan pendidikan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini,

meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun, meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

- 1. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 37.773. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 38.201.
- 2. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 17.162. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 18.622.
- 3. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 1.890. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan = 1.890.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	98,28%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	92,53%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 –6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	80,32%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Tahun 2023.

Capaian SPM Pendidikan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pada jenjang Pendidikan Dasar adalah 98,28%, jenjang kesetaraan capaiannya adalah 92,53% dan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah 80,32%, untuk PAUD capaiannya belum optimal dikarenakan pada jenjang ini belum masuk dalam kategori Program Wajib Belajar, namun demikian capaiannya sudah dapat dikategorikan “Baik”.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,4	0,45	0,4	3,23
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	101,91	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	103,83	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	108,69	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	73,97	99,15	95.90	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	24,07	100	80,73	95,79
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	26,6	90,16	41,35	67,79
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	72,45	75	89,47	97,70
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	12,46	100	89,54	84,13
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	13,03	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	91,93	100	87,63	89,36
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	94,56	100	94,79	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Kesehatan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan, dan menurunkan angka kematian.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1.094Jumlah Penduduk di Kota Sukabumi = 316.581;
2. Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 6. Jumlah RS di Kota Sukabumi = 6;
3. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.785. Jumlah ibu hamil di Kota Sukabumi = 5.785;
4. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5.522. Jumlah ibu bersalin di Kota Sukabumi = 5.522;
5. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.401. Jumlah bayi baru lahir di Kota Sukabumi = 5.295;
6. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 25.415. Jumlah balita di Kota Sukabumi = 25.406;
7. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 51.734. Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Sukabumi = 54.006;
8. Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 147.013. Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Sukabumi = 216.852;
9. Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 37.128. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota Sukabumi = 40.536;
10. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 27.134. Jumlah penderita hipertensi di Kota Sukabumi = 32.251;
11. Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 5.004. Jumlah penderita DM di Kota Sukabumi = 4.865;
12. Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 445. Jumlah penderita ODGJ di Kota Sukabumi = 498;
13. Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 10770. Jumlah penderita TBC di Kota Sukabumi = 6.016;

14. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 12.839. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Sukabumi = 10.824;

Capaian indikator kinerja di atas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,62%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	72,04%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,27%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,31%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	91,49%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Tahun 2023.

Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah 89,47% dikarenakan Kondisi kemampuan sumber dana APBD sangat terbatas untuk ketersediaan BMHP (Belanja Medis Habis Pakai) untuk belanja stik kolesterol yang dibutuhkan untuk pemeriksaan belum semuanya

terpenuhi. Kurangnya kesadaran orang usia 15-59 yang mendapatkan skrining kesehatan standar hanya tercapai kinerja 41,35%. Penyebaran Pos Binaan Terpadu (Posbindu) belum merata disetiap Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah Kota Sukabumi, sehingga masih cukup banyak kelompok lansia yang tidak tersentuh dalam skrining kesehatan. Selain itu, belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan tentang pelayanan lansia yang menggunakan akses pelayanan di rumah sakit atau klinik swasta.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	478,95	-	57,32	18,45
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	165,25	57,57	55,41	64,15
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	94,39	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	71,54	91,2	91,51	71,64
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	3,43	100	100	100
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	84,81	81,08	87,63	86,86
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	5,36	100	100	28,07

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	-	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan, terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan, dan terwujudnya kawasan permukiman yang layak dan Meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan sarana dan prasarana jalan, mengembangkan penataan ruang wilayah, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, meningkatkan penataan kawasan kumuh, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana (KRB), dan Meningkatkan kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran, Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran Perda, meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, dan meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 4,91 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 26,61;
2. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 0. Kota Sukabumi secara geografis tidak memiliki wilayah pantai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peta RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042;

3. Luas irigasi kewenangan Kota Sukabumi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 841,40 Ha. luas daerah irigasi kewenangan Kota Sukabumi = 1.311,51 Ha;
4. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Sukabumi = 119.296. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Sukabumi = 119.296;
5. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 67.536. Jumlah rumah di Kota Sukabumi = 94.270;
6. Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 202. Jumlah IMB yang berlaku = 202;
7. Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 102,326. Jumlah total panjang jalan Kota Sukabumi = 117,796;
8. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Sukabumi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 48. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Sukabumi = 171. Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 293. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 293.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2023.

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik adalah 91,51%, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Sementara pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal atau IPAL Kawasan Pembangunan IPAL membutuhkan dana yang cukup besar dan lahan dengan luas tertentu yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	24,49	100	100	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	12,87	89,3	0,15	25,25
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	3,01	1,87	1,41	1,39
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	0	100	0	35,01

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tetap diprioritaskan kegiatan yang mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya terwujudnya kawasan permukiman yang layak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, meningkatkan penataan kawasan kumuh, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 30
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 30;
2. Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0.
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1;
3. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 38,65. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 153,03;
4. Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1.317. Jumlah total unit rumah Kota Sukabumi = 94.270;
5. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 4.193.
Jumlah unit rumah Kota Sukabumi = 11.976.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi sebagai berikut:

Tabel 2.26
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2023.

Capaian SPM Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi untuk jenis pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 100 persen dikarenakan terdapat kebijakan refocusing anggaran.

2.1.3.1.4 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.27

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perindungan Masyarakat Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	2,92

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	8,5	8,9	10,34

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda, meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, dan meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pengaduan yang ditangani = 34. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 34;
2. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 7
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 7;
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 353.631;
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana: 358.854;
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 1.092. Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 1.092;
6. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Sukabumi dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/

- Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Sukabumi = 98. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Sukabumi = 98;
7. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 10,34 menit.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, Tahun 2023.

2.1.3.1.5 Sosial

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Sosial di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, Meningkatkan pelayanan dasar dan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 160. Populasi korban bencana alam dan sosial di Kota Sukabumi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kota Sukabumi = 160;
2. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 8. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 8.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, Tahun 2023

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Persen	100	1,91	27,88	8,85
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	100	100	91.711.23
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	40,33	29,33	25,61	47,24
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	41,16	41,1	48,54	59,32

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan tenaga kerja di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi menyusun kebijakan terkait tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 8. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 8;
2. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 3.139. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 11.256;
3. PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 9.801,88 Jumlah tenaga kerja = 11.256;
4. Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 259. Jumlah Perusahaan = 1.011;
5. Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 1.908. Jumlah pencaker yang terdaftar = 3.930.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	63,92	77,369	77,56	58,55
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,04	0,036	0,32	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan	Persen	0,01	11,464	0,011	25,69

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi

Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 423.993.145.166. Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 546.666.993.557;
2. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota Sukabumi yang didampingi = 70. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 100.595;
3. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 33. Jumlah penduduk perempuan = 123.354;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.3 Pangan

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	116,59	133,081	138	116,9

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki cadangan pangan yang cukup yaitu sebanyak = 42.721,47 dari jumlah kebutuhan pangan = 36.545,76.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	26,55	N/A	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	N/A	N/A	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	26,65	N/A	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan Pertanahan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 belum terealisasi dengan baik, dan belum mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD. Hal ini disebabkan belum adanya perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menerbitkan ijin lokasi pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	59,58	60,3	59,71	60,0
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	88,63	85,94	73,76	73,21
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0	0	0,03	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara, Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan, Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan, Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sukabumi 60;
2. Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 49.275. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kota Sukabumi = 67.308,3;

3. Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Sukabumi = 1. Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 28.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	98,19	99,45	99,11	99,32
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	28,44	49,75	45,09	61,25
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97,69	98,02	98,83	99,43
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100	41,93

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = 259.210. Jumlah penduduk wajib KTP-el = 260.985;

2. Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 61.638. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 100.595;
3. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 107.318. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 107.937;
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 13. Jumlah OPD = 31.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,21	0	2,03	2,12
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,8	75,52	74,64	69,99
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	-	8,11	9,33	51,02

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, Optimalisasi program keluarga berencana, reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2,16;
2. Jumlah peserta KB Aktif Modern = 35.713. Jumlas Pasangan Usia Subur = 51.029;
3. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 5.562. Jumlah Pasangan Usia Subur = 51.029.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	80,8	100	1	1
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,48 (arteri sekunder)	0,38	0,37	0,33
			0,32			
			(kolektor sekunder)			
			0,23 (local sekunder)			

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kota Sukabumi Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan sarana dan prasarana jalan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Rasio konektivitas Kota Sukabumi 1;
2. Kinerja lalu lintas Kota Sukabumi 0,33.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	71,87	100	100	100
2	V/C Ratio di J alan Kabupaten/Kota	Persen	100	75,76	75,76	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	75,27	76,93	76,93	68,26

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 31. Jumlah OPD = 31;
2. Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 80. Jumlah Layanan Publik = 100;
3. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Sukabumi = 280.048. Jumlah penduduk = 358.854;

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	13,16	14,83	18,98	21,7
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 67. Jumlah seluruh koperasi = 353;
2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 31.926. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 31.926;
3. (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di Kota Sukabumi = 3.322.374.968.365. Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Sukabumi = 3.411.037.717.214.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	50,05	451,16	-2,60	-54,51

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi kurang baik dan tidak mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Menurunnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa investasi di Kota Sukabumi mengalami penurunan dengan jumlah investasi tahun 2023 - jumlah investasi tahun 2021 di Kota Sukabumi = 1.551.576.344.548 - 3.411.037.717.214 = -1.859.461.372.666.

Capaian indikator kinerja diatas tidak selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	17,6	25,59	24,41	25,4
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	22,6	23,87	22,78	23,17
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jenis	9	15	17	36

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik karena adanya

pandemi Covid-19, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Sukabumi = 22.745. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 89.529;
2. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sukabumi = 20.747 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 89.529;
3. Peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan 36 medali.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.13 Kebudayaan

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	73	73,33	73,3	83,56

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa kinerja Kota Sukabumi mampu melestarikan cagar budaya sejumlah = 21, dari jumlah cagar budaya yang terdata = 106.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.14 Statistik

Tabel 2.44						
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2023						
No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	71,87	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	78,12	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Statistik di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;
2. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.15 Persandian

Tabel 2.45						
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2023						
No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	62,95	63,41	70,69

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Persandian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 belum terealisasi dengan baik, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, mengelola 25 sistem elektronik yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik, dan mengamankan 25 titik system komunikasi. Adapun jumlah nilai per area keamanan informasi = 409 dengan jumlah area penilaian = 645 Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	61,49	65,34	70,10	70,42
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55,06	39,68	96,85	82,15

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 90.605 koleksi buku yang tersebar di berbagai perpustakaan, dikunjungi oleh 361.581 orang

baik secara online maupun onsite, memiliki 280 tenaga perpustakaan, mengelola 43 perpustakaan berstandar nasional, melaksanakan 6 kegiatan sosialisasi gemar membaca.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.17 Kearsipan

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 danPasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	55,03	56,03	63,12	64,61
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	50	51,67	66,67	71,67

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 99.200 arsip aktif yang

telah dibuatkan daftar arsip, 112.000 arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 2.500 arsip statis, dan 2.500 arsip yang telah dimasukan dalam SIKN.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah (Ton)	1.243,83	1.388,70	1.401,11	102,89

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA).

2.1.3.3.2 Pariwisata

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Sat	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	7	1,99	2,24	7,78
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	27	21,74	21,97	23,01

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Sat	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tingkat hunian akomodasi	Hari	4.475	36.000	887	102,06
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,92	2,95	2,95	3,17
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	13.419.712.356	46.861.100.000	22.448.213.698	24.610.383.299

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan ekonomi kreatif, Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan disain Daerah sebagai objek wisata *heritage*.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah membina pengelolaan 5 destinasi wisata, melengkapi infrastruktur dasar untuk 7 destinasi wisata, dan mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2023 – Jumlah wisatawan tahun 2022 = 280. Jumlah wisatawan tahun 2022 = 3.599;
2. Jumlah wisatawan nusantara tahun 2023 – Jumlah wisatawan tahun 2022 = 101.531. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 441.132;
3. Jumlah kamar yang terjual = 410.179. Jumlah kamar yang tersedia = 401.865;
4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah 6,038%.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.3 Pertanian

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(Ton)	2,44	6,64	6,90	6,68
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	26,87	0	0	-100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian indikator Urusan Pertanian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi cukup baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 22.314. Luas panen = 3.337,51.;
2. Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2023 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2022 = 0. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2022 = 1.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Persen	6,19	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	91,95	53,78	45,15	67,0
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	23,6	89,33	208,75	80,89

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Perdagangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 33. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kota Sukabumi = 33;
2. Realisasi = 1.019,36 Alokasi =1.350;
3. Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 728. Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kota Sukabumi = 900 UTTP.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	3,88	0,42	3,19	2,21

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	10	0	10	95
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	16,27	0	100	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	100	0
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	85	85	85	95

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2023 – Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 = 60. Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 = 2720;
2. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	18,19	N/A	...	28,16
2	Rasio PAD	Persen	29,77	2,78	...	35,95
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	1	82,4	86,18	85,71
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian IKK urusan Urusan Perencanaan dan Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

2.1.3.4.2 Pengadaan

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	19,6	6,55	3,3	43,38
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	74,1	96,51	62,74	52,25

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengadaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 = 0. Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023 = 0;
2. Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 511. Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 609;
3. 3. Jumlah nilai belanja langsung (Belanja Operasional) yang melalui pengadaan = 664.121.761.649. Total belanja langsung (Belanja Operasional) = 1.270.863.895.847;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.3 Kepegawaian

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	210	283,76	76,06	75,75

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,6	9,86	7,8	15,77
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,09	84,75	37,6	50,81

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan manajemen pegawai ASN dan meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1.172. Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah = 1.547;
2. Jumlah Pegawai PNS Fungsional (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) = 244. Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) = 1.547;
3. Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi = 117. Seluruh Jumlah Pegawai Non Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) = 244.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.4 Manajemen Keuangan

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	Persen	1	2,8	3,87	10,38

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
APBD						
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1	14,71	0,31	16,66
3	Manajemen Aset	Persen	50	2	2	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	6,06	10,02	10,79	4,11

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Manajemen Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = 1.251.744.741.073. Total belanja APBD dikurangi satu = 1.205.069.299.476;
2. Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi = 363.263.682.587. Dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu = 362.135.926.773;
3. Nilai realisasi SiLPA = 120.840.911.331. Total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.120.051.026.976.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	110,96	0	0	96,30
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	83,33	41,67	41,67	83,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda.
Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda;
2. Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 5. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi

2.1.4.1.1. PDRB dan PDRB Per Kapita

Nilai PDRB mencerminkan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 15.349,71 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.157,46 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 14.192,25 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 9.801,88 miliar rupiah pada tahun 2023. Di tahun 2023 Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, dimana terjadi perlambatan kecepatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 5,35 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi.

Secara umum, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan

jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 42,56 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Sukabumi juga mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2023, masing-masing sebesar 26,53 juta rupiah dan 27,18 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi disini.

Tabel 2.58
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Sukabumi, Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	12.387.691,54	12.401.540,58	13.053.044,18	14.192.254,06	15.349.709,36
ADHK	8.664.017,06	8.534.716,50	8.851.051,49	9.324.164,63	9.801.880,80
PDRB Per Kapita (Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	37.927.735,70	35.925.772,04	37.278.009,63	39.931.275,25	42.561.942,04
ADHK	26.526.859,19	24.724.047,59	25.277.596,39	26.234.436,27	27.178.826,77
Persentase Pertumbuhan Per Kapita (%)					
Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,42	-6,80	2,24	3,79	3,60
Jumlah Penduduk (ribu orang)	326,61*)	345,20**)	350,15***)	355,42***)	360,64***)

Persentase Pertumbuhan Per Kapita (%)					
Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,10	5,69	1,44	0,50	0,49

* Angka sementara

* Angka sangat sementara

*) Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk SUPAS 2015

***) Berdasarkan hasil SP LF 2020

***) Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Interim 2020-2023

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 BPS, 2024.

2.1.4.2 Daya Saing SDM

2.1.4.2.1 Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen yang menyusun IPM. Indeks Pendidikan terdiri dari komponen indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah.

Indeks Pendidikan Kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan ini berkorelasi dengan variabel pembentuknya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kota Sukabumi pada tahun 2022 sebesar 10,14. Artinya rata-rata masyarakat Kota Sukabumi pendidikan terakhirnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Sementara itu, HLS Kota Sukabumi pada tahun 2022 mencapai 13,59 tahun, meningkat 0,01 poin dari angka HLS tahun 2021. Angka HLS sebesar 13,59 tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Kota Sukabumi sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kinerja urusan pendidikan sudah semakin membaik.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi kunci yang sangat penting untuk meningkatkan angka Indeks Pendidikan. Perlu dilakukan upaya antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar formal maupun non formal/kesetaraan, bantuan bagi siswa-siswi kurang mampu, dan pemberdayaan satuan pendidikan non formal berbasis kemasyarakatan. Jika hal tersebut dilakukan dengan tepat, maka Indeks Pendidikan Kota Sukabumi akan tetap berada diatas Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

2.1.4.2.2 Literasi/Numerasi

Literasi/numerasi adalah komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid sehingga mampu mengembangkan kapasitas diri dan

berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga mampu beradaptasi sebagai masyarakat.

Rata-rata kemampuan literasi siswa Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan peningkatan dan termasuk dalam kategori BAIK. Artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Numerasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan numerasi siswa-siswi Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan tren meningkat dan masuk dalam kategori BAIK dan didapatkan data bahwa 40-70 persen peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

Seiring dengan meningkatnya literasi/numerasi peserta didik, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sukabumi juga menunjukkan hasil yang semakin membaik. Berdasarkan penilaian IKK atau Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kota Sukabumi merupakan terbaik ketiga tingkat nasional. Sementara untuk kinerja bidang kearsipan, merupakan terbaik keempat di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian permasalahan pembangunan literasi masyarakat di Kota Sukabumi masih perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat ditengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum semuanya ideal, serta terbatasnya pustakawan.

2.1.4.3 Daya Saing Infrastruktur

2.1.4.3.1 Kualitas Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

IKLI Kota Sukabumi termasuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infrastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.

2.1.4.3.2 Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa, sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan dapat dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Tingkat kemajuan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik, sedangkan sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan. Kondisi sarana jalan banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia, dalam hal ini kendaraan. Saat ini, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2.1.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

Berdasar data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga November 2022 sebanyak 4.488 usaha di Kota Sukabumi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya pengurusan perizinan yang dipermudah melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* berbasis risiko, jumlah ini perlu terus ditingkatkan. Untuk mendukung hal ini, berbagai inovasi kemudahan layanan terus diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui aplikasi Si Jimat Boss (Sistem Jemput Perizinan Masyarakat Bersama OSS). Sistem jemput bola perizinan langsung ke masyarakat ini sebetulnya sudah berjalan, hanya saja untuk OSS sedikit terkendala karena tidak bisa digabung dengan program yang lainnya.

Laju perkembangan investasi dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Sukabumi menunjukkan tren meningkat. Nilai investasi mencapai Rp. 3,322 triliun. Dari jumlah investasi tersebut, tenaga kerja yang terserap mencapai 25.353 orang dengan jumlah 6.237

perusahaan, terdiri dari mikro mencapai 5.996 perusahaan, Perusahaan Kecil (PK) sebanyak 234, Perusahaan Menengah (PM) mencapai 36, dan Perusahaan Besar (PB) sebanyak 21. Dengan adanya investasi ini, tentunya berdampak kepada perekrutan tenaga kerja, yaitu sebanyak 25.353 orang.

2.1.4.5 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama atau IKU Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcomes atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4. Dalam Perda tersebut ditetapkan jumlah indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas), indikator kinerja tersebut terdiri dari 6 (enam) indikator untuk Misi I, 4 (empat) indikator untuk Misi II, 4 (empat) indikator untuk Misi III, dan 5 (lima) indikator untuk Misi IV.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun 2023			Ket		
				Target	Realisasi	Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA									
I	MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKUALITAS YANG BERAKHLAK MULIA	a	Indeks rasa aman	Persen	75,91	64,90	76,33	100	Sangat Tinggi
		b	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	75,4	74,75	77,16	100	Sangat Tinggi
1	MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	78,10	80,09	78,46	97,96	Sangat Tinggi
2	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,318	0,367	0,341	92,92	Sangat Tinggi
3	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN MERATA	a	Indeks Pendidikan	Angka	71,55	69,83	72,34	100	Sangat Tinggi
4	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	a	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	80,31	63,6	86,59	100	Sangat Tinggi
5	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK	a	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,83	91,31	91,83	100	Sangat Tinggi
6	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	79,63	68,01	87,22	100	Sangat Tinggi
MISI 2: MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN									
II	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	a	Indeks kenyamanan	Angka	22,46	23,5	23,82	100	Sangat Tinggi
		a	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	86,75	82	87,36	100	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun 2023			Ket		
				Target	Realisasi	Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
2		Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	55,60	45	57,90	100	Sangat Tinggi	
3	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	59,71	59,78	60,00	100	Sangat Tinggi
4	TERWUJUDNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA	a	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	100	Sangat Tinggi
MISI 3: MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR									
III	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG KREATIF DAN BERKELANJUTAN	a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,54	5,54	100	Sangat Tinggi
1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	3.322,37*	2.041,24*	14.192,25*	100	Sangat Tinggi
2	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Persen	5,5	3	5,12	100	Sangat Tinggi
3	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA KREATIF MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	3,08	1,30-1,44	3,15	100	Sangat Tinggi
4	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA DAN KETERSEDIAAN PANGAN MASYARAKAT	a	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	83,9	80,30	86,1	100	Sangat Tinggi
MISI 4: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF									
IV	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN	a	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	71,1	68,48	74,78	100	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun 2023			Ket		
				Target	Realisasi	Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
REFORMASI BIROKRASI									
1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a	Nilai SAKIP	Skor	76,7	80	77,73	97,16	Sangat Tinggi
2		b	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
3	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,06	3,01	3,38	100	Sangat Tinggi
4	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	a	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,98	2,50	2,98	100	Sangat Tinggi
	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	a	Skor Indeks Inovasi Daerah	Predikat Inovatif	Terinovatif (≥ 1001)	Sangat Inovatif (65,74)	100	Sangat Tinggi	
5	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a	Indeks Daya Saing Daerah	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100	Sangat Tinggi

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, terdapat 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh Indikator kinerja Utama (IKU), 19 indikator memiliki tingkat capaian kinerja ≥91% (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam kategori kinerja SANGAT TINGGI.

Pencapaian IKU pada seluruh misi yang ada dalam RPJMD Tahun 2023, ditembak oleh 71 Program, 106 Kegiatan dan 276 Sub Kegiatan, didukung sumber daya anggaran total alokasi anggaran sebesar 787,32 Milyar dengan efisiensi anggaran sebesar 26,45 Milyar dari APBD Kota Sukabumi Tahun 2023.

Persentase capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2023 yang dipilah berdasarkan masing-masing Misi RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Persentase Kategori Capaian IKU Kota Sukabumi
Tahun 2023 Berdasarkan Misi RPJMD

No	Kategori Capaian IKU	Nilai	Jumlah IKU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I (Jumlah IKU = 6 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	≥ 91%	6	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	0	0
Jumlah IKU			6	100,00
Misi II (Jumlah IKU = 4 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	≥ 91%	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	0	0
Jumlah IKU			4	100,00
Misi III (Jumlah IKU = 4 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	≥ 91%	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	0	0
Jumlah IKU			4	100,00
Misi IV (Jumlah IKU = 5 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	≥ 91%	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	0	0
Jumlah IKU			4	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2023

2.1.4.6 Inovasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah

Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah.

Pembaharuan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dapat berbentuk:

1. Inovasi tata kelola publik, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi pelayanan publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;
3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai visi Kota Sukabumi yaitu terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera, maka diperlukan adanya beberapa inovasi daerah dalam rangka mengakselerasi pencapaian sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun inovasi daerah Kota Sukabumi yang dilaksanakan pada periode 2018-2023 dituangkan dalam 15 (lima belas) program unggulan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD 2018-2023.

Kota Sukabumi telah berhasil mencetak berbagai prestasi baik dari sisi perencanaan maupun pembangunan Kota Sukabumi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dan mendukung percepatan pembangunan.

Adapun inovasi daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;

Untuk mencapai pilar religius yaitu mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga, maka dilaksanakan program inovasi ini melalui:

- a) Program peningkatan kualitas lembaga keagamaan;
 - b) Program gerakan magrib mengaji;
 - c) Program gerakan subuh berjamaah;
 - d) Program pembiasaan akhlakul karimah;
 - e) Program peningkatan toleransi;
 - f) Program family straightening (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga);
 - g) Program promosi kota halal *friendly*.
- 2) Program Peningkatan Literasi;
- Program ini merupakan salah satu inovasi untuk mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan acara-acara menarik di Daerah yang dilaksanakan oleh penggerak perpustakaan keliling.
- 3) Uduan *online* didukung oleh Forum Silih Asih Silih Asuh;
- 4) Program *Student Camp*;
- Program *Student Camp*, merupakan program pendidikan holistik yang bertujuan melakukan pembentukan karakter bagi siswa SMP, SMA dan SMK sederajat. Program ini diharapkan akan melahirkan pelajar-pelajar yang dapat berperan sebagai agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungannya. Program ini dirancang untuk memperkaya para peserta dengan pelatihan- pelatihan yang merangsang pertumbuhan jiwa kepemimpinan dan wawasan pengetahuan lingkungan para peserta.
- Perlu kiranya diketahui bahwa program ini titik tolaknya ada pada bagaimana melakukan pelatihan pada siswa-siswa pilihan yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik bagi siswa-siswa lainnya dari hasil pelatihan.
- Pelatihan ini diharapkan untuk membangun rasa persaudaraan antar para pelajar di Daerah, sehingga diharapkan mampu menekan dan meredusir masalah-masalah kenakalan pelajar serta berbagai perilaku negatif lainnya.
- 5) Program Optimalisasi Puskesmas;
- Program Optimalisasi Puskesmas, merupakan program untuk peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan dokter spesialis, peralatan medis, layanan peserta BPJS nonstop 24 jam, dan ambulan SIGAP. Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan atau home care sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi pelayanan warga yang memerlukan pengobatan,

pertolongan medis di setiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal.

Program ini turut mengimbangi pertumbuhan Daerah yang cukup signifikan. Kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah dari sisi kuantitas penduduk menuntut perimbangan dari sisi kualitas dan fasilitas sebuah kota. Khusus di bidang kesehatan, program ini diupayakan pemerintah untuk mendorong perimbangan itu terjadi serta upaya optimalisasi.

Program ini dirancang dengan basis puskesmas di setiap kewilayahan, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalami peningkatan. Daerah memiliki harapan bahwa peningkatan ini tidak hanya berdampak bagi peningkatan pelayanan kesehatan saja namun juga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Daerah secara lebih menyeluruh.

6) Program Rumah Singgah;

Program Rumah Singgah merupakan program untuk menyediakan rumah singgah dan tenaga administrasinya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memeriksakan kesehatan, pengobatan dan perawatan medis setelah dirujuk ke Rumah Sakit di sekitar Kota Bandung.

Program ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi beban dan memudahkan masyarakat Daerah ketika harus memenuhi kebutuhan pengobatan ke rumah sakit rujukan di Kota Bandung khususnya RS Hasan Sadikin. Kesulitan-kesulitan yang sering timbul akibat lokasi pengobatan jauh dari tempat tinggalnya dan tidak mampu untuk membiayainya.

Dengan adanya rumah singgah yang disertai tenaga administrasi maka fungsi fasilitas ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara saja bagi pasien yang hendak merujuk namun hal-hal yang biasanya menjadi kesulitan khususnya persoalan administratif pada rumah sakit rujukan dapat ditanggulangi dengan baik. Alamat Rumah Singgah yaitu di Jl. Turangga No. 33, Bandung.

7) Kelurahan *Sport Center*;

Inovasi ini merupakan program penyediaan ruang terbuka publik dan fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap kelurahan.

Hingga akhir tahun 2022 terhitung 26 (dua puluh lima) lokasi sudah terbangun *Sport Center*, dan masih menyisakan 7 (delapan) dikarena

tidak adanya lokasi milik pemerintah yang bisa dijadikan lapang *sport center*;

8) Program Revitalisasi Pedestrian;

Program ini merupakan konsep penataan integrasi kawasan lapang merdeka sehingga dapat menjadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman serta dapat menjadi salah satu *landmark* kota; selain kawasan terintegrasi lapang merdeka dan alun-alun juga diprioritaskan untuk revitalisasi pedestrian lainnya yang dapat merubah wajah Daerah atau dilokasi-lokasi pintuk masuk Daerah.

Pembangunan pedestrian yang berlokasi di Jalan A. Yani mampu dibangun dengan total panjang jalan yaitu $\pm 866,12 \text{ m}^2$, Jalan R. Syamsudin, SH dengan total Panjang jalan yaitu $\pm 380 \text{ m}^2$ dan jalan Suryakencana $\pm 1086,19 \text{ m}^2$.

9) Program Sukabumi KECE;

Program ini merupakan program pemberdayaan anak muda melalui pelatihan dan pendampingan wirausaha baru, sehingga terbentuk wira usaha baru dengan jenis bidang usaha tertentu.

10) Program Kredit Anyelir;

Program ini merupakan program bantuan permodalan yang terintegrasi dengan program Sukabumi Kece, diberikan kepada Wira Usaha Baru atau WUB yang telah dinyatakan lulus pelatihan.

11) Program *Little* Sukabumi;

Program *Little* Sukabumi merupakan program pusat layanan informasi, promosi, pusat belanja, dan display produk unggulan Daerah yang bersinergi dengan daerah lain yang berfungsi sebagai potensi pasar bagi produk unggulan Daerah.

Pada tahun 2022 Kota Sukabumi sudah melakukan Kerjasama (penandatanganan MoU) dengan Kota Depok dan Kota Tangerang sebagai pasar produk unggulan daerah.

12) Program Sukabumi *Creative Hub*;

Program Sukabumi *Creative Hub* merupakan program pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediakan studio foto, televisi, fashion, ruang ICT, galeri seni, serta bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio rekaman, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2022 rencana pembangunan Gedung SCH tidak dapat dilaksanakan karena mengandalkan anggaran dari Bantuan Keuangan

Provinsi, namun hal ini tidak menghambat kreatifitas anak-anak muda dalam menghasilkan karya. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan telah menghasilkan:

- 6 Subsektor Ekonomi Kreatif yang teraktifasi dan mengikuti pelatihan;
- 2 *Event*;
- *MoU*;

13) Program Pendidikan Vokasi;

Program pendidikan vokasi merupakan program pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu atau vokasi yang relevan dengan dunia kerja dan usaha.

Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa salah satu kualifikasi penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan vokasi, dimana kualifikasi pendidikan ini menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Dalam program ini dirancang untuk lebih dapat menyalurkan para calon tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi untuk dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di masa sekolah. Titik beratnya ada pada upaya pemerintah untuk mempertemukan para lulusan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Daya serap bagi para lulusan pendidikan vokasi ini didorong dengan mengadakan dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih intens berupa kegiatan-kegiatan bursa kerja.

Diharapkan dengan upaya dan banyaknya ruang komunikasi yang diciptakan maka para lulusan pendidikan vokasi lebih memiliki peluang untuk menemukan lapangan pekerjaannya. Serta di sisi lain perusahaan-perusahaan di Daerah ataupun di luar itu mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan SDM sesuai bidang yang mereka butuhkan.

14) Program Sukabumi *Artist Association*;

Program Sukabumi *Artist Association* merupakan program yang menjembatani seniman dengan pihak-pihak perusahaan agar karya-karya para seniman di Daerah bisa terpublikasikan, dikenali, dan dinikmati masyarakat yang tidak saja memiliki nilai estetis namun juga memiliki nilai bisnis. Program ini bersinergi dengan program Sukabumi Creative Hub dalam memfasilitasi para kreator untuk menghasilkan karyanya dan mempublikasikan kepada masyarakat.

15) Program Sukabumi *Participatory Responder* atau SUPER

Program ini merupakan sebuah aplikasi resmi milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan *e-LAPOR* yang menawarkan kemudahan bagi warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah baik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pengaduan atas pelayanan publik, pertanyaan, dan lain sebagainya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah tahun 2023 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.61
Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	876.196.581.489	849.913.746.988	91,63	92,35	91,28	98,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	251.741.771.729	247.559.644.192	98,34	76,25	71,81	94,18
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251.741.771.729	247.559.644.192	98,34	76,25	71,81	94,18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.416.931.179	167.969.358.637	97,99	100,00	97,99	97,99
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.238.550.750	79.504.035.755	99,08	100,00	99,10	99,10
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.889.800	59.889.800	60,01	15,00	0,15	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	26.400.000	26.360.000	99,85	90,00	90,00	100,00
			Predikat Kinerja			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	497.451.676.739	476.830.750.414	95,85	100,00	98,57	98,57
Dinas Kesehatan	497.451.676.739	476.830.750.414	95,85	100,00	98,57	98,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.460.863.013	401.350.957.375	97,31	100,00	95,83	95,83
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.859.053.295	69.532.416.123	88,17	100,00	97,00	97,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.217.581.856	2.069.579.456	93,33	100,00	100,00	100,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	370.356.000	367.962.560	99,35	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.543.822.575	3.509.834.900	99,04	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	102.177.748.665	101.460.424.829	98,41	69,96	68,02	97,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.759.097.195	13.536.674.504	98,38	90,00	70,59	78,43
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.676.876.004	5.806.911.126	98,81	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.136.249.800	2.100.847.150	98,34	99,50	99,50	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.620.278.900	6.572.979.005	99,29	54,00	54,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	7.437.390.150	7.279.844.046	97,88	47,00	47,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.663.206.500	4.591.054.013	98,45	20,00	20,00	100,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.404.772.000	3.381.031.050	99,30	86,22	86,22	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	58.132.387.100	57.861.123.915	99,53	82,85	82,85	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	50.000.000	100	40,00	40,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	297.491.016	279.960.020	94,11	80,00	80,00	100,00
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	1.179.346.570	1.171.875.310	99,39	99,12	99,12	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	140.285.970	140.225.400	99,95	98,90	98,90	100,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	405.225.000	398.478.500	98,34	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	545.035.600	545.015.600	100,00	98,90	98,90	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	88.800.000	88.155.810	99,27	98,90	98,90	100,00
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12.007.840.038	11.516.923.465	91,61	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.297.783.088	10.188.789.465	98,94	100,00	100,00	100,00
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.599.407.500	1.217.773.000	76,14	100,00	100,00	100,00
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	110.649.450	110.361.000	99,74	100,00	100,00	100,00
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.584.587.590	3.569.431.271	99,23	100,00	99,96	99,96

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.214.785.040	3.204.066.071	99,67	100,00	99,92	99,92
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	369.802.550	365.365.200	98,80	100,00	100,00	100,00

Predikat Kinerja

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dinas Sosial	8.053.610.158	7.804.697.507	94,84	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.572.572.448	4.489.351.930	98,18	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.283.577.200	2.238.227.200	98,01	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000	1.500.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	802.756.550	715.936.617	89,18	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	284.743.900	264.871.700	93,02	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	93.845.060	80.195.060	85,45	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.615.000	14.615.000	100	100,00	100,00	100,00

Predikat Kinerja

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja	3.881.256.980	3.712.725.276	91,24	83,75	83,75	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.354.407.080	3.327.947.876	99,21	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	429.700.000	288.490.000	67,14	80,00	80,00	100,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	28.000.000	27.937.500	99,78	80,00	80,00	100,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	69.149.900	68.349.900	98,84	75,00	75,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.843.982.235	7.583.539.916	93,01	87,14	87,14	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.292.954.375	6.214.185.894	98,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	169.269.700	165.210.222	97,60	40,00	40,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	524.883.860	521.171.500	99,29	85,00	85,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000	25.000.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	244.265.100	193.521.100	79,23	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.740.000	66.591.689	96,87	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	518.869.200	411.736.200	79,35	85,00	85,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	9.955.589.544	9.857.468.453	99,78	67,80	69,63	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.574.050.094	9.476.180.503	98,98	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	17.760.100	17.760.100	100	10,00	10,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	341.834.950	341.583.450	99,93	40,00	49,13	100,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.195.000	15.195.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	6.749.400	100	89,00	89,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup	31.202.248.952	30.995.077.965	112,16	78,13	75,00	96,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.440.868.602	25.273.323.588	99,34	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	167.286.250	167.286.250	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	167.587.300	167.471.117	99,93	48,50	48,50	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	435.477.500	430.558.300	98,87	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8.745.000	8.745.000	99,94	12,00	12,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.167.050	64.167.050	100	100,00	75,00	75,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	22.874.850	22.874.850	100	14,00	14,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	82.429.800	82.379.800	99,94	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.812.812.600	4.778.272.010	99,28	50,50	50,50	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.046.276.788	8.011.085.541	99,87	100,00	97,50	97,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA	7.556.618.038	7.521.636.291	99,54	100,00	87,50	87,50
II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	405.543.150	405.371.150	99,96	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	44.490.600	44.490.600	100	100,00	100,00	100,00
IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	30.250.000	30.212.500	99,88	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.375.000	9.375.000	100	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5.001.024.525	4.944.976.728	98,96	76,18	72,94	95,75
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA						
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA						
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	287.452.000	284.652.000	99,03	85,00	71,65	84,29
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.149.066.150	2.139.725.150	99,57	76,00	76,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.564.506.375	2.520.599.578	98,28790455	67,53	71,17	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Dinas Perhubungan	17.991.411.166	17.608.699.473	97,77	90,50	89,74	99,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.205.295.966	14.889.042.539	97,92	100,00	98,47	98,47
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.786.115.200	2.719.656.934	97,61	81,00	81,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.799.575.831	5.735.322.515	97,66	88,33	91,11	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.251.742.881	5.195.315.413	98,93	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	434.593.250	433.117.402	99,66	90,00	90,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	113.239.700	106.889.700	94,39	75,00	83,33	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	12.657.412.755	12.297.276.922	98,78	167,02	159,16	95,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.317.941.225	8.073.987.142	97,07	100,00	99,17	99,17
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.229.050	1.229.050	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	6.851.100	6.801.100	99,27	100,00	50,00	50,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	531.236.000	531.235.100	100	64,00	64,74	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81.400.000	80.100.000	98,4	19,00	14,05	73,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.718.755.380	3.603.924.530	96,91	86,15	86,15	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	464.500.000	463.500.000	99,78	700,00	700,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.416.402.958	5.326.247.584	98,13	100,00	95,40	95,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.232.485.573	4.163.793.516	98,38	100,00	97,63	97,63
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	657.909.885	649.100.168	98,66	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	72.664.600	71.164.600	97,94	100,00	83,33	83,33
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	89.192.900	85.539.300	95,90	100,00	91,42	91,42
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000	347.200.000	97,89	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.450.000	9.450.000	100	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.774.617.552	14.634.327.993	98,95	100,00	98,95	98,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.177.539.052	6.058.102.206	98,07	100,00	99,85	99,85
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	906.225.000	896.627.072	98,94	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.690.853.500	7.679.598.715	99,85	100,00	97,00	97,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
Dinas Komunikasi dan Informatika	29.658.000	29.658.000	100,00	60,00	68,75	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.658.000	29.658.000	100	60,00	68,75	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108.962.850	108.132.850	99	60,00	60,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108.962.850	108.132.850	99,24	60,00	60,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	328.439.950	306.326.150	95,62	89,50	88,28	98,64
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	57.549.450	57.509.450	99,93	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	140.358.700	120.358.700	85,75	100,00	95,14	95,14
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	65.531.800	65.500.000	99,95	78,00	78,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65.000.000	62.958.000	96,85	80,00	80,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.954.557.878	4.925.321.457	99,57	66,00	66,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.567.991.898	4.539.668.085	99,38	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	386.565.980	385.653.372	99,76	32,00	32,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	140.701.750	132.701.650	94,31	64,00	64,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	140.701.750	132.701.650	94,31	64,00	64,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9.917.830.978	9.683.102.371	97,91	80,87	76,20	93,72
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	641.189.350	638.915.150	99,79	33,57	28,39	84,57
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	570.764.650	568.505.150	99,60	25,67	25,67	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	70.424.700	70.410.000	99,98	42,31	31,11	73,53
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.603.103.000	1.596.295.385	99,76	96,25	96,25	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	714.320.000	707.597.401	99,06	85,00	85,00	100,00
Program Pemasaran Pariwisata	116.835.500	116.835.500	100	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	66.947.500	66.942.500	99,99	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	705.000.000	704.919.984	99,99	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.627.667.228	2.603.016.936	99,45	65,40	66,52	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.346.347.750	1.330.788.448	98,84	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	804.769.913	797.983.008	99,16	40,00	45,60	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	307.584.965	305.280.880	99,25	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.629.750	8.629.750	100	80,00	80,00	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160.334.850	160.334.850	100	7,00	7,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.575.518.300	2.510.500.300	90,66	100,00	95,22	95,22
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.474.330.050	2.414.277.350	97,57	100,00	100,00	100,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.263.750	3.652.750	85,67	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	10.800.000	8.879.000	82,21	100,00	100,00	100,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	86.124.500	83.691.200	97,17	100,00	80,89	80,89

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
			Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.434.253.600	2.298.373.600	98,05	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.327.795.000	2.191.915.000	94,16	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	48.432.000	48.432.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	58.026.600	58.026.600	100	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
Dinas Tenaga Kerja	36.099.500	36.001.000	100	90	90	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	36.099.500	36.001.000	99,73	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Sekretariat Daerah	57.236.235.624	55.650.358.900	97,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.059.735.044	38.234.099.544	97,89	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.550.408.940	16.806.725.734	95,76	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	626.091.640	609.533.622	97,36	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Sekretariat DPRD	60.077.987.238	56.881.932.813	95,98	100,00	97,15	97,15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.523.811.588	39.483.226.037	92,85	100,00	100,00	100,00
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	17.554.175.650	17.398.706.776	99,11	100,00	94,29	94,29
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.881.084.025	14.382.277.124	97,95	93,33	93,33	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.203.794.925	9.747.527.470	95,53	80,00	80,00	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.950.711.950	1.943.239.849	99,62	100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.726.577.150	2.691.509.805	98,71	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
KEUANGAN	57.244.122.977	54.977.295.050	95	100	98	98
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	57.244.122.977	54.977.295.050	94,83	100,00	97,50	97,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.118.097.918	40.184.558.203	95,41	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.788.136.709	9.713.704.225	99,24	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.498.968.850	1.287.788.703	85,91	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.838.919.500	3.791.243.919	98,76	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
KEPEGAWAIAN	7.454.019.586	7.269.134.851	96	100	93	93
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.454.019.586	7.269.134.851	95,95	100,00	92,91	92,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.922.989.736	5.805.149.376	98,01	100,00	98,72	98,72
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	575.027.150	529.551.080	92,09	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	956.002.700	934.434.395	97,74	90,00	90,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.209.698.400	1.202.749.680	99	33	33	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.209.698.400	1.202.749.680	99	33	33	100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.209.698.400	1.202.749.680	99,43	32,50	32,50	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.128.251.773	9.064.045.820	100	77	99	100
INSPEKTORAT DAERAH						
Inspektorat Daerah	9.128.251.773	9.064.045.820	99,61	76,67	99,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.726.902.918	7.667.330.537	99,23	70,00	70,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	256.395.000	256.220.165	99,93	70,00	60,00	85,71
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	367.385.500	366.176.996	99,67	3	3,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR KEWILAYAHAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99	96	96	100
KECAMATAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99	96	96	100
Kecamatan Cikole	12.511.893.818	12.407.281.276	99,61	100,00	99,70	99,70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.255.815.868	8.160.176.400	98,84	100,00	98,81	98,81
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1.884.580.500	1.884.477.643	99,99	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.300.333.850	2.291.463.633	99,61	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.163.600	71.163.600	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Gunung Puyuh	9.785.452.579	9.572.300.674	99,18	100,00	99,71	99,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.674.128.229	6.467.502.257	96,90	100,00	99,74	99,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.453.042.100	1.452.969.100	99,99	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.576.048.250	1.570.016.517	99,62	100,00	99,42	99,42

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.844.000	66.422.800	99,37	100,00	99,37	99,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.390.000	15.390.000	100,00	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
Kecamatan Citamiang	10.378.608.685	10.236.432.626	99,49	100,00	99,42	99,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.470.494.635	7.332.644.461	98,15	100,00	97,11	97,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.226.365.950	1.226.102.447	99,98	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.625.799.900	1.621.769.120	99,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.718.200	54.691.598	99,95	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.230.000	1.225.000	99,59	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
Kecamatan Warudoyong	10.914.648.303	10.792.170.135	99,13	75,00	75,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.306.781.653	7.202.982.066	98,58	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.608.654.950	1.606.260.648	99,85	85,00	85,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.894.926.500	1.879.614.223	99,19	40,00	40,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.597.200	48.625.198	98,04	60,00	60,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.688.000	54.688.000	100,00	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi
Kecamatan Baros	8.258.347.594	8.108.041.482	98,37	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.770.659.844	5.631.238.790	97,58	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.177.172.350	1.175.974.900	99,90	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.251.454.550	1.243.845.712	99,39	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.559.050	39.483.230	95,01	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.501.800	17.498.850	99,98	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja			Sangat Tinggi
Kecamatan Lembursitu	10.029.232.742	9.916.113.828	99,20	100,00	99,93	99,93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.864.193.060	6.758.893.156	98,47	100,00	99,64	99,64
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.688.750	1.459.648.850	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.643.329.332	1.636.340.885	99,57	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.921.600	47.210.937	98,52	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.100.000	14.020.000	99,43	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja			Sangat Tinggi
Kecamatan Cibeureum	9.208.765.969	9.077.855.804	98,47	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.581.848.994	6.457.336.335	98,11	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.812.500	31.812.500	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.184.889.275	1.184.863.950	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.365.703.200	1.361.763.613	99,71	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.512.000	42.079.406	94,53	100,00	100,00	100,00
			Predikat Kinerja			Sangat Tinggi
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.705.161.706	3.631.965.433	98,02	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	919.206.183	884.195.633	96,19	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	859.104.039	857.189.039	99,78	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	746.829.100	681.829.100	91,30	100,00	89,74	89,74
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	351.800.000	351.800.000	100,00	100,00	100,00	74,90
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.983.275.400	14.953.025.400	99,80	100,00	94,12	94,12
			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Penilaian rata-rata capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diklasifikasikan dengan kriteria, sebagai berikut:

Tabel 2.62
Skala Nilai Peringkat Kinerja

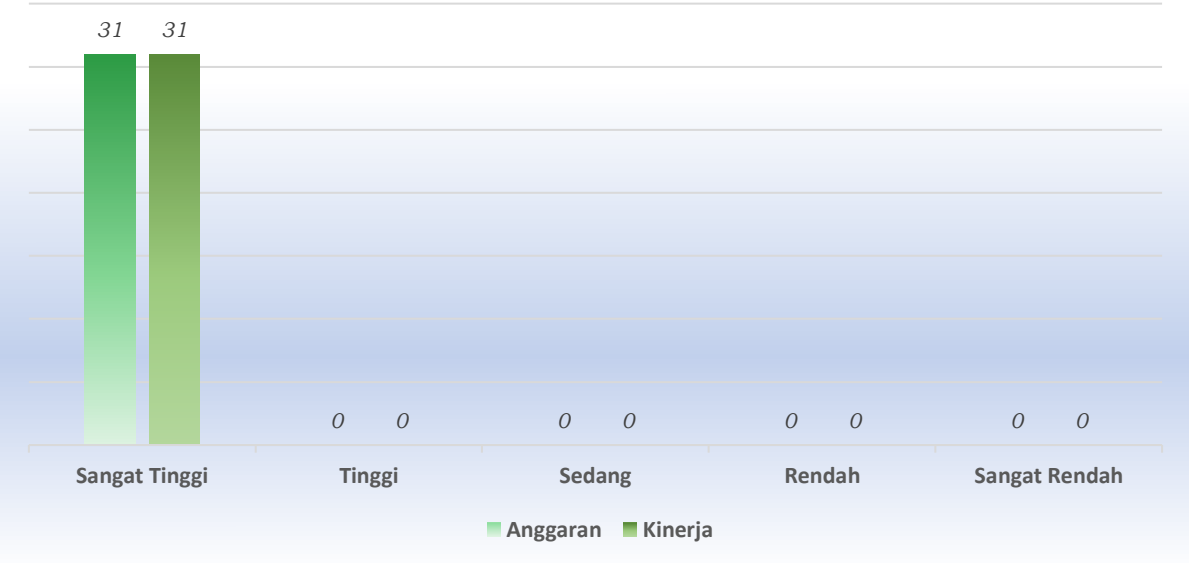
Interval Nilai	Kriteria
91 ≤ 100	Sangat Tinggi
76 ≤ 90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Secara umum capaian realisasi anggaran dan kinerja masing- masing perangkat daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata perangkat daerah masuk dalam kriteria sangat tinggi dalam hal penyerapan anggaran maupun kinerjanya, dan tidak ada perangkat daerah yang masuk dalam kriteria sedang atau lebih rendah dari itu. Jumlah

Perangkat Daerah di Kota Sukabumi berdasarkan kriteria capaian anggaran dan kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.23
Jumlah Perangkat Daerah
Berdasarkan Kriteria Capaian Anggaran dan Kinerja Tahun 2023



Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Dalam hal penyerapan anggaran, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan mencapai 90,66% termasuk kriteria **Tinggi**. Sementara untuk capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan capaian 84,57% termasuk kriteria **Tinggi**. Secara umum, realisasi anggaran dan capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah termasuk kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel 2.63
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2024
Triwulan I

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.898.252.700	13.241.293.166	15,60	100	80	80,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.889.800	0	0,00	0.20	0.00	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.000.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	30.000.000	0	0,00	75		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	97.889.200	71.399.200	72,94	13		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	120.677.000	0	0,00	55		0,00
PROGRAM PEMBINAAN Sejarah	16.000.000	0	0,00	60		0,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya	35.000.000	0	0,00	76		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN Permuseum	65.625.000	0	0,00	55		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.667.404.643	35.006.702.858	20,16	100		0,00

Dinas Kesehatan						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	69.721.229.996	5.068.251.889	7,27	98,5	101,14	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.562.181.906	0	0,00	100	33	33,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	524.031.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.681.508.132	61.491.000	2,29	100	33	33,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	421.076.237.542	100.963.760.823	23,98	100	37	37,00

Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.460.427.000	1.033.738.000	12,22	57,37	57,34	99,95
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.577.766.310	194.421.480	5,43	100	100	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.028.889.000	195.181.230	4,84	57,95	57,95	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.043.700.000	162.458.300	4,02	42,46	42,13	99,22
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.141.034.200	444.500.361	10,73	9,38	9,38	100,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.079.772.000	1.232.409.000	40,02	78,95	78,95	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.257.809.015	1.172.760.941	8,23	85,15	84,54	99,28

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	97.500.000	0	0,00	38,01	29,24	76,93
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	693.999.080	12.775.800	1,84	70		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	476.000.000	122.997.500	25,84	100		0,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.308.000.000	69.545.000	1,61	10		0,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.050.000.000	20.340.000	1,94	1,36	1,53	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	351.360.000	0	0,00	11,38	9,76	85,76
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	30.000.000	811.000	2,70	70		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.544.528.085	4.341.272.307	27,93	100	27,41	27,41

Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran						
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.087.424.500	470.740.000	15,25	100	100	100,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	175.999.250	50.720.000	28,82	100	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.494.483.912	2.869.305.606	27,34	100	39,00	39,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.319.950.700	128.055.000	3,86	0,55		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.610.312.309	1.050.355.241	29,09	100	25	25,00

Dinas Sosial						
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.116.090.000	228.125.000	20,44	25	10	40,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	387.876.000	36.840.000	9,50	100	11,53	11,53
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	599.458.850	75.390.000	12,58	100	0,02	0,02
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	338.070.420	55.300.000	16,36	100	25,15	25,15
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.915.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.927.645.731	1.197.546.437	24,30	100	30,30	30,30

Dinas Tenaga Kerja						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.702.300.139	945.937.333	25,55			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.000.000		0,00			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	440.000.000	430.000	0,10			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30.000.000	2.023.000	6,74			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	75.149.800	30.301.900	40,32			
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	87.000.000	2.850.000	3,28			

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	94.350.000	4.900.000	5,19	79		0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	183.917.050	25.982.000	14,13	0,01		0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	451.097.510	85.676.102	18,99	72,5	100	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.999.900	18.599.900	74,40	2	1	50,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	74.089.750	6.528.150	8,81	2	2	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	389.179.200	56.257.000	14,46	0,03		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	282.290.000	69.044.400	24,46	12,5	53,85	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.045.514.613	288.161.000	9,46	65	100	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.106.853.500	15.883.750	0,75	62	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.869.696.434	2.029.535.237	34,58	100	35	35,00

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	5.680.000	0	0,00	25	25	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.157.278.700	58.985.000	1,87	22	75	100,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113.650.000	1.950.000	1,72	90	23,53	26,14
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.195.000	15.195.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	6.749.400	100	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	1.170.000	17,33	89		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	474.991.150	66.743.150	14,05	25,87	26	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	59.020.000	1.750.000	2,97	110	25	22,73
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	708.724.500	182.687.500	25,78	5902,7	1534,0	25,99
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	561.956.000	80.370.320	14,30	100	100	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	195.852.380	32.453.380	16,57	100	100	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.629.500	7.380.000	85,52	30	30,28	100,00

Dinas Lingkungan Hidup						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	314.195.550	0	0,00	100		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.637.489.400	69.208.036	4,23	0		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	237.703.450	11.035.000	4,64	25.50		25,50
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.980.000	21.025.000	87,68	100	20	20,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	41.263.100	8.400.000	20,36	100	17,5	17,50
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.500.000	1.593.000	3,66	33		0,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	21.731.100	8.100.000	37,27	25		0,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	54.483.650	5.316.900	9,76	100	55,56	55,56
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.409.538.686	266.855.050	2,84	99	25	25,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.634.601.681	6.827.196.502	25,63	100	49	49,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	300.665.600	113.120.000	37,62	100	100	100,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.265.500	40.975.000	56,70	100	100	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	126.722.000	21.259.000	16,78	100	100	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.850.000	650.000	7,34	100	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.116.923.883	1.983.300.611	32,42	100	100	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7

Dinas Komunikasi dan Informatika						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	481.674.250	247.434.750	51,37	90		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	373.239.000	40.728.000	10,91	93		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.658.000	0	0,00	60		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.041.450	10.573.750	8,46	77		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.616.104.731	1.431.853.749	25,50	80	29,69	37,11

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan						
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	19.000.000	17.600.000	92,63	11,33		0,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	35.010.000	12.180.000	34,79	6,8		0,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.000.000	0	0,00	64		0,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	203.704.250	0	0,00	19,83		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81.400.000	0	0,00	19,83		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.066.717.450	83.280.689	4,03	0,01		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350.000.000	0	0,00	0,47		0,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.250.000	4.090.000	11,60	100		0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.315.501.150	106.548.250	8,10	60		0,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.050.500	4.745.000	5,93	5,88		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	47.790.000	0	0,00	0		0,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	130.980.000	32.693.350	24,96	28,57		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	75.470.000	0	0,00	100		0,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.084.516.000	69.193.000	6,38	3,55		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	56.392.000	2.384.000	4,23	100		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	616.246.000	381.293.500	61,87	100		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.432.767.872	2.123.117.648	25,18	100		0,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64.999.950	32.565.900	50,10	10	10	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	463.488.150	73.101.000	15,77	80		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	628.116.450		0,00	10		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	109.688.500	33.759.441	30,78	100		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.094.632.865	1.614.127.106	31,68	90		0,00

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	906.225.000	441.474.500	48,72	80		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.560.176.700	1.653.938.505	64,60	18		0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.788.779.000	66.730.250	1,76	20		0,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	161.835.500	23.785.500	14,70	4		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	66.947.500	1.572.500	2,35	16		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	266.712.500	12.230.000	4,59	150		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.356.500.582	1.570.759.647	24,71	100		0,00

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.954.557.878	4.925.321.457	99,57	66,00	66,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.808.712.700	109.006.650	2,27	72		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	126.541.150	27.255.200	21,54	63,5	9,38	14,77
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	28.500.000	16.405.000	57,56	66,8		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.168.810.724	1.456.545.207	28,18	100		0,00

Sekretariat Daerah						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.764.343.219	1.342.863.268	10,52	100	25	25,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	541.978.000	165.886.544	30,61	100	25	25,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.560.092.471	10.380.747.725	29,19	100	25	25,00

Sekretariat DPRD	60.077.987.238	56.881.932.813	95,98	100,00	97,15	97,15
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.258.439.450	5.942.500.726	30,86	100	27	27,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.179.897.643	10.653.807.877	29,45	100	30	30,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.276.582.850	996.053.158	43,75	100		0,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.259.757.900	481.495.693	11,30	100		0,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	969.797.000	76.651.650	7,90	100		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.762.653.123	2.514.234.440	25,75	100		0,00
Inspektorat Daerah	9.128.251.773	9.064.045.820	99,61	76,67	99,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	648.320.000	99.047.900	15,28	78	96,15	100,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	692.638.000	19.650.000	2,84	3,21		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.386.996.934	2.036.868.297	24,29	90	25,56	28,40
Dinas Perhubungan						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.926.813.227	548.852.983	13,98	100	22	22,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.312.680.966	4.457.243.602	27,32	100	28	28,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.887.625.070	1.123.858.267	28,91			0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.145.118.407	7.255.349.869	19,02			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.899.365.379	3.168.967.843	24,57			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.440.257.350	250.477.560	17,39			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.845.035.080	1.099.478.853	28,59			
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusaia						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	470.545.495	40.722.650	8,65			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.075.321.084	80.540.850	7,49			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7

Kecamatan Cikole						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.845.192.200	13.205.740	0,72	100	25	25,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.784.060.600	480.030.000	17,24	100	35	35,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.024.700	24.928.600	35,10	100	100	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.349.550	3.259.600	21,24	100	100	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.349.501.410	2.355.872.217	25,20	100	15	15,00

Kecamatan Gunung Puyuh						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.417.679.900	10.175.600	0,72	100	25	25,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.841.671.350	322.767.200	17,53	100	33,33	33,33
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.314.950	24.246.400	36,56	100	25	25,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.500.000		0,00	100	25	25,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.989.923.487	1.895.303.457	27,11	100	25	25,00

Kecamatan Citamiang						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.234.594.500	74.149.750	6,01	97	25,77	26,57
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.066.046.050	364.192.100	17,63	100	36	36,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.258.350	11.070.000	23,93	100	25	25,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.499.950		0,00	100		0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.159.351.981	2.137.548.518	26,20	100	39	39,00

Kecamatan Warudoyong						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.581.550.400	45.271.200	2,86	88	39,77	45,19
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.284.278.980	368.642.600	16,14	100	43	43,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.873.150	15.508.950	33,81	100	38	38,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.774.000	14.890.000	29,92	1	37	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.368.138.049	2.308.973.304	27,59			0,00

Kecamatan Baros						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.148.412.850	45.567.050	3,97	100	51	51,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.547.548.750	291.963.300	18,87	100		0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.532.950	15.082.950	22,67	100		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.616.400	4.585.300	23,37	100	16	16,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.302.973.891	1.567.569.627	24,87	100	17	17,00

Kecamatan Lembursitu						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.018.500	7.711.200	0,53	100	25	25,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.941.108.323	311.766.100	16,06	100	33,33	33,33
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.121.600	7.927.200	17,19	100	25	25,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.370.000	1.350.000	10,10	100	25	25,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.617.278.019	2.029.373.810	26,64	100	25	25,00

Kecamatan Cibeureum						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.216.914.275	48.357.475	3,97	80	93,75	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.667.417.200	211.599.200	12,69	31	32,26	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.286.400	21.647.600	51,19	75	133,33	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.221.875	1.894.375	6,27	100	17	17,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.251.042.664	1.817.425.622	25,06	100	47	47,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	810.136.948	69.974.500	8,64	100	54	54,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	864.579.239	90.819.258	10,50	100	50	50,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	669.637.250	421.600.000	62,96	100	58	58,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	378.959.500	58.342.500	15,40	100	28	28,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	25.904.300.300	299.245.000	1,16	100	24	24,00

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan kinerja hingga triwulan I tahun 2023 belum ada yang mencapai target karena masih banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor, misalnya karena belum waktunya dilaksanakan atau masih dalam tahapan persiapan. Dalam kerangka acuan kerja masing-masing subkegiatan di perangkat daerah rata-rata capaian kinerja baru dapat terlihat di awal triwulan III.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang diencanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari pendayagunaan kekuatan yang belum optimal serta kelemahan yang belum teratasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama/permasalahan daerah yang harus diselesaikan Kepala Daerah serta seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik geografi di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Alih fungsi lahan yang massif untuk permukiman; (2) Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau; (3) Pengelolaan kawasan lindung yang belum optimal; (4) Sistem pangan yang belum optimal (5) Risiko bencana terutama gempa bumi, banjir, dan tanah longsor cukup besar.

Permasalahan demografi berdasarkan kondisi umum daerah dan proyeksi yang telah dilakukan di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi yang seharusnya

lebih menekankan pada konfigurasi tingkat pendidikan penduduk; (2) Kontribusi perempuan dalam pembangunan belum optimal; (3) Belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi baik sektor publik maupun swasta serta pemberdayaan yang inklusif; dan (4) Keberlangsungan kehidupan masyarakat adat ditengah arus globalisasi yang belum sepenuhnya tertangani.

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Sukabumi antara lain: (1) Adanya kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat; (2) Pertumbuhan ekonomi masih cenderung stagnan dan berada dibawah angka Jawa Barat; (3) Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal; (4) Terbatasnya lapangan kerja menyebabkan TPT masih tinggi; dan (5) IPM skala kota masih cukup rendah dibanding kota lain di Jawa Barat.

2.3.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berdasarkan kondisi umum di Kota Sukabumi antara lain: (1) Belum merata dan tercukupinya SDM Kesehatan serta penanganan ketahanan kesehatan; (2) Belum optimalnya pemberian pelayanan sosial; (3) Minimnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial; (4) Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (5) Rendahnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga; (6) Kurangnya minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional; (7) Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat; dan (8) Masih tingginya kenakalan remaja.

2.3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1.3.1 Daya Saing Ekonomi

Permasalahan daya saing ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Belum optimalnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital; (2) Kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan; (3) Belum optimalnya pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar; (4) Belum optimalnya ekosistem wirausaha; (5) Masih rendahnya IKM produktif; (6) Proses perizinan usaha yang dianggap masih berbelit dan mahal; (7) Inklusivitas pembangunan ekonomi; dan (8) Penguatan ekosistem ekonomi digital.

2.3.1.3.2 Daya Saing SDM

Permasalahan daya saing SDM di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Kualitas dan kuantitas pendidikan yang masih rendah; (2) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kerja masyarakat; (3) Kurang optimalnya pengembangan *softskill*; (4) Kurangnya literasi digital masyarakat; (5) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah; (6) Belum optimalnya pendidikan karakter masyarakat.

2.3.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi umum daerah, antara lain: (1) Konektivitas antar wilayah masih belum memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (2) Masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur; dan (3) Belum optimalnya penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan.

2.3.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Sukabumi, diantaranya: (1) Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi UMKM; (2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; (3) Masih adanya pelanggaran PERDA; dan (4) Konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi Daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi yang dipengaruhi faktor internal dan variabel eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun global. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting. Memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Hasil kajian dan analisis berkenaan dengan rancangan kerangka ekonomi Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan pada proses perencanaan hingga menjadi penganggaran sampai nanti dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2023 dan awal Tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2024 dan 2025. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan

berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Pada Tahun 2024, kondisi kesehatan masyarakat akibat adanya Pandemi *Covid-19* diprediksi akan semakin membaik sehingga perekonomian nasional dan global termasuk Kota Sukabumi diperkirakan mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi ekonomi ini seiring dengan semakin menurunnya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif *Covid-19* serta semakin massifnya pelaksanaan Vaksinasi oleh pemerintah dan sekarang sudah pada tahap vaksinasi ketiga (Booster) serta vaksinasi pada usia sekolah dasar. Selain itu optimisme didapatkan setelah melihat fakta bahwa semakin meningkatnya aktivitas di beberapa sektor usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur berbasis padat karya dan digitalisasi perdagangan.

Kota Sukabumi dianugerahi wilayah yang sejuk dengan segenap infrastruktur kota yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Namun, seperti karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas yang terbatas, dengan luas wilayah berupa daratan seluas 48,31 Km², serta jumlah penduduk Tahun 2023 sebanyak 360.644 jiwa, kepadatan penduduk 7.465 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Jumlah penduduk, Luas wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang cukup padat menjadi masalah tersendiri dalam pengembangan potensi ekonomi di Kota Sukabumi.

Namun demikian, letak geografis Kota Sukabumi yang cukup strategis di antara dua pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu wilayah Bandung Raya dan wilayah megapolitan Jakarta, menciptakan suatu peluang yang dapat dikembangkan sebagai modal dasar dalam menggerakkan roda perekonomian. Posisi geografis tersebut memberikan keunggulan potensial dalam segi arus lintas barang dan jasa. Seyogyanya pengembangan ekonomi di Kota Sukabumi mengarah pada pendayagunaan potensi sosio-geografis yang dimilikinya.

Berdasarkan kondisi diatas, maka Arah Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 telah dirumuskan melalui 3 (tiga) Prioritas Pembangunan, meliputi:

1. Peningkatan Kondusifitas Kota meliputi:
 - a. Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan
 - b. Pembangunan Insfrastruktur yang berkualitas
 - c. Penguatan Kondisi sosial
 - d. Menjaga Stabilitas kemandirian dan ketertiban
2. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa:
 - a. Revitalisasi Pariwisata
 - b. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penguatan budaya kreatif dan inovatif melalui peningkatan inovasi pelayanan publik dalam kerangka *smart city*

Dari 3 (tiga) Prioritas Pembangunan tersebut, dua diantaranya, optimalisasi sektor perdagangan dan jasa berhubungan langsung dengan bidang ekonomi. Secara keseluruhan 3 (tiga) prioritas pembangunan tersebut mendukung kepada upaya upaya mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta mewujudkan pengembangan sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi. Di sini jelas bahwa Kota Sukabumi telah menetapkan arah pengembangan bidang ekonominya ke sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, sektor perdagangan, sektor-sektor jasa lainnya yang memiliki daya saing tinggi, sebagaimana telah ditetapkan dalam arah perencanaan jangka panjang RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025.

3.1.1 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam World Economic Outlook (WEO) Bulan Oktober 2022, lembaga keuangan dunia yaitu International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,2 persen, atau turun signifikan 1,2 persen dari proyeksi di Januari 2022 sebesar 4,4 persen. Sedangkan tahun 2023 WEO memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat

(AS) diperkirakan turun oleh WEO IMF menjadi sebesar 1,6 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah 3,2 persen di tahun 2022, dan 4,4 persen di tahun 2023; Jepang diproyeksikan tumbuh 1,7 persen di tahun 2022, dan 1,6 persen di tahun 2023; dan negara Zona Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1 persen di tahun 2022 dan 0,5 persen di tahun 2023. Sedangkan untuk negara-negara berkembang seperti India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 6,8 persen di tahun 2022 dan 6,1 persen di tahun 2023, termasuk juga pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN diperkirakan berada dalam tren meningkat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, tantangan ekonomi lain yang perlu diwaspadai danantisipasi yaitu masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat TheFed dikarenakan inflasi yang tinggi. Perang Rusia –Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar,sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan.

Harga komoditas energi seperti gas alam dan batu bara masih persisten tinggi sejak perang di Ukraina, sedangkan harga minyak mentah turun setelah pengumuman supply cut oleh *Organization of The Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Harga komoditas pangan seperti kedelai dan jagung kembali naik karena faktor cuaca dan geopolitik, serta harga Crude Palm Oil (CPO) sedikit kembali naik sedangkan harga gandum turun. Kenaikan pada harga komoditas pangan dan energi memicu tekanan inflasi di banyak negara yang kemudian mendorong pengetatan kebijakan moneter.

Peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi seperti inflasi yang sangat tinggi dan kenaikan suku bunga. Tingginya

inflasi di banyak negara saat ini disebabkan oleh minimnya suplai barang untuk mencukupi jumlah permintaan yang meningkat, terlebih di tengah perang Rusia-Ukraina. Disrupsi yang ditimbulkan Perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan suplai bahan makanan secara global. Akibatnya, perang tersebut memicu lonjakan harga barang dan energi yang semakin menipis serta mendorong inflasi terus naik.

Guna menahan laju inflasi, bank sentral perlu menaikkan tingkat suku bunga sehingga pinjaman dan kemauan belanja dari masyarakat berkurang. Pengurangan tersebut akan mengurangi laju permintaan dari masyarakat sehingga inflasi semakin terkendali. Kenaikan suku bunga di berbagai negara dinilai cukup agresif untuk menahan laju inflasi. Meski dapat menekan inflasi, kenaikan suku bunga di berbagai negara secara signifikan tidak otomatis mencegah terjadinya resesi ekonomi global.

Tingkat inflasi di Amerika Serikat pada September 2022 sebesar 8,2 persen kemudian diikuti kenaikan tingkat acuan suku bunga sebesar 3,25 persen, inflasi negara Inggris bulan September 2022 sebesar 10,1 persen yang direspon dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan sebesar 2,25 persen, India dengan inflasi sebesar 7,4 persen di Bulan September 2022, menaikkan suku bunga acuannya sebesar 5,90 persen, dan Indonesia dengan inflasi Bulan Oktober 2022 sebesar 5,95 persen menaikkan suku bunga acuannya sebesar 4,75 persen. Proyeksi inflasi global oleh WEO IMF tahun 2022 akan naik sebesar 8,8 persen dan tahun 2023 sebesar 6,5 persen. Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini harus kita waspadai khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN/APBD maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.

Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah apakah segera mengembalikan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul

pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980 an dan 1990 an.

Saat ini, negara-negara di seluruh dunia tengah berjuang untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Ada tiga kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertama, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dalam sektor-sektor potensial seperti sektor digital melalui pembangunan kapasitas dan keterampilan yang relevan. Kedua, adalah mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, menciptakan ekosistem untuk bumi yang layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan dan transisi energi yang adil dan terjangkau.

Kendati demikian, Indonesia perlu waspada lantaran jumlah penduduk yang jauh lebih besar, terutama periode tahun 2020-2030, dimana Indonesia ingin keluar dari *middle income trap*. Ini menjadi tantangan bagi generasi muda sehingga perlu meningkatkan produktivitasnya, salah satunya dengan terlibat aktif dalam menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 4,3 persen dan 4,7 persen.

Tantangan ekonomi nasional antara lain dampak dari konflik di Ukraina, meningkatnya kembali kasus dan varian baru COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan peningkatan tekanan sosial akibat kenaikan harga pangan dan energi.

3.1.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2023 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Arah kebijakan ekonomi Jawa Barat

mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2024 maupun perkiraan tahun 2025, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Nasional untuk Provinsi Jawa Barat.

Sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, Nasional pada tahun 2023. Sementara di sektor lapangan usaha industri pengolahan, Jawa Barat memberikan kontribusi 28,26 persen terhadap PDB ADHB sektor Industri Pengolahan nasional. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Jawa Barat memiliki tingkat dan arah pertumbuhan yang berada di sekitar Tingkat pertumbuhan nasional. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada perekonomian Jawa Barat memberikan kontribusi 16,77 persen dari PDB ADHB Dinamika pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 cenderung stabil di kisaran 5 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara positif bertahan hingga triwulan I dan II tahun 2023, meskipun terdapat penurunan capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan III (4,6 persen), capaian pertumbuhan di tingkat 5 persen kembali dicapai pada triwulan IV-2023, hal ini menunjukkan tren positif yang berkelanjutan.

Pada triwulan I tahun 2023, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,04 persen (y-o-y), yang mengindikasikan adanya pertumbuhan yang sehat selama satu tahun. Kemudian pertumbuhan terjadi lebih tinggi ke Tingkat 5,17 persen (y-o-y) pada triwulan II menunjukkan pertumbuhan yang terus berlanjut. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya yang berada di kisaran 5,5 persen (y-o-y). Kondisi perekonomian yang cukup menantang ini dikonfirmasi oleh pertumbuhan antar triwulan yang mayoritas lebih rendah daripada triwulan sebelumnya, selama Tahun 2022-2023. Penurunan ini terjadi pada triwulan III 2022-triwulan I 2023, dan dilanjutkan hingga triwulan III-2023 setelah adanya perbaikan pada triwulan II- 2023. Capaian pertumbuhan kemudian membaik pada triwulan IV-2023 sebesar 5,2 persen (y-o-y), seiring dengan berakhirnya El Nino dan peak season Natal dan tahun baru.

Pada triwulan I dan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di tingkat 5 persen (y-o-y) didorong oleh faktor dalam negeri seperti peningkatan permintaan domestik, mobilitas masyarakat, percepatan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur, serta perpanjangan subsidi

bunga KUR dan program perlindungan sosial. Momentum pertumbuhan yang menguat juga didukung peak season selama Idul Fitri dan Idul Adha, serta libur sekolah.

Pertumbuhan ekonomi yang menantang pada triwulan III tahun 2023, tidak terlepas dari penurunan permintaan negara mitra dagang yang masih menghadapi ketidakpastian, terutama akibat peningkatan tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina yang juga menjalar ke berbagai negara. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat akibat ketidakpastian keuangan global dan pengetatan moneter, juga dinilai menjadi penyebab menurunnya performa industri pengolahan sebagai sektor utama perekonomian Jawa Barat. Faktor musiman juga menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III, dimana dampak El-Nino terasa pada hasil pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang terbatas.

Perbaikan mulai terlihat pada triwulan IV seiring dengan berakhirnya krisis produksi sektor pertanian akibat El Nino, serta peak season selama natal dan tahun baru. Kondisi yang membaik ini terjadi di seluruh sektor lapangan usaha, dimana tidak ada sektor yang tumbuh negatif secara year-on-year, berbeda dengan triwulan III dimana sektor pertanian, administrasi pemerintahan, pengadaan listrik, dan pengadaan air tumbuh negatif.

Adapun kondisi perekonomian global yang mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Barat selama tahun 2023 adalah adanya pemulihan ekonomi yang terlihat dari meredanya tekanan inflasi di berbagai negara, stabilitas harga energi, dan terjaganya tingkat permintaan global. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi year-on-year yang stabil di beberapa negara mitra dagang terbesar Jawa Barat pada triwulan I-2023, seperti Amerika Serikat (1,6 persen), Tiongkok (4,5 persen), dan Jepang (1,3 persen). Pada triwulan II-2023, pemulihan ekonomi semakin terasa seiring dengan pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO, sehingga rantai pasok global, biaya, dan waktu pengiriman kembali ke level sebelum pandemi. Pada triwulan II-2023.

Pertumbuhan ekonomi year-on-year negara mitra dagang terbesar Jawa Barat juga mengalami peningkatan, seperti Amerika Serikat (2,6 persen), Tiongkok (6,3 persen), dan Jepang (2,0 persen).

Sementara itu pertumbuhan global diproyeksikan turun menjadi 3,0 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral untuk melawan inflasi terus membebani aktivitas perekonomian. Inflasi umum global diperkirakan akan turun menjadi 6,8 persen pada tahun 2023 dan 5,2 persen pada tahun 2024, kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan performa ekspor Jawa Barat.

3.1.3 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kota Sukabumi

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15,35 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9,80 triliun rupiah. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,90 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dari sisi lapangan usaha disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dengan andil sebesar 1,54 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,98 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu sebesar 37,59 persen. Dari sisi pengeluaran, peranan terbesar disumbangkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 81,49 persen.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara

lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen sepanjang tahun 2023. Geliat positif dalam perekonomian terjadi pada seluruh kategori perekonomian di Kota Sukabumi. Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu kategori C (Industri Pengolahan), F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Kategori G memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebanyak 38 persen. Kelima kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 71,97 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2023. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 yaitu mencapai 9,08 persen. Kemudian diikuti oleh Kategori M,N (Jasa Perusahaan) sebesar 8,04 persen, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 7,81 persen, Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 7,71 persen serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 7,17 persen.

Masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid 19 tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2021 yang sebesar 3,71 persen. Geliat perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 terjadi secara signifikan, terbukti dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,35 persen. Berbagai program pemulihan ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah tercermin hasilnya pada pertumbuhan positif di hampir seluruh lapangan usaha. Di tahun 2023 perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan kecepatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,12 persen. Lapangan Usaha dengan laju pertumbuhan dominan, tampak berbeda antar tahun. Jika di tahun 2021, lapangan usaha M,N (Jasa Perusahaan)

tampil mendominasi, maka di tahun 2022 lapangan usaha R,S,T,U (Jasa Lainnya) adalah yang tertinggi dibanding yang lain dan lapangan usaha H (Transportasi) memiliki pertumbuhan yang tertinggi untuk tahun 2023.

Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2023 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 81,49 persen terhadap PDRB tahun 2023, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 16,02 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 10,60 persen dan komponen Konsumsi LNPRRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,56 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventory yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurang dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar 12,66 persen dan 0,02 persen. Prospek ekonomi makro Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat. Setelah melakukan analisis kondisi perekonomian Tahun 2023 dan awal 2024, maka telah ditetapkan target pencapaian indikator makro bidang ekonomi sebagai dasar dan bahan bagi perencanaan Tahun 2025. Proyeksi indikator makro tersebut sejalan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Berikut target ekonomi makro Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan target Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.1
Proyeksi Target Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi
disandingkan dengan Provinsi dan Nasional

INDIKATOR	RPJMN 2025 (Target)	RPD JAWA BARAT 2025 (Target)	KOTA SUKABUMI 2023 (Capaian)	KOTA SUKABUMI 2024 (Target)	RPD KOTA SUKABUMI 2025 (Target)
LPE (%)	5,3-5,6	5,68	5,12	5.37	5,39
Kemiskinan (%)	7,0-8,0	7,24	7,50	8,00	7,96
TPT (%)	4,5-5,0	8,16	8,53	8,41	8,25
Indeks Modal Manusia /IPM (Poin)	0,56	73,78	77,16	75.55	75,80

INDIKATOR	RPJMN 2025 (Target)	RPD JAWA BARAT 2025 (Target)	KOTA SUKABUMI 2023 (Capaian)	KOTA SUKABUMI 2024 (Target)	RPD KOTA SUKABUMI 2025 (Target)
Rasio Gini (Poin)	0,388	0,406	0,450	0,475	0,460

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026

Selain indikator makro di atas, maka berdasarkan hasil analisis dari capaian perekonomian terutama PDRB tahun-tahun sebelumnya, telah ditetapkan target dari PDRB sektor yang nantinya secara keseluruhan tentu akan mempengaruhi progres dari pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi. Target PDRB sektor tersebut seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Proyeksi Capaian dan Target PDRB Sektor Kota Sukabumi
Tahun 2025

Lapangan Usaha	Capaian			Target	
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.76	3.58	7.17	7.42	7.44
Indusri Pengolahan	2.49	4.81	4.64	4.89	4.91
Pengadaan Listrik dan Gas	8.98	5.9	3.19	3.44	3.46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.02	6.32	2.09	2.34	2.36
Konstruksi	4	-0.15	6.85	7.1	7.12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.64	5.47	3.8	4.05	4.07
Transportasi dan Pergudangan	3.41	7.59	9.08	9.33	9.35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.74	9.7	7.81	8.06	8.08
Informasi dan Komunikasi	8.23	7.01	6.17	6.42	6.44
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.79	2.57	3.33	3.58	3.6
Real Estat	7.76	6.3	5.54	5.79	5.81
Jasa Perusahaan	7.87	9.13	8.04	8.29	8.31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Soaial Wajib	-2.76	-0.34	2.07	2.32	2.34

Lapangan Usaha	Capaian			Target	
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Jasa Pendidikan	2.88	8.09	5.79	6.04	6.06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.82	9.85	5.72	5.97	5.99
Jasa lainnya	1.42	11.67	7.71	7.96	7.98
Produk Domestik Regional Bruto	3.71	5.35	5.12	5.37	5.39

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2024

Melihat capaian indikator makro yang telah ditampilkan sebelumnya, maka dapat dijelaskan realisasi dan proyeksi ekonomi makro Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 tampak berjalan relatif stabil selama 2 tahun terakhir, dilihat dari Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9.801,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 477,72 miliar rupiah dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022 Sementara pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi pada Tahun 2025 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebesar 5,39 persen. Proyeksi ini cukup berat, mengingatkan kondisi akhir Tahun 2023 adalah sebesar 5.54 %.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai strategi pemulihan ekonomi yang efektif dalam mencapai proyeksi target tersebut. Fokus pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 merupakan salah satu langkah

rasional yang harus dilakukan, terutama pada sektor-sektor tertentu yang paling besar atau banyak terdampak seperti rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan.

2) Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan alasan sebagai penghambat masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan tahun 2022. Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Target persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar 7,96 %. Apabila melihat target yang ditetapkan, maka target tersebut cukup realistis untuk tercapai sehubungan angka capaian persentase penduduk miskin tahun 2023 Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2023 sekitar 24,96 ribu jiwa atau 7,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2019 dan 2020. Kota Sukabumi

berhasil menangani kemiskinan dengan pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan

Berdasarkan hal tersebut, maka persentase penduduk miskin harus menjadi perhatian khusus untuk dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam melakukan pencapaian target tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi pasca *pandemi Covid-19* harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ditambah dengan pelaksanaan jarring pengaman social dalam rangka mencegah meningkatnya angka kemiskinan.

3) Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh). Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan konstruksi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dari 8,83 persen di tahun 2021 menjadi 8,53 persen di tahun 2023. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 26,64 persen di tahun 2023.

Berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, target TPT Tahun 2025 adalah sebesar 8,25%, menurun dari capaian Tahun 2023 sebesar 8,53 %. Target ini cukup tinggi dan berat untuk dicapai, sehingga tentunya dibutuhkan berbagai strategi dan program dalam melakukan intervensi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

4) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2025 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebesar 75,75. Target ini meningkat dari capaian Nilai IPM Tahun 2023 yang telah diterbitkan BPS yaitu sebesar 77,16. Dari aspek pembangunan manusia, Kota Sukabumi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Angka IPM Kota Sukabumi setiap tahun selalu diatas rata-rata angka IPM Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, nilai IPM Kota Sukabumi adalah sebesar 75,40. Selama periode 2010-2022, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen.

Target IPM Tahun 2025 sangat wajar dan bisa untuk tercapai, hal tersebut berkaca pada capaian IPM Tahun 2023 yang mencapai 77,16 dari target yang ditetapkan sebesar 74,75.

Namun demikian, tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Terutama sisi ekonomi perlu terus didorong peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan UMKM. Semoga upaya-upaya yang telah direncanakan pemerintah dalam kerangka pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* akan juga berhasil mendorong pencapaian target IPM Kota Sukabumi.

5) Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,45. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. sesuai target pada RPD kota

sukabumi Tahun 2025 Rasio Gini sebesar 0,470, melihat realisasi pada 2023 target tersebut optimis dapat tercapai.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
4. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;
5. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
6. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas (i) Pendapatan Daerah; (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kota Sukabumi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi

mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024 serta asumsi pendapatan Tahun 2025.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2025, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat. Untuk mendukung hal tersebut, reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan daerah, belanja daerah, serta pengelolaan aset pemerintah. Dengan demikian, secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada:

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui:
 - (a) peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah;
 - (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah;
3. Revitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi dan *refocusing* belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran;
5. Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

Adapun strategi yang ditempuh dalam perencanaan Tahun 2025 adalah:

1. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun

pendapatan;

2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), dan penerapan alokasi belanja daerah dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*);
3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan daerah, dan penilaian kekayaan daerah untuk menentukan nilai ekonomi (*existing value*) serta nilai potensi (*potential value*) kekayaan daerah;
5. Optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; serta;
6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit dengan resiko yang minimal.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Hasil pendapatan daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2023 sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hasil tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2023, dimana dari target pendapatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1,181,044,450,978,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,256,510,130,005,- atau realisasi sebesar 106 %. Dari tiga komponen pendapatan, dua komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer sesuai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah belum mencapai target dimana realisasi baru mencapai 97%.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2025 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2024, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi pada tahun 2024 ini, pengaturan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi yang akan dilakukan. Selain itu, di Kota Sukabumi diyakini masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun proyeksi pendapatan pada tahun 2025, berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 serta estimasi yang dilakukan berdasarkan kondisi terkini terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
PENDAPATAN TAHUN 2022 - 2024 DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2024 - 2025

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET APBD 2024 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2025	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	1,212,367,670,664	1,256,510,130,005	1,283,490,212,312	1,052,815,650,367	1,091,146,426,635
1.1	Pendapatan Asli Daerah	363,263,682,587	407,539,469,983	409,377,348,952	409,377,348,952	450,543,570,305
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	67,552,075,530	69,778,983,066	415,861,936,061	67,894,809,170	102,382,037,679
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,215,920,368	6,402,303,741	66,635,783,945	6,523,892,526	35,297,206,016
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,753,064,486	5,025,635,160	4,753,064,486	4,848,125,776	4,753,064,486
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	284,742,622,203	326,332,548,016	309,193,676,558	330,110,521,480	308,111,262,124
1.2	Pendapatan Transfer	821,147,030,215	833,526,684,515	852,691,526,251	628,775,031,415	625,655,856,330
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat:	821,147,030,215	708,930,449,184	741,479,975,138	540,352,154,590	572,266,822,490
1.2.1.1	Dana Perimbangan	717,381,967,231	690,491,234,184	733,896,032,138	540,352,154,590	564,682,879,490
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	536,390,643,856	555,450,956,032	564,682,879,490	540,352,154,590	564,682,879,490
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73,635,888,856	66,787,300,065	57,578,708,490	63,421,451,415	57,578,708,490

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET APBD 2024 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2025	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	462,754,755,000	488,663,655,967	507,104,171,000	476,930,703,175	507,104,171,000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	180,991,323,375	135,040,278,152	169,213,152,648	0	0
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	58,804,148,375	15,787,902,529	34,308,668,648	0	0
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik	122,187,175,000	119,252,375,623	134,904,484,000	0	0
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	3,504,359,000	18,439,215,000	7,583,943,000	0	7,583,943,000
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus					
1.2.1.4	Dana Keistimewaan					
1.2.1.5	Dana Desa					

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2025 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar Rp 1,052,815,650,367,- mengalami penurunan signifikan sebesar 17,97 persen dibanding target penerimaan pendapatan daerah Tahun 2024 sebesar Rp 1,283,490,212,312-. Penurunan ini disebabkan pendapatan bersumber transfer khusus yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik serta Bantuan Keuangan Provinsi belum dimasukkan sebagai unsur pendapatan. Hal tersebut didasari bahwa kelompok pendapatan tersebut merupakan dana transfer yang bersifat belum pasti dan tergantung pada menu atau prioritas pusat dan provinsi serta senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Pendapatan ini akan dimasukkan pada saat sudah adanya kepastian pendapatan transfer berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 2) Target penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2025 berdasarkan dokumen RKPD adalah sebesar Rp 1,091,146,426,635,- berkurang sebesar Rp 38,330,776,268,- atau 3.5 Persen dari target yang ditentukan dalam dokumen RPD adanya pengurangan dari Dana Alokasi Khusus yang belum dicantumkan dan adanya pengurangan Transfer antar Daerah dari pendapatan bagi hasil.
- 3) Target penerimaan pendapatan pada pos PAD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 450,543,570,305,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 26,105,598,990,- (11,99 %) dibanding target Tahun 2024 sebesar Rp 415,861,936,061,-. Penambahan proyeksi pendapatan ini berasal dari komponen pajak daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu berupa pendapatan BLUD.
- 4) Pada pos Pendapatan Transfer Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 625,665,856,330,- mengalami penurunan sebesar Rp 3,109,175,085,- atau 0,5 % dari target yang telah ditentukan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026.
- 5) Penerimaan pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 14,937,000,000,- meningkat sekitar **2 %** dibandingkan target Tahun 2024 dan sama dengan dokumen RPD.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - b) Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
 - c) Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;
 - d) Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
 - e) Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
 - f) mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - g) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD *holding company*.

- 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 6) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Kebijakan untuk peningkatan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025, dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, dilakukan melalui:
 - a. Penataan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur layanan
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan
 - d. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah secara terpadu
 - e. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, salah satunya melalui pengembangan sistem informasi pajak daerah
 - f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, DPRD, DPR RI, DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer
3. Strategi pencapaian anggaran lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal maupun belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah. Belanja Modal digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, sedangkan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai kejadian yang bersifat luar biasa dan bencana.

Belanja Daerah Tahun 2025 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga) yang dilaksanakan dengan pola yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah Tahun 2025 juga memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2025 yaitu: 1) Peningkatan Kondusifitas Kota, 2) Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa, dan 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
2. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Tahun 2025 belanja gaji ASN disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, *accress* dan kenaikan tunjangan-tunjangan serta mempertimbangan gaji dan tunjangan tenaga P3K.
3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun

2025 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. TPP merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;

4. Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yaitu sebanyak 3 (tiga) prioritas pembangunan;
5. Pemenuhan pencapaian program prioritas dan Indikator Kinerja Utama;
6. Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
7. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
8. Pengalokasian untuk anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBD
9. Pengalokasian anggaran kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
11. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah yang diantaranya disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;

12. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Belanja hibah berupa tanah, barang atau lainnya dilakukan sesuai kebutuhan dan melihat sisi kemanfaatannya baik kepada individu ataupun lembaga tertentu. Penganggaran hibah dan bansos di Tahun 2025 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
14. Belanja Daerah telah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD.

Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2025.

Berdasarkan uraian diatas, maka proyeksi belanja daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebagai berikut.

Tebel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2025

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET APBD 2024 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2025	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA DAERAH	1,251,744,741,073	1.277.025.782.656	1,304,941,048,235	1,071,643,195,184	1,109,973,971,453
2.1	Belanja Operasi	1,140,361,727,991	1.167.407.894.868	1,193,478,024,139	996.281,936,106	992,402,916,104
2.1.1	Belanja Pegawai	551,485,949,939	533.935.266.296	565,195,796,626	578,605,024,261	506,445,141,930
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	527,282,715,430	560.665.760.670	553,313,836,704	363,376,501,250	436,148,585,798
2.1.3	Belanja Bunga	-				
2.1.4	Belanja Subsidi	-				
2.1.5	Belanja Hibah	53,977,089,783	65.415.367.902	71,665,890,809	49,855,992,000	46,220,688,376
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,608,300,000	7.391.500.000	3,302,500,000	4,444,418,595	3,588,500,000
2.2	Belanja Modal	103,778,997,584	103.474.474.448	101,765,333,767	65,361,259,078	105,561,259,078
2.3	Belanja Tidak Terduga	7,604,015,498	6.143.413.342	9,697,690,329	10,000,000,000	12,009,796,272
2.4	Belanja transfer					
2.4.1	belanja bagi hasil					

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET APBD 2024 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2025	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	belanja bantuan keuangan					
	JUMLAH BELANJA	1,251,744,741,073	1.277.025.782.658	1,304,941,048,235	1,071,643,195,184	1,109,973,971,453
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	(39,377,070,409)	-20,515,652,653	-21,450,835,923	-18,827,544,817	-18,827,544,818

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa estimasi belanja daerah pada RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 194,967,076,782 atau sebesar 14,9 % dan bertambah sebesar 3,4 % atau sebesar Rp 38,330,776,269,- dari target yang telah tercantum dalam dokumen RPD. Belanja daerah di estimasikan sebesar sebesar Rp 1,109,973,971,453,- sedangkan Belanja APBD Tahun 2024 adalah sebesar 1,304,941,048,235,-. Kenaikan belanja RKPD dibanding RPD terjadi karena adanya tambahan pendapatan bersumber DAU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kota Sukabumi sudah mengembangkan e-ASB yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 yang seluruhnya terintegrasi

dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) baik dari proses perencanaan maupun penganggaran.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah yaitu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah, maka proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun 2025

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET APBD 2024 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2025	PROYEKSI RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN	114,919,083,071	72,079,889,770	21,450,835,923	18,827,544,817	18,827,544,818
3.1	Penerimaan Pembiayaan	121,790,911,331	75,579,889,770	23,450,835,923	24,199,373,078	24,199,373,078
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	120,840,911,331	75,574,889,770	23,450,835,923	24,199,373,077	24,199,373,078
3.1.2	pencairan Dana Cadangan;	-				
3.1.3	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-				
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	950,000,000	5,000,000			
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-				
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6,871,828,260	3,500,000,000	2,000,000,000	5,371,828,260	5,371,828,260
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-				

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET APBD 2024 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2025	PROYEKSI RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,871,828,260	3,500,000,000	2,000,000,000	5,371,828,260	5,371,828,260
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-				
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-				
	Pembiayaan Neto	114,919,083,071	72,079,889,770	21,450,835,923	18,827,544,817	18,827,544,818
	Surplus / (Defisit) Setelah Pembiayaan	75,542,012,662	51,564,237,117	0	0	0

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2025 terhadap anggaran tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 2,623,291,105 sehingga persentase proyeksi anggaran tahun 2025 berada pada angka 13,3 persen.
2. Penerimaan Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2025 terhadap anggaran tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 748,537,154 sehingga persentase proyeksi anggaran tahun 2025 berada pada angka 3,19 persen.
3. Pengeluaran Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2025 terhadap anggaran tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,371,828,260 sehingga persentase proyeksi anggaran tahun 2025 berada pada angka 168,59 persen untuk penyertaan Modal Pada Bank BJB cabang Kota Sukabumi

3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung implementasi pembangunan daerah terutama pada program prioritas dan unggulan, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan, maka Kota Sukabumi dituntut untuk senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Sukabumi dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Sukabumi. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan 6) Hibah. Adapun secara penjelasan dari masing-masing sumber pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN berupa dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas fiskal Kota Sukabumi masih pada kategori lemah. Hal tersebut didasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2022 masih berkisar 30,58 persen. Sekitar 68,20 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer Pemerintah Pusat. Karena itu, untuk membiayai program prioritas ataupun program yang selaras dengan prioritas nasional, dukungan pembiayaan dari APBN merupakan salah satu solusi yang realistis untuk beberapa tahun ke depan.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Sukabumi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3) Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kota Sukabumi adalah melalui dana masyarakat/umat, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya selain dari APBN adalah program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) mitra PKBL dan TJSL Daerah. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang.

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang berkesinambungan atau *sustainable* serta berdampak positif terhadap masyarakat. Penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha. Saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang telah menyadari pentingnya kontribusi pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Pembiayaan daerah untuk infrastruktur masih banyak mengalami kendala karena adanya hambatan keterbatasan anggaran. APBD masih harus difokuskan pada pembiayaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, penanganan bencana dan lain-lain. Pada konsisi ini maka skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) dapat menjadi salah satu solusi, di mana pemerintah, BUMD serta swasta bahu membahu untuk membiayai akselerasi pembangunan terus dengan prinsip gotong royong.

6) Hibah.

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan

atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan atau diharapkan tercapai pada akhir periode sebuah dokumen perencanaan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPD Provinsi serta isu-isu strategis pembangunan Daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan tahap pembangunan tahun kedua dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024–2026. Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menggunakan pendekatan substansi perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (T-H-I-S) yang digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2024

Pendekatan T-H-I-S tersebut secara implementatif dilakukan melalui:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024–2026.
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority program*) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
3. Menjaga dan memastikan semua tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar serta tepat waktu dengan mengimplementasikan SIPD RI serta sistem digital lainnya yang terintegrasi.
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, Kota Sukabumi, serta dari unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
5. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Selanjutnya rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 tersebut akan tetap mengacu dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RTRW Kota Sukabumi;
2. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
3. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024 Triwulan 2;
4. Prioritas Provinsi dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
5. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

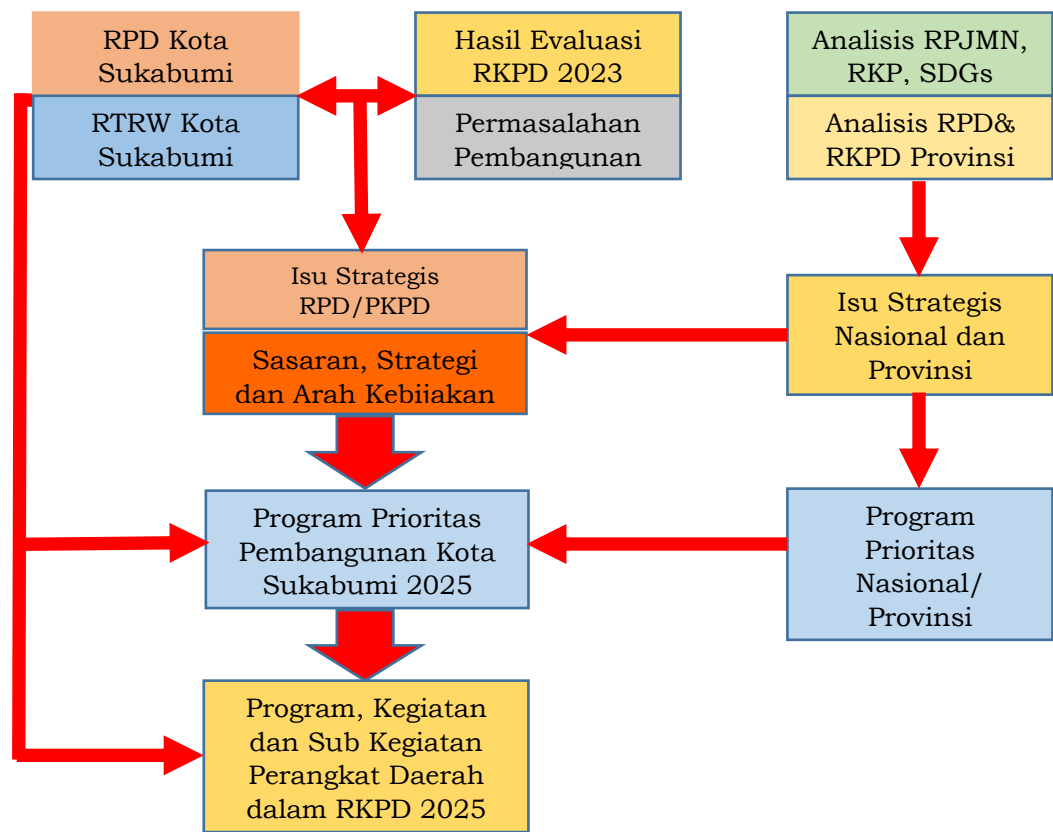
2025; dan

6. Kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2025.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan daerah Kota Sukabumi, maka ditetapkan sejumlah indikator makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta targetnya yang nantinya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi gambaran riil mengenai kondisi dan perkembangan keberhasilan pembangunan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Selain itu capaian lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dokumen perencanaan strategis lainnya serta kondisi sosial dan ekonomi yang tentunya akan tetap menjadi salah satu acuan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Pada proses penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 dilakukan analisis dan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan baik tingkat Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dokumen RPD termasuk isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu acuan utama, selain itu hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 dan triwulan 2 Tahun 2024 beserta permasalahan pembangunan yang dilengkapi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional serta provinsi menjadi acuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga pada akhirnya ditentukan prioritas program pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025. Penjelasan di atas sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Kota Sukabumi Tahun 2025



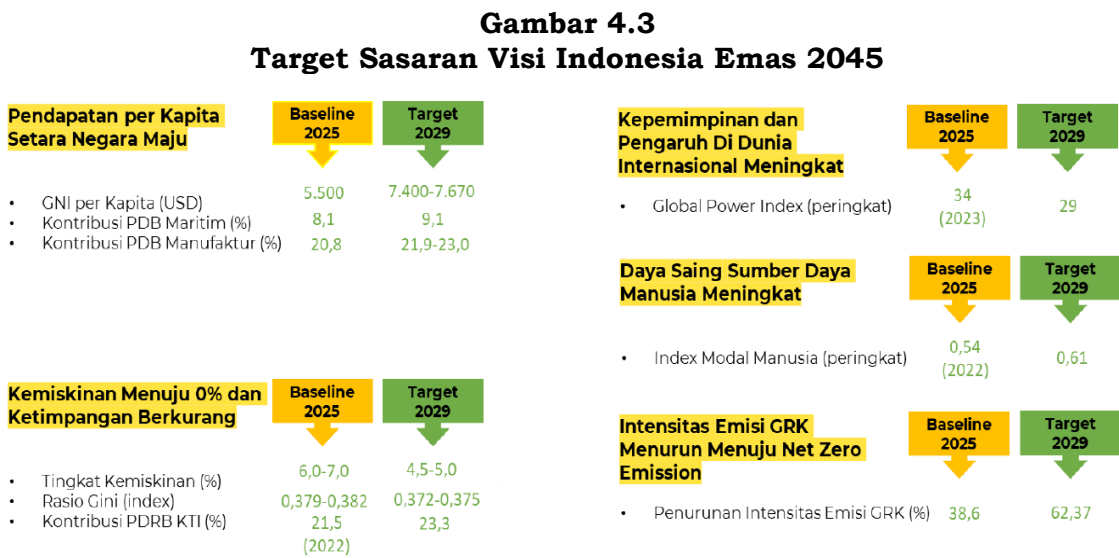
Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2024

4.1.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (Lima) tahun pertama yaitu tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN tahun 2025-2045 untuk melaksanakan dasar dasar tranformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk *Engine Of Growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai produk akhir, dan industri hijau.

Sarana visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdaulat, maju dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang;

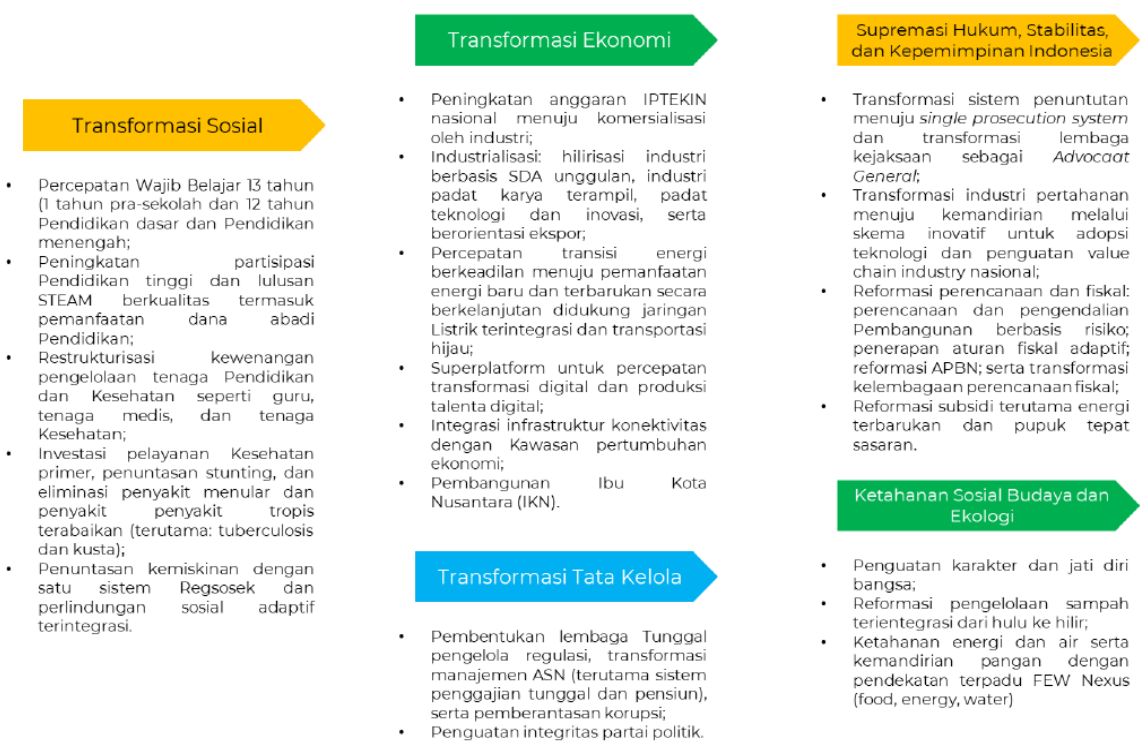
kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Ruma Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Kalimat sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut.



Sumber: Draft Ranhir RPJPN Tahun 2025-2029, 2024

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi sebagai berikut: transformasi sosial pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial; transformasi ekonomi hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja; transformasi tata kelola kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, meperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketaguhan diplomasi, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Kelima fondasi transformasi tersebut diwujudkan melalui upaya transformasi super prioritas (*game changers*) sebagai berikut.

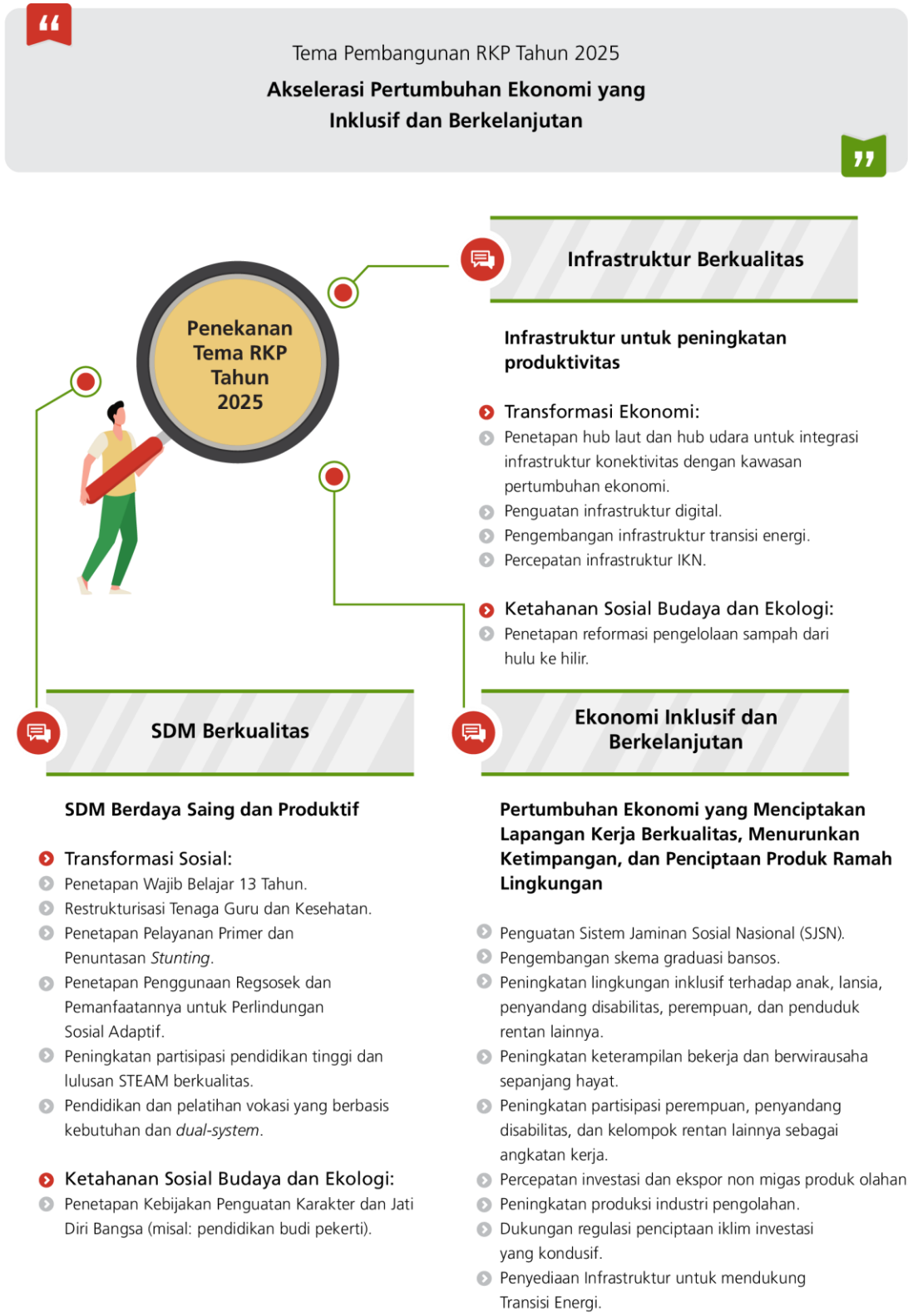
Gambar 4.4
Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers)



Sumber: Draft Ranhir RPJPN Tahun 2025-2029, 2024

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah ini.

Gambar 4.5
Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025

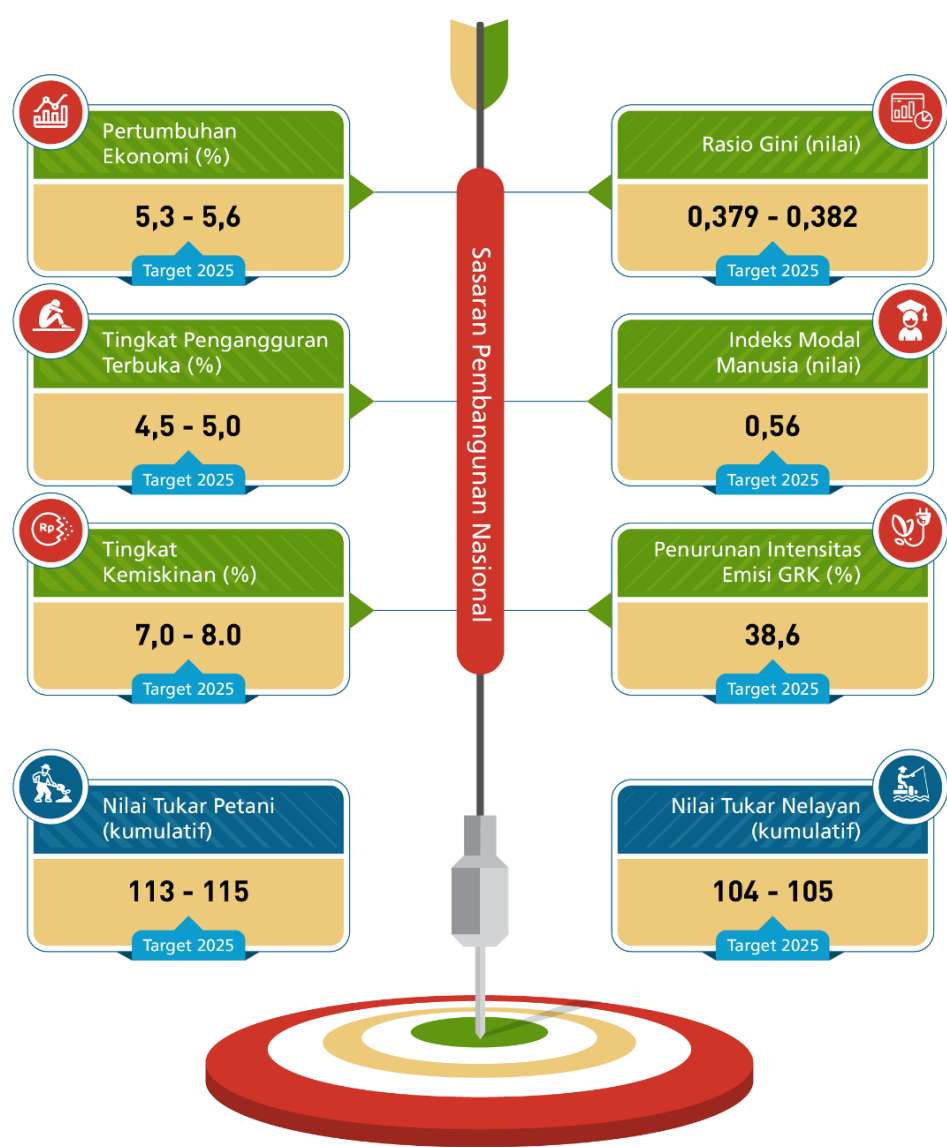


Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal

Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Gambar 4.6
Sasaran pembangunan Tahun 2025



Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

Pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan pada:

- (1) Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan *Stunting*; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
- (2) Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan *hub* laut dan *hub* udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
- (3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - (a) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi

penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis yang Ungul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan“. Tema pembangunan provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi **“pusat *cutting-edge* industry, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional“**. Tema tersebut memberikan makna bahwa focus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 adalah:

1. Penikatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur;
2. Pembangunan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak);
4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pembangunan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan sanitasi, perumahan dan pemukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu *global brain hub*;
6. Peningkatan pertahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure* terutama pada Kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Tabel 4.1
Target Indikator Makro Jawa Barat 2025

Target Tahun 2025	LPE	Kemiskinan	Rasio Gini	TPT	IMM	Penurunan Emisi GRK
	4,96-5,37	5,85-6,46	0,383-0,390	6,42-6,99	0,56	6,61

Sumber: Kementrian Bappenas 2024

Indikasi intervensi/ProP per transformasi di provinsi Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikasi Intervensi/ProP per Transformasi di Provinsi Jawa Barat

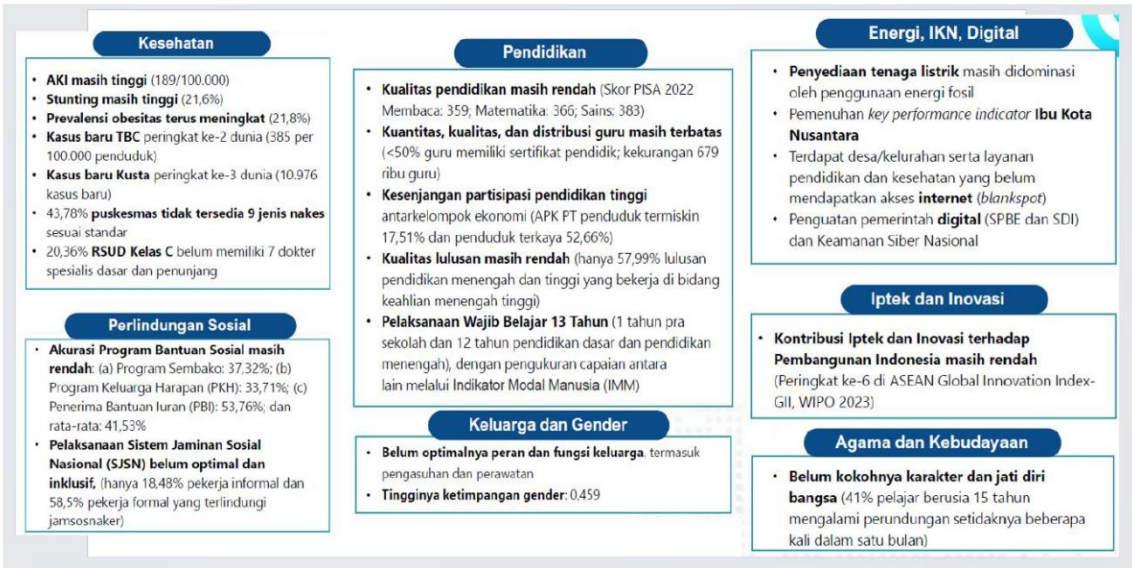
Agenda Pembangunan	Highlight Indikasi Intervensi
Transformasi Sosial	• Pengembangan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN Bandung) • Pengembangan Kampus ITB Cirebon • Pembangunan Rusunawa MBR di Kab. Purwakarta • Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
Transformasi Ekonomi	• Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan • Pengembangan Kertajati <i>Aerocity</i> • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Bandung (BRT Bandung Raya, Elektrifikasi KA Komuter Bandung) • Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kuningan • Peningkatan jaringan rel KA Cipatat-Tagogapu-Padalarang • Penguatan Industri Kimia Dasar dan Logam Dasar • Hilirisasi Industri Tembaga dan Bauksit • Hilirisasi Industri Kelapa dan Karet • Pengembangan Industri Alat Angkut termasuk EV dan Kedirgantaraan • Pengembangan Industri Elektronik dan Digital • Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi • Penguatan Produktivitas Industri Makanan dan Minuman • Penguatan Produktivitas Industri TPT dan Alas Kaki • Penguatan Ekosistem Film, Animasi, <i>Visual Arts</i>, Seni, Budaya, Kerajinan, Kuliner, dan Pemampu Ekonomi Kreatif • Penguatan Ekosistem Pengembangan Aplikasi dan Gim

Agenda Pembangunan	Highlight Indikasi Intervensi
	• Penyusunan Panduan dan Rencana Pengembangan untuk Kota dan Kawasan Perkotaan WM Bandung • Penguatan Koordinasi dan Kerja sama Antarwilayah untuk Pengelolaan WM Bandung • Reviu dan Penyusunan Pengaturan/Regulasi yang Relevan dengan Pengembangan Kawasan Perkotaan WM Bandung
Transformasi Tata Kelola	• Pengembangan PTSP Daerah berbasis OSS dan MPP digital
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	• Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	• Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di Cagar Budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon • Pembangunan IPA Tahap 2 SPAM Regional Bandung Raya • Penuntasan Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey • Modernisasi DI Rentang • Pengamanan Pantai Eretan dan Kab. Cirebon • Pembangunan TPST, TPS3R, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kota Depok, Kab. Indramayu, dan Kab. Tasikmalaya • Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian • pencemaran udara di kota metropolitan Bandung Penyediaan SDM berkompeten, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan (SAR)

Sumber: Kementerian Bappenas 2024

RKP 2025 menjadi fondasi strategi untuk mencapai Indonesia emas 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia hingga saat ini masih mengalami tantangan multi dimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik dengan melibatkan kolaborasi lintas sector untuk menanganinya. Tantangan multi dimensi ini meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keluarga dan gender, energi, IKN, digital, IPTEK dan inovasi, serta agama dan kebudayaan, sebagaimana ditinjukan oleh gambar berikut.

Gambar 4.7
Tantangan Multi Dimensi RKP 2025



Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Berdasarkan dari permasalahan dan tantangan tersebut, tema RKP 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan di fokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu: SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas mewujudkan SDM berdaya saing dan produktif dengan memfokuskan melalui transformasi sosial, yaitu Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusan STEAM Berkualitas; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang Berbasis Kebutuhan dan *Dual-System*. Selain memfokuskan pada transformasi sosial, SDM berdaya saing dan produktif memfokuskan pula pada Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (sebagai contoh: budi pekerti).

Infrastruktur Berkualitas mewujudkan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas melalui transformasi ekonomi, yaitu: Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; Penguatan infrastruktur digital; Pengembangan infrastruktur transisi energi;

Percepatan infrastruktur IKN. Selain itu, melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Ekonomi inklusif dan berkelanjutan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yaitu Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Pengembangan skema graduasi bansos; Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; Peningkatan produksi industri pengolahan; Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Selain itu, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global. Pengarusutamaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Kesenjangan Gender

Pembangunan nasional memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga

kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada rencana pembangunan daerah (RPD) provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD 2025-2025, yaitu “dengan iman dan takwa, provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia.” Adapun tujuan dan sasaran pada pembangunan daerah (RPD) provinsi Jawa Barat pada tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;

4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana.
6. Meningkatnya Pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Tujuan 4 Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah , dengan sasaran:

1. Meningkatnya Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tentu harus disertai dengan target indikator yang telah ditentukan sehingga menjadi tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	TARGET	
							2024	2025
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia		Poin	74,14	74,396
		1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan masyarakat	a.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,03	9,16
				b.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,82
		1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	a.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,90	74,1
				b.	Prevelensi Stunting	Persen	15,52	12,93
		1.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	a.	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.504	11.619
				b.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,34	7,13
		1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda	a.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	71,34	71,75
				b.	Indeks Perlindungan Anak	Angka	64,5	65,5
				c.	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49,26	49,9
		1.5	Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,42	1,42
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,42	5,42
				Gini Ratio (poin)		Poin	0,408	0,408
		2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5,76	5,84
				b.	Laju Pertumbuhan	Persen	4,53	4,85

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	TARGET	
						2024	2025
				Sektor Perdagangan			
		2.2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah	a. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perse n	4,50	4,54
				b. Nilai Tuka Petani (NTP)	Poin	101,67	102,64
				c. Skor Pola Pangan Harapan	Poin	93,3	93,8
		2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	a. Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Perse n	12,3	12,85
		2.4	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	532,22	542,86
				b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Perse n	23,34	23,92
				c. Tingkat Pengangguran Terbuka	Perse n	8,01	7,88
3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan			Indeks Williamson	Poin	0,667	0,666
		3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	a. Tingkat Konektivitas	Perse n	57,00	60,00
		3.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	a. Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	75,91	76,57
		3.3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	a. Persentase rumah tangga hunian layak	Perse n	54,47	55,24
		3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,13	67
		3.5	Meningkatnya kualitas rendah karbon dan menurunnya resiko bencana	a. Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca	Perse n	7,11	7,72
				b. Indeks Risiko Bencana	Point	129	128
		3.6	Meningkatnya pemerataan pembangunan	a. Indeks Desa membangun	perse n	0,77	0,78

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	TARGET	
						2024	2025
			di wilayah pedesaan				
4	Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	82,14	82,96
				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A	A
		4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	82,14	82,96
		4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A
		4.3	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	a. Indeks Inovasi Daerah	Poin	69,15 (Sangat Inovatif)	70,15 (Sangat Inovatif)

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sesuai tabel di atas akan dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026. Sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode

pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu 2024-2026.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antarperiode, maka Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan:

1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan
3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi.

Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah; dan
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan:

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Sandingan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD, Isu Strategis Aktual serta Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

N o	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1	Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya	SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia	Kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	● Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ● Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ● Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan			
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat			
4	Mewujudkan pengembangan perdagangan	Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan	● Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor

N o	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
	n dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi	yang berdaya saing	● Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya		perdagangan dan jasa
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah	Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan	● Inovasi di pemerintahan ● Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	● Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis ● Meningkatnya inovasi daerah
6	Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana	Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	● Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ● Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (hasil analisis)

Adapun secara rinci tujuan, sasaran, outcome, indikator kinerja abeserta targetnya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi
Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN/ <i>OUTCOME</i>	INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Tujuan:						
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,31	5,33	5,37
Sasaran:						
Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	3,80	4,00	4,20	4,40
Outcome:						
Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	69,3	80	82	85
Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	4,88	5,88	6,38	6,88
	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persen	100	100	100	100
Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,01	0,01	0,02	0,03

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persen	20	40	60	80
Meningkatnya promosi produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						
Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	29,43	30,93	32,43	33,95
Outcome:						
Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	14	16	19	22
Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	21,78	21,80	21,90	22
	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	4	4	6	7
Tujuan:						
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80
Sasaran:						
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,55	71,58	71,68	71,77

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Outcome:						
Terpenuhinya SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya literasi masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	65.34	70.5	71	72
Sasaran:						
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,31	0,33	0,35	0,37
Outcome						
Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persen	6,28	6	5,75	5,5
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	100	100	100
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	13,64	15,88	18,16	20,44
Meningkatnya kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	Persen	98,43	98,5	98,6	98,7
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persen	64,24	65	65,5	66
Sasaran:						
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	30,899	34,001	35,769	37,736

TUJUAN/SASARAN/ <i>OUTCOME</i>	INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
<i>Outcome:</i>						
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	81	82	83
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	80	85	87,5	90
Tujuan:						
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Poin	64,50	65,00	65,25	65,50
Sasaran:						
Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,20	86,00	86,20	86,50
<i>Outcome:</i>						
Meningkatnya konektivitas wilayah	Tingkat kemantapan jalan kota	Persen	84,54%	85	86	87
	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	82,85	83,54	83,87	84,2
Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	99,55	100	100	100
	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	57,87%	58,30	58,73	59,16

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentas berkurangnya jumlah RTLH	Persen	100,00%	69.44	38.88	0.69
	Luasan pengurangan kawasan kumuh	Ha	19,79	15	20	15
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
	Indeks RTH	m2/orang	25	25,5	26	26,5
Sasaran:						
Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Persen	75,31	75,40	75,55	75,60
Outcome:						
Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan	Poin	100	100	100	100
Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	Persen	57,32%	62,18	67,03	71, 89
Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Persen	53	55	56	57

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100
Tujuan:						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Sasaran:						
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Outcome:						
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	100
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	96,67	97,33	97,66	98
Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,68	7,9	8,0	8,5

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	45	76	77	78
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	45	80	81	82
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100
	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persen	100	100	100	100
	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persen	90	93	95	97

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Outcome:						
Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase instansi/lembaga yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100

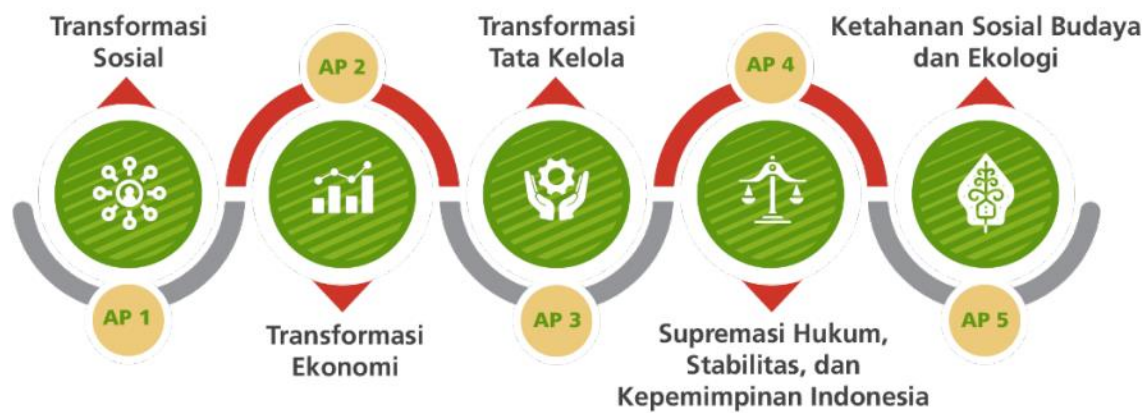
Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2024

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Gambar di bawah ini memperlihatkan lima Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025.

Gambar 4.8
Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian Bappenas 2024

4.2.1.1 Transformasi Sosial

Sebagai bagian dari tahap Penguatan Fondasi Transformasi, pada tahun 2025 Agenda Pembangunan Transformasi Sosial difokuskan untuk penuntasan pemenuhan layanan dasar pada seluruh siklus hidup manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dalam rangka menciptakan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing tinggi. Pembangunan manusia telah mencapai kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu, namun masih terdapat isu dan tantangan yang harus dijawab di masa depan.

Tabel 4.6
Sasaran Pembangunan Transformasi Sosial

No	Indikator Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
Kesehatan Untuk Semua			
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,13 ¹⁾	74,43
2	Kesehatan Ibu dan Anak		
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020) ¹⁾	115
	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,60 (2022) ²⁾	13,50
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022) ³⁾	272
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95 ⁴⁾	98
Pendidikan Berkualitas Merata			
5	Hasil Pembelajaran		
	a. Rata-rata nilai PISA		
	i. Membaca	359 (2022) ⁵⁾	396
	ii. Matematika	366 (2022) ⁵⁾	404
	iii. Sains	383 (2022) ⁵⁾	416
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,13 ¹⁾	9,46
6	c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,15 ¹⁾	13,37
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31,45 ¹⁾	33,94
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 ¹⁾	66,78
Perlindungan Sosial yang Adaptif			
8	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	0 ⁶⁾	15
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48 ⁷⁾	43,19
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	19,71 (2023) ⁶⁾	22

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkes; 3) WHO, 4) DJSN, 5) OECD, 6) Kementerian PPN/Bappenas, dan 7) BPJS Ketenagakerjaan

4.2.1.2 Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang merupakan tahap awal dalam mengatasi jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas, akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran dan permintaan. Produktivitas Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah. Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pembangunan

Indonesia pun masih rendah, akibat ekosistem dan kapasitas iptek dan inovasi yang masih lemah. Sementara itu, pada sektor pertanian kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Namun demikian, nilai tambah dan produktivitas sektor ini masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan tenaga kerja sektor pertanian masih didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah. Selain itu, terdapat pula isu percepatan implementasi ekonomi hijau, isu pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya dalam mendorong transformasi digital, isu integrasi ekonomi domestik dan global, isu belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, serta isu-isu lainnya..

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi

No	Indikator Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
11	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67	19,34
12	Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,10	4,60
	b. Devisa Pariwisata (miliar USD)	14,63	22,10
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77	7,92
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,32 (2019)	1,58
	b. Rasio kewirausahaan (%)	3,04	3,14
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,07	1,69
	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMN (%)	(2021)	3,45
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,5–5,0
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,22	56,30
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,30
	b. Peningkatan Indeks Inovasi Global (peringkat)	61	60
Penerapan Ekonomi Hijau			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a. Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70,80
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13,21	20,0
Transformasi Digital			
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45	43
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
20	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3	30,1–30,2
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7	21,0–21,6

No	Indikator Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
23	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44,12	44,35
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	63,15	67,00
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	3,9 (2021)	4,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

4.2.1.3 Transformasi Tata Kelola

Tata kelola merupakan aspek penting yang tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, melainkan juga bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Selain itu, Transformasi Tata Kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Tata kelola memiliki permasalahan seperti reformasi birokrasi yang masih bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Integritas Nasional tahun 2023 menghasilkan nilai 70,97 yang menunjukkan Indonesia rentan korupsi dan terjadi penurunan nilai sebesar 0,97 dari tahun 2022 yaitu 71,94. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga, serta pembagian kewenangan yang belum ideal telah menghasilkan inefisiensi birokrasi.

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Transformasi Tata Kelola

No	Indikator Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
24	Indeks Materi Hukum	0,48 ^{a)} (2022)	0,51
25	Indeks SPBE	2,79 ^{b)}	3,00
26	Indeks Pelayanan Publik	3,93 ^{b)}	3,68*
27	Anti Korupsi		
	a. Indeks Integritas Nasional	70,97 ^{c)}	74,52
	b. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,92 ^{d)}	3,97

Sumber: a) Kementerian PPN/Bappenas, b) KemenPAN-RB c) KPK dan d) BPS dan KPK.

4.2.1.4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Dalam pembangunan bidang hukum terdapat beberapa isu strategis yang masih menjadi kendala yaitu pada aspek budaya hukum, kelembagaan hukum, penerapan dan penegakan hukum baik pidana maupun perdata, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia serta penguatan akses terhadap keadilan. Pada pembangunan budaya hukum, masih adanya tantangan dalam hal minimnya literasi hukum masyarakat dan belum terpetakannya permasalahan hukum, lemahnya budaya hukum penyelenggara negara dan profesi hukum sebagai dampak dari diskoneksi antara pengajaran dan tata kelola di Pendidikan Tinggi Hukum dengan kebutuhan praktik dan pembangunan hukum. Pada aspek kelembagaan hukum, belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan hukum dan ketersediaan sumber daya manusia di beberapa lembaga penegak hukum yang tidak sebanding dengan beban kerja yang luas.

Tabel 4.9
Sasaran Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

No	Indikator Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional tangguh, dan Demokrasi Substansial			
28	Indeks Pembangunan Hukum ¹⁾	0,66 (2022)	0,69
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ²⁾ (%)	62,8 (2021)	67,5
30	Indeks Demokrasi Indonesia ²⁾ (nilai)	80,41 (2022)	81,69 – 85,23
Stabilitas Ekonomi Makro			
31	Rasio Perpajakan terhadap PDB ^{a)}	10,32	10,00 – 12,00
32	Tingkat Inflasi ²⁾	2,61	2,5 ± 1,0
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Aset Perbankan/PDB (%)	56,23 ³⁾	59,50
	b. Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,37 ³⁾	8,10
	c. Aset Asuransi/PDB (%)	8,35 ³⁾	8,78
	d. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,87 ³⁾	56,7
	e. Total Kredit/PDB (%)	34,2 ³⁾	36,1
34	Inklusi Keuangan (%)	85 (2022) ⁴⁾	91
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
35	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>) ^{5)b)}	60,42	63,12
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>) ⁵⁾	14,6	16

Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas, 2) BPS, 3) BPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 5) Lowy Institute

4.2.1.5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Keberagaman sosial dan budaya yang tinggi di Indonesia tecermin dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut turut didukung oleh kondisi ekologi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tinggi di dunia. Perubahan kehidupan masyarakat dan lingkungan menunjukkan hubungan saling memengaruhi dan interaksi timbal balik. Dalam konteks ini, kehidupan sosial dan budaya beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan pola pengelolaan sumber daya alam dipengaruhi dari kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan menjadi aspek fundamental dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus dijadikan landasan spiritual, etika, dan moral untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pembangunan sosial dan kebudayaan juga memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui pengejawantahan nilai-nilai ideologi Pancasila, dimulai dari level terkecil dalam keluarga, dan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.

Tabel 4.10

Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

No	Indikator Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,13 (2022) ¹⁾	55,57
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02 ²⁾	76,77
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif			
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 (2022) ³⁾	70,29
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2022) ³⁾	0,425
Lingkungan Hidup Berkualitas			
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020) ⁴⁾	0,44
42	Kualitas Lingkungan Hidup	76,09 ⁵⁾	76,68
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		12,5
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,21 (2022)	24,00
	c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15,00 (2022) ⁵⁾	(16,00 terdaur ulang)
Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan			

No	Indikator Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a. Ketahanan energi – Indeks Ketahanan Energi	6,64 (2022) ⁷⁾	6,77
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%) / <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	8,53 ³⁾	7,21
	c. Ketahanan air		
	i. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	60,43 ⁶⁾	65,18
	ii. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24,00 (2020)	39,00
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a. Kumulatif	27,82 (2022) ⁴⁾	28,12
	b. Tahunan	32,97 (2022) ⁴⁾	32,65

Sumber: ¹⁾ Kemendikbudristek, ²⁾ Kementerian Agama, ³⁾ Badan Pusat Statistik, ⁴⁾ Kementerian PPN/Bappenas, ⁵⁾Kementerian LHK, ⁶⁾ Kementerian PUPR, ⁷⁾ Dewan Energi Nasional

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar 4.9
Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Sumber: RKP Tahun 2025

Adapun sasaran pembangunan dari setiap prioritas nasional tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Sasaran Pembangunan Per Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
		1) Indeks Demokrasi Indonesia	80,41 (2022)	81,69– 85,23
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru			
		1) Asia Power Index (Military Capability)	14,6 (2022)	20
		2) Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,42	61,54
		3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	62,8 (2020)	67,5
		4) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	8.53	7,21
		5) Indeks Ketahanan Energi	6,64 (2022)	6,77
		6) Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	60,43	65,18
		7) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	39.2
		8) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,21	12.5
		9) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	45	43
		10) Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70.8
		11) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	13.21	20
		12) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15,00 (13,00 terdaur ulang) (2022)	24,00 (16,00 terdaur ulang)

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
		13) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0.44
		14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76.09	76.68
		15) Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	35,53 27,82	32,65 28,12
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
		1) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,32 (2019)	1.44
		2) Rasio Kewirausahaan (%)	3.04	3.14
		3) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1.26
		4) Rasio PDB Pariwisata (%)	4.1	4.6
		5) Devisa Pariwisata (miliar USD)	14.63	22.1
		6) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6.77	7.92
		7) Aset Perbankan/PDB (%)	56.23	59.5
		8) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7.37	8.1
		9) Aset Asuransi/PDB (%)	8.35	8.78
		10) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55.87	56.7
		11) Total Kredit/PDB (%)	34.2	36.1
		12) Inklusi Keuangan (%)	88.5	90.6
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.			
		1) Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	359 (2022) 366 (2022) 383 (2022)	396 404 416
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9.13	9.46

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
		c. Harapan lama sekolah (tahun)	13.15	13.37
		2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31,45	33.94
		3) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66.3	66.78
		4) Tingkat Penguasaan Iptek:		
		a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0.3
		b. Peringkat Indeks Inovasi Global	61	60
		5) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.32	4,50- 5,00
		6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54.52	56.3
		7) Usia Harapan Hidup (tahun)	73.93	74.43
		8) Kesehatan Ibu dan Anak		
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	21.5
		b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21.5	18.8
		9) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022)	272
		10) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	98
		11) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69,53 (2022)	70.29
		12) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2022)	0.425
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
		1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18.67	19,9- 20,0

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
		2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29.3	30,1-30,2
		3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21.7	21,0-21,6
		4) Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13.5
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan			
		1) Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	0	15
		2) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48	43.19
		3) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	19.71	22
		4) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44.11	44.34
		5) Persentase desa mandiri (%)	3.9	4
		6) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63.15	67
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.			
		1) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,05 (2022)	3.45
		2) Indeks Integritas Nasional	70,97	74.52
		3) Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0.51
		4) Indeks Pelayanan Publik	3.93	3.68
		5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.79	3
		6) Indeks Persepsi Korupsi	34	38
		7) Indeks Pembangunan Hukum	0.66	0.69

No	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
		8) Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10.3	10,70–11,20
		9) Tingkat Inflasi (%)	2.61	1,5–3,5
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur			
		1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13	58.39
		2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02	76.77
		3) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137

4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, serta pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional yang telah diuraikan sebelumnya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangkamenengah/panjang,dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis provinsi jawa barat tahun 2025 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan

permasalahan pembangunan tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional yang telah diuraikan pada sub Bab 4.1

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, mampu bersaing secara global. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2022 baru mencapai 73,12, sedangkan target pada tahun 2025 yaitu 75,23 – 76,01, sehingga memerlukan upaya peningkatan diantaranya pada aspek kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata- Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 yaitu 12,62 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 12,62 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Umum Harapan Hidup mencapai 73,52 tahun, Angka Kematian Bayi yaitu 3,39 per 1000, Angka Kematian Ibu masih mencapai 149,33 per 100.000, dan Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2021 yaitu 24,50 persen dengan target pada tahun 2024 yaitu 14,00 persen. Permasalahan utama kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat pada aspek kesehatan diantaranya adalah belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat, serta percepatan penurunan stunting dan penanganan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat juga terdapat pada belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak yang

ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 baru mencapai 89,42 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 90,12 persen. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga berencana, serta upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 1,42 Persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 1,46 persen.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 7,98 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 7,45–7,26 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Barat lebih banyak terjadi di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat di desa termasuk penurunan volume perdagangan hasil-hasil pertanian.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 masih mencapai 8,31 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 7,45 – 7,26 persen. Faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah keterbatasan kesempatan kerja baru, tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja, dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri. Untuk diperlukan Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan optimalisasi dalam peningkatan daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Adapun ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Barat masih tinggi ditunjukkan oleh Indeks Gini pada tahun 2022 mencapai

0,412 poin, dengan target pada tahun 2025 yaitu 0,35 – 0,30 poin. Untuk itu, dalam rangka mengatasi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan berbagai upaya melalui peningkatan pertumbuhan pada sektor perindustrian dan perdagangan, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih terkendala tingkat konektivitas antar wilayah yang belum optimal, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah relatif terbatas, ditunjukkan dengan Tingkat Konektivitas Antar Wilayah pada tahun 2021 baru mencapai 43,51 persen, dengan target tahun 2023 yaitu 47,0 persen. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan ditunjukkan melalui capaian Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebesar 0,667 poin, dengan target tahun 2023 yaitu 0,660 poin.

Akar masalah kemiskinan salah satunya adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan. Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Jawa Barat meliputi belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan, air bersih dan sistem drainase, serta infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengelolaan air

limbah domestik dan limbah industri, pelayanan persampahan, serta belum terpenuhinya standar PSU dalam penyediaan perumahan.

Tantangan terbesar pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar serta infrastruktur lainnya, adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan yang perlu tetap dipertahankan. Kualitas lingkungan hidup Jawa Barat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 64,66 poin pada tahun 2022, dengan target pada tahun 2024 yaitu 66,13 poin. Permasalahan utama kualitas lingkungan hidup Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran air, termasuk air laut, pencemaran udara, serta pengendalian perubahan tutupan lahan. Selain itu, masih perlu didorong upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan daerah.

4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2022. Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penerapan inovasi daerah dalam pembangunan di Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 memperoleh predikat Sangat Inovatif.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJPD V (2023-2025), yaitu “Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat di Segala Bidang”, serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu “Meningkatkan Kemandirian

Masyarakat Jawa Barat”, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

“Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pemerataan pembangunan untuk mendukung kemandirian masyarakat Jawa Barat diarahkan pada keberlanjutan fokus pembangunan pada tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal dalam mendapatkan pelayanan namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan keunggulan masyarakat Jawa Barat.

Peroses penyusunan isu strategis tahun 2025 perlu mempertimbangkan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2023 dan mengacu pada arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026, serta memastikan keterkaitan dengan isu strategis/tantangan dan arah kebijakan pada RKP 2025.

Keterkaitan isu strategis berdasarkan RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024, dengan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.12
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Isu Strategis RPD Jabar 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangu nan Jabar 2025
1	2	3	4
1	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi. 2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

No	Isu Strategis RPD Jabar 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Jabar 2025
1	2	3	4
		pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat. 3. Masih rendahnya penerapan <i>zero new stunting</i> dan penanganan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria. 4. Belum optimalnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana. 5. Belum optimalnya upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk	
2	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Masih rendahnya penerapan <i>link and match</i> industri kecil-industri besar. 2. Belum optimalnya penerapan UMKM dan industri hijau. 3. Percepatan digitalisasi ekonomi masih perlu didorong. 4. Belum optimalnya pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM. 5. Belum optimalnya penerapan pertanian ekologis. 6. Masih perlunya percepatan pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian, dan perikanan. 7. Nilai inventasi dan kualitas usaha masih perlu ditingkatkan. 8. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan. 9. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan. 10. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan masih perlu didorong. 11. Masih rendahnya	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Isu Strategis RPD Jabar 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Jabar 2025
1	2	3	4
		penerapan <i>circular economy</i> .	
3	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir. 2. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat. 3. Perlunya percepatan pengembangan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekjur, dan Kawasan Cekungan Bandung. 4. Belum optimalnya penyediaan transportasi massal perkotaan. 5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang belum menjangkau seluruh wilayah. Akses layanan listrik belum menjangkau seluruh wilayah. 7. Belum optimalnya penyediaan hunian layak huni. 8. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan belum optimal. 9. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik. 10. Masih rendahnya pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 11. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim belum optimal dilaksanakan untuk mendukung perekonomian. 12. Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana.	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

No	Isu Strategis RPD Jabar 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Jabar 2025
1	2	3	4
4	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1. Belum optimalnya penataan dan penguatan organisasi. 2. Belum optimalnya upaya deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum. 3. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional. 4. Belum optimalnya tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi. 5. Belum optimalnya penataan sistem manajemen SDM Aparatur. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas. 7. Belum optimalnya penguatan pengawasan. 8. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik. 9. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sumber: Analisis Bappeda 2024

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;
2. **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024- 2026 untuk tahun 2024, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025.

Tabel 4.13
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPD 2024-2026

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
1	2	3	4
1	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar	P2 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
1	2	3	4
		4. Peningkatan minat baca masyarakat 5. Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja 7. Peningkatan pelayanan penyakit menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif 8. Percepatan penurunan stunting dalam mencapai Jabar <i>Zero New Stunting</i> 9. Pemenuhan tenaga kesehatan/SDK 10. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif 11. Penguatan pembiayaan kesehatan 12. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi 13. Peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga 14. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha 15. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni 16. Pemberdayaan masyarakat dan desa 17. Peningkatan perlindungan perempuan 18. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 19. Pemenuhan hak dan perlindungan anak 20. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup 21. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan daya saing pemuda 22. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk	P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
2	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Penerapan <i>link and match</i> industri kecil-industri besar 2. Pengembangan IKM dan industri hijau 3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu	P1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan

No	Isu Strategis Pembangun an Tahun 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
1	2	3	4
		4. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital 5. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor 6. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok 7. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan 8. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian 9. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian 10. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani 11. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan 12. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 13. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 14. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah 15. Peningkatan perhutanan sosial 16. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan 17. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal 18. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture 19. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing 20. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran	Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
1	2	3	4
		pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis 21. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif 22. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata 23. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi 24. Promosi dan peningkatan layanan investasi 25. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas 26. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global 27. Peningkatan keterampilan angkatan kerja 28. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja 29. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan 30. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil	
3	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Pembangunan pusat kegiatan baru untuk membuka akses, distribusi penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi 2. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat 3. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan 4. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan 5. Pemanfaatan ruang yang efektif 6. Pengembangan transportasi massal perkotaan yang ramah lingkungan 7. Pemenuhan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industri 8. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah 9. Peningkatan layanan infrastruktur persampahan dan	P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

No	Isu Strategis Pembangun an Tahun 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
1	2	3	4
		air limbah domestik Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah 11. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup 12. Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan 13. Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis 14. Pengelolaan kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan 15. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian 16. Pengembangan potensi konservasi energi dan baru terbarukan 17. Penerapan waste to energy dan circular economy dalam pengelolaan persampahan, serta peningkatan pengendalian <i>food waste</i> dan <i>food loss</i> 18. Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan cepat 19. Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana termasuk bencana hidrometeorologi	
4	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1. Peningkatan kapasitas sektor-sektor atau kelompok untuk mandiri dan otonom Peningkatan kapasitas kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi untuk dapat memiliki akses <i>yang setara</i> pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan 3. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga demokrasi yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, dan penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan.	

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
1	2	3	4
		4. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (<i>Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance</i>) dalam mewujudkan <i>World Class Government</i> 5. Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Pengembangan Smart Governance yang unggul dalam rangka mewujudkan Jabar Smart Province. 7. Penguatan dan Penataan Organisasi 8. Penerapan sistem merit secara konsisten 9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan <i>corporate university</i> Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi 10. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi 11. Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda 2024

4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, saran dan masukan tersebut antara lain:

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Bidang Pendidikan
 - Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria/Aturan yang berlaku.
- 2) Kesehatan
 - Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria/Aturan yang berlaku.
- 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Untuk segera membuat *Master plan Drainase* sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir.
 - Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi.
- 4) Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi.
 - Pendataan RTLH serta penaggulangan nya.
- 5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW.
- 6) Bidang Sosial
 - Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan.
 - Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Bidang Tenaga Kerja

- Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat.
 - Melakukan Koordinasi dengan pihak Perusahaan dalam penentuan Hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.
 - Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- 3) Bidang Ketahanan Pangan
- Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.
 - Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok.
- 4) Bidang Pertanahan
- Melakukan Pendataan dan Mentertibkan Hak Kepemilikan Tanah yang belum Bersertifikat.
 - Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota.
- 5) Bidang Lingkungan Hidup
- Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
 - Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola *typing fee*.
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Kelurahan)
- Memberikan Bantuan Operasional kepada para Petugas Pos Yandu Balita dan Lansia.
- 7) Bidang Koperasi Dan UMKM
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM.
 - Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM.
 - Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan.
-

8) Bidang Penanaman Modal

- Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi.
- Menyediakan Mall pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di DPMPTSP.

9) Bidang Kebudayaan

- Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung/Tempat peninggalan Sejarah/Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Pariwisata

- Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan.
- Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri.
- Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan melalui Sukabumi *Great sale*.
- Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri
- Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.

2) Bidang Pertanian

- Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat.
- Peningkatan keanekaragaman industri tanaman pertanian.
- Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal.
- Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi.

3) Bidang Perdagangan

- Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok.
- Membuka dan memperluas akses pemasaran baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional.
- Perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.
- Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar tradisional secara optimal, terutama terkait jaringan instalasi listrik di Pasar-Pasar tradisional secara keseluruhan.
- Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional.
- Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional.

4) Bidang Perindustrian

- Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.
- Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha-usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi.

5) Bidang Transmigrasi

- Peningkatan kerja sama daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang secara infrastruktur memadai.

- Peningkatan pembekalan Calon Transmigran yang akan dikirim dengan pelatihan yang memadai.

6) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Bidang Perencanaan

- Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
- Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah.

b. Bidang Keuangan (Peningkatan PAD)

- Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD.
- Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen.
- Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara *online*.
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.

c. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Perlunya ada penambahan Formasi / Pengangkatan Guru Agama baik melalui Seleksi P3K maupun seleksi CPNS .
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan Tunjangan Kinerja

- Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas PNS

d. Bidang Pemerintahan

- Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan.
- Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

e. Bidang Hukum dan HAM

- Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah
- Tersedianya *database* tentang Produk-produk Hukum baik peraturan daerah dan peraturan wali kota (Perwali)nya.
- Memverifikasi peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

f. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

- Tersedianya sarana dan prasarana yang representative.
- Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- Meningkatkan peran lembaga/ *stake holders* dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama.
- Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi.

g. Penanggulangan Bencana

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana.
- Menciptakan sistem proteksi dalam bencana kebakaran.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam setiap

pembangunan gedung di Kota Sukabumi.

- Perlunya standarisasi gedung/bangunan untuk mengantisipasi bencana/kebakaran.

h. Kebijakan BUMD

a. Perusahaan Daerah Air Minum

- Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi.
- Menekan tingkat kebocoran air.
- PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.

i. Lain-lain

- Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu;
- Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU);
- Pembangunan sarana prasarana pencegah banjir;
- Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau;

4.2.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perumusan isu strategis Kota Sukabumi Tahun 2025 dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2023;
2. Kondisi terkini Tahun 2024;
3. Arah kebijakan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
4. Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat;
5. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025; dan
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka proses penyusunan isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
☐ Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dioptimalkan ☐ Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi belum optimal ☐ Belum berkembangnya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok ☐ Belum optimalnya pembinaan PKL ☐ Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B ☐ Minat masyarakat untuk bertani makin berkurang ☐ Distribusi bibit tanaman hortikultura belum optimal ☐ <i>Urban farming</i> belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan ☐ Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan ☐ Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal	☐ Resesi ekonomi global ☐ Ketahanan pangan dan energi ☐ Transformasi digital	☐ Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ☐ Ketahanan pangan dan energi	Daya saing ekonomi	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
☐ Belum optimalnya manajemen koperasi ☐ Belum optimalnya pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar ☐ Kurangnya promosi produk usaha mikro ☐ Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro ☐ Belum tersedianya database koperasi dan usaha mikro ☐ Investasi sektor industri belum menarik minat investor ☐ Potensi investasi belum digali secara optimal ☐ Rendahnya IKM produktif ☐ Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah ☐ Pemasaran produk IKM yang masih terbatas				
☐ Luas wilayah relatif kecil ☐ Belum optimalnya Kota Sukabumi sebagai PKW		Percepatan pembangunan infrastruktur	Ketimpangan Jabar Selatan-Utara	Dampak PSN dan megaprojek lainnya

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
☐ Adanya disparitas pembangunan infrastruktur ☐ Belum optimalnya pengelolaan air bersih ☐ Belum optimalnya pengelolaan air limbah ☐ Belum disusunnya RDTR ☐ Fasilitas RTH publik yang belum optimal				
☐ Masih adanya RTLH ☐ Permukiman kumuh belum sepenuhnya tertangani ☐ Degradasi lingkungan ☐ Alih fungsi lahan yang terus berlangsung ☐ Belum optimalnya pengelolaan persampahan ☐ Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang ☐ Risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir cukup besar ☐ Belum adanya peralatan untuk mendeteksi bencana	Perubahan iklim	Pengurangan risiko bencana		Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan
☐ Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi goncangan	Arsitektur kesehatan global	☐ Peningkatan kualitas SDM ☐ Kemiskinan ekstrem ☐ Penanganan stunting	☐ Daya saing SDM ☐ Kemiskinan ekstrem dan TPT	Kualitas SDM

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
❑ Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan ❑ Komponen daya beli masyarakat sebagai pembentuk IPM perlu ditingkatkan ❑ Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga terbatas ❑ Angka putus sekolah perlu ditekan ❑ Angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan ❑ Asupan gizi masyarakat perlu ditingkatkan ❑ Angka kesakitan masyarakat perlu ditekan ❑ Terdapat 4 kelurahan yang memiliki angka prevalensi <i>stunting</i> tinggi				
❑ Pelayanan umum di beberapa kecamatan masih belum optimal ❑ Rekomendasi oleh APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti PD ❑ Evaluasi program oleh APIP belum sepenuhnya dilakukan ❑ Belum idelanya jumlah ASN ❑ Penghapusan tenaga honorer		Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi	Inovasi di pemerintahan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
❑ Belum tersedianya data center ❑ Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi ❑ Belum optimalnya pengamanan informasi ❑ Belum semua arsip didigitalisasi ❑ Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral ❑ Partisipasi dan distribusi data dari pengguna/PD terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah				
❑ Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih belum optimal ❑ Konflik sosial masih sering terjadi ❑ Ormas dan LSM masih banyak yang belum tertib administrasi ❑ Masih terdapat anak di bawah umur yang tergabung dalam Ormas dan LSM		Pemilu dan pilkada serentak 2024		Pemilu dan pilkada serentak 2024

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (hasil analisis)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, kemudian berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sesuai dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026, isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;

Kontribusi per sektor lapangan usaha terhadap PDRB Kota Sukabumi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir didominasi oleh perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi. Ketiganya berkontribusi masing-masing lebih dari 10 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi. Bahkan untuk sektor perdagangan kontribusinya mencapai angka di atas 37 persen. Kontribusi ketiga sektor tersebut perlu ditingkatkan untuk menguatkan Kota Sukabumi sebagai pusat kegiatan wilayah.

Di Kota Sukabumi masih terdapat sektor potensial yang perlu dioptimalkan yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif serta pertanian perkotaan. Sebagai kota yang besar di masa kolonial, berbagai peninggalan yang ada di Kota Sukabumi perlu dilestarikan untuk menunjang atau sebagai destinasi obyek wisata. Demikian juga dengan ekonomi kreatif yang selama ini telah dikembangkan. Upaya untuk mengkapitalisasi kedua sektor tersebut perlu untuk lebih digencarkan.

Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karekater Sukabumi yang sudah berupa kota namun luas lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi bagi PDRB dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

2. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya;

Pembangunan proyek strategis nasional yang berada di Kota Sukabumi dan sekitarnya terutama infrastruktur jalan tol dan kereta api akan meningkatkan aksesibilitas. Dengan demikian lalu lintas orang dan barang tentunya juga akan semakin meningkat. Peluang

ini perlu dioptimalkan mengingat Sukabumi dikenal juga sebagai kota transit sehingga daya tarik kota perlu dikembangkan dan direvitalisasi untuk semakin memanjakan pendatang yang transit ataupun melakukan aktivitas di Kota Sukabumi.

Mega proyek yang didanai baik dari Provinsi Jawa Barat maupun dari Kota Sukabumi sendiri juga menjadi pengungkit bagi perkembangan kota. Karena itu, perlu tetap dilakukan pembangunan mega proyek terutama yang dapat menjadi pengungkit perekonomian kota.

3. Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan;

Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi cukup signifikan mengurangi luas permukiman kumuh dari sekitar 139 Ha hingga sekarang tinggal 5 Ha, namun upaya preventif harus tetap dilakukan.

Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.

Kondisi lingkungan yang semakin menurun diperparah dengan risiko bencana yang mengancam Kota Sukabumi. Walaupun Indeks Risiko Bencana Kota Sukabumi masuk kategori menengah namun risiko bencana seperti gempa bumi, longsor, dan banjir cukup tinggi. Sehingga upaya untuk memitigasi bencana harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Sukabumi.

4. Kualitas sumber daya manusia (SDM);

SDM Kota Sukabumi jika dilihat dari indikator IPM sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan IPM

Kota Sukabumi terutama dari komponen harapan lama sekolah. Mengingat komponen ini yang paling rendah kenaikannya.

Walaupun memiliki IPM yang lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun TPT dan Indeks Gini Kota Sukabumi masih lebih baik dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan seperti tingkat produktivitas tenaga kerja yang belum optimal dan merata, terbatasnya lapangan pekerjaan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih belum menjangkau semua kalangan, dan lainnya. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Sukabumi akan terus dilakukan mengingat dinamika yang terjadi saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

5. Inovasi di pemerintahan; dan

Pemerintah Kota Sukabumi telah dianugerahi penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kota terinovatif. Untuk meraih itu, berbagai inovasi yang dihasilkan harus sesuai dengan standar IGA.

Terdapat sejumlah inovasi telah digulirkan Pemerintah Kota Sukabumi di berbagai bidang. Misalnya pada layanan kesehatan ada *homecare*, ambulans sigap, dan puskesmas klinik sore. Di bidang ekonomi, ada program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (kece) untuk membentuk wirausaha baru di kelurahan dan Sukabumi Creative Hub (SCH). Program inovasi lainnya di bidang literasi, rumah singgah di Bandung, pembinaan keagamaan, dan lain sebagainya.

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan.

6. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Tahun 2024 menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia, tak terkecuali di Kota Sukabumi. Pada tahun ini, pemilihan umum

(pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini akan menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak. Bagi penyelenggara mau tak mau harus menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya. Tak hanya bagi penyelenggara, pemilu dan pilkada serentak 2024 ini juga akan menjadi kerja berat bagi partai politik.

Setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, yang perlu diperhatikan adalah dampak pasca pelaksanaan pemilu terutama pilkada, dimana aspirasi masyarakat pasti terbelah sesuai dengan pilihannya masing-masing. Dampak pasca pilkada inilah yang harus menjadi fokus dari pemerintah daerah, untuk itu maka Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Kesbangpol diharapkan selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar dapat mengantisipasi potensi-potensi yang dapat membahayakan atau menggagu kondusifitas di Kota Sukabumi

Berdasarkan rumusan 6 (enam) isu strategis di atas, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan yang disusun mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.15
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
			Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
			Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
			Memberdayakan pelaku UMKM
	Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan		Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok
			Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Meningkatkan obyek daya tarik wisata
		Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	Meningkatkan pemasaram wisata
			Memanfaatkan dan melindungi HKI

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
			Meningkatkan literasi masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
			Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
			Meningkatkan penempatan tenaga kerja
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jalan kota
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
			Meningkatkan pengelolaan persampahan
			Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	Mengurangi RTLH
			Mengurangi luas kawasan kumuh

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
		Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan kerukunan umat beragama
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
			Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
			Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
			Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
			Meningkatkan transparansi pemerintahan

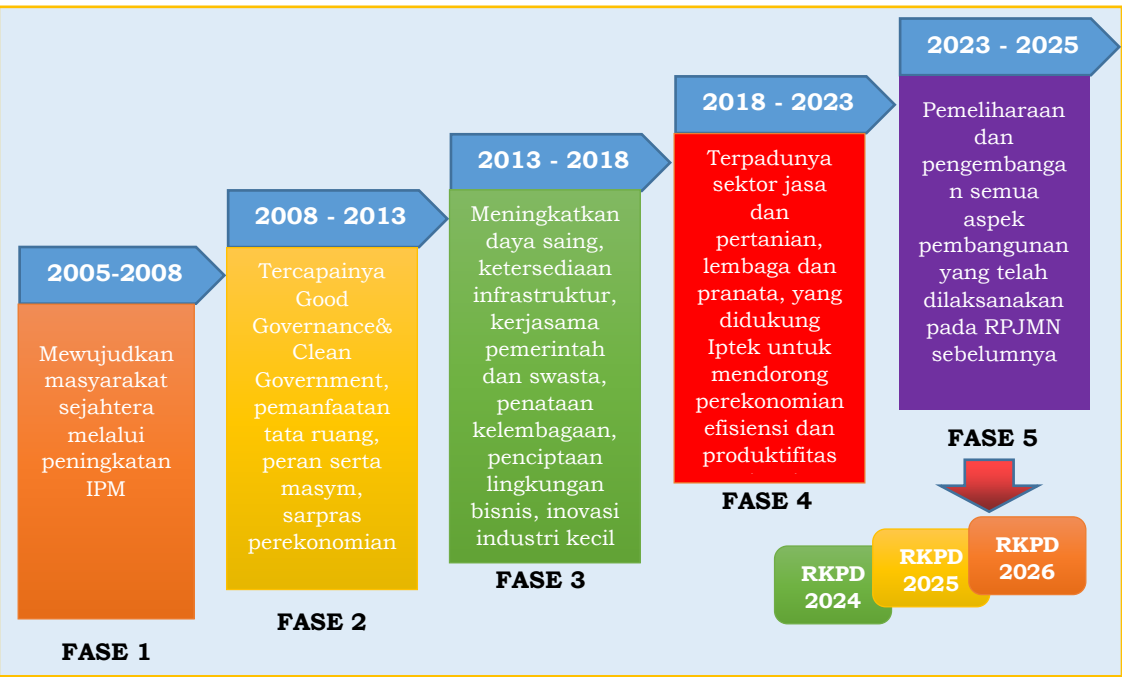
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
			Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi
		Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi
			Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (hasil analisis)

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2023-2025 merupakan tahap pembangunan kelima atau terakhir dari RPJPD Kota Sukabumi tahun 2005 - 2025 yang memiliki tema **“Pemeliharaan dan Pengembangan Semua Aspek Pembangunan yang Telah Dilaksanakan pada RPJM sebelumnya”**. Tema pembangunan tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RPD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD tahun 2024 - 2026. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.10
Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke dalam RKPD



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (hasil analisis)

Rumusan arah kebijakan untuk merasionalkan pilihan strategi harus memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.11
Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2024-2026



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (hasil analisis)

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan RPD. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, adalah:

“Menguatkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan”

Tema di atas memiliki makna bahwa tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan dimana kepala daerah hasil pilkada sudah diketahui. Situasi transisi ini perlu ditangani secara *smooth* dengan mengesampingkan perbedaan di saat kontestansi pilkada. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus lebih inklusif dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Pemerataan Pembangunan untuk mendukung Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui upaya penciptaan kondusifitas

serta percepatan pembangunan ekonomi sehingga dapat mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan sasaran dan isu strategis RPD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2025 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.16
Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
• Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dioptimalkan	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa
		Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	
• Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi belum optimal			Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	
• Belum berkembangnya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
dan harga bahan pokok				
ð Belum optimalnya pembinaan PKL				
ð Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B				
ð Minat masyarakat untuk bertani makin berkurang				
ð Distribusi bibit tanaman hortikultura belum optimal				
ð <i>Urban farming</i> belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan				
ð Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan				
ð Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal				
ð Belum optimalnya manajemen koperasi				
ð Belum optimalnya pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar				
ð Kurangnya promosi produk usaha mikro				
ð Belum optimalnya fasilitasi				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
perizinan bagi usaha mikro				
• Belum tersedianya database koperasi dan usaha mikro				
• Investasi sektor industri belum menarik minat investor			Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	
• Potensi investasi belum digali secara optimal				
• Rendahnya IKM produktif				
• Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah				
• Pemasaran produk IKM yang masih terbatas				
• Luas wilayah relatif kecil	Dampak PSN dan megaprojek lainnya	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan Kondusifitas Kota
• Belum optimalnya Kota Sukabumi sebagai PKW				
• Adanya disparitas pembangunan infrastruktur				
• Belum optimalnya pengelolaan air bersih				
• Belum optimalnya pengelolaan air limbah				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
• Belum disusunnya RDTR				
• Fasilitas RTH publik yang belum optimal				
• Masih adanya RTLH	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	
• Permukiman kumuh belum sepenuhnya tertangani			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	
• Degradasi lingkungan				
• Alih fungsi lahan yang terus berlangsung				
• Belum optimalnya pengelolaan persampahan				
• Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang				
• Risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir cukup besar		Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	
• Belum adanya peralatan untuk mendeteksi bencana				
• Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih belum optimal	Pemilu dan pilkada serentak 2024	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Peningkatan Kondusifitas Kota
• Konflik sosial masih sering terjadi				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
• Ormas dan LSM masih banyak yang belum tertib administrasi				
• Masih terdapat anak di bawah umur yang tergabung dalam Ormas dan LSM				
• Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi goncangan	Kualitas SDM	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	
• Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan				
• Komponen daya beli masyarakat sebagai pembentuk IPM perlu ditingkatkan				
• Angka putus sekolah perlu ditekan				
• Angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan				
• Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga terbatas		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
• Asupan gizi masyarakat perlu ditingkatkan		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	
• Angka kesakitan masyarakat perlu ditekan				
• Terdapat 4 kelurahan yang memiliki angka prevalensi <i>stunting</i> tinggi				
• Pelayanan umum di beberapa kecamatan masih belum optimal	Inovasi di pemerintahan	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif
• Rekomendasi oleh APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti PD		Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	
• Evaluasi program oleh APIP belum sepenuhnya dilakukan			Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	
• Belum idealnya jumlah ASN				
• Penghapusan tenaga honorer				
• Belum tersedianya data center				
• Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi				
• Belum optimalnya pengamanan informasi				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
• Belum semua arsip didigitalisasi				
• Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral				
• Partisipasi dan distribusi data dari pengguna/PD terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah				

Sumber: Analisis Bappeda, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kondusifitas Kota

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka pada Tahun 2025 akan terjadi peralihan kepemimpinan dari Pj.Wali Kota kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Kondisi tersebut tentu harus disiapkan sedemikian rupa supaya peralihan tersebut bisa dilaksanakan dengan lancar dan tetap bisa menjaga stabilitas Kota Sukabumi yang selama ini sudah cukup terjaga dengan baik. Kondusifitas dan stabilitas kota harus tetap dijaga dari berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan dan politik. Hal tersebut agar keberlangsungan pembangunan tetap bisa terjaga dan masyarakat dapat melakukan aktivitas dan kreatifitas sebagaimana biasanya.

2. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa

Sesuai dengan Visi RPJPD bahwa Kota Sukabumi sebagai pusat peragangan dan jasa yang berkualitas, maka kedua sektor ini harus terus menjadi prioritas dalam pembangunan. Sektor perdagangan dapat dioerkuat juga dengan optimalisasi sektor pariwisata yang

nantinya tentu akan berdampak pada meningkatkan sektor perdagangan. Sektor jasa di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya tentu harus tetap menjadi prioritas, karena memang itu sebuah keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh Kota Sukabumi.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat, untuk itu maka seluruh jenis pelayanan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi birokrasi yang juga harus senantiasa di implementasikan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dimana didalamnya terdapat pelayanan publik maka harus dilakukan secara kreatif dengan berbagai inovasi di perangkat daerah sehingga dapat meningkatkan indeks reformasi birokrasi serta juga indeks inovasi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain prioritas pembangunan daerah, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan juga program prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program prioritas pembangunan daerah disajikan berdasarkan tujuan, sasaran dan *outcome* dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dengan sifat program prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme *cascading* tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme *cascading*

dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan *cascading* yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 41 program. Program prioritas yang dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 090-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17
Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumindag
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumindag
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskumindag
		Meningkatnya promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskumindag
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	Disporapar

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
			Hak Kekayaan Intelektual	
		Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
			Pemasaran Pariwisata	Disporapar
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Terpenuhinya SPM pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
		Meningkatnya literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Dispusip
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya SPM kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan		
		Meningkatnya kepesertaan JKN		
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dalduk KB P3A
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas wilayah	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan sanitasi	Pengelolaan Persampahan	DLH
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUTR
			Kawasan Permukiman	DPUTR

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Damkar
		Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Penanggulangan Bencana	BPBD
		Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Penanganan Bencana	Dinsos
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
		Meningkatnya kapasitas ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Perekonomian dan Pembangunan	Setda-BPBJ
		Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda-Organisasi
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda-Hukum
			Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda

Sumber: RPD Kota Sukabumi 2024-2026

Prioritas pembangunan dan program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dn Program
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	1) Pelayanan Penanaman Modal 2) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 4) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 5) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6) Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Dampak PSN dan megaprojek lainnya	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	1) Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3) Pemasaran Pariwisata
3	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	1) Penyelenggaraan Jalan 2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3) Pengelolaan Persampahan 4) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5) Perumahan dan Kawasan 6) Permukiman Kumuh 7) Kawasan Permukiman 8) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			9) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 10) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 11) Penanggulangan Bencana 12) Penanganan Bencana
4	Kualitas SDM	Peningkatan Kondusifitas Kota	1) Pengelolaan Pendidikan 2) Pembinaan Perpustakaan 3) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4) Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6) Penempatan Tenaga Kerja
5	Inovasi di pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	1) Penelitian dan Pengembangan Daerah 2) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Pengelolaan Keuangan Daerah 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia 6) Perekonomian dan Pembangunan 7) Penyelenggaraan Pengawasan 8) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 10) Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 11) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 12) Aplikasi Informatika 13) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6	Pemilu dan pilkada serentak 2024	Peningkatan Kondusifitas Kota	1) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

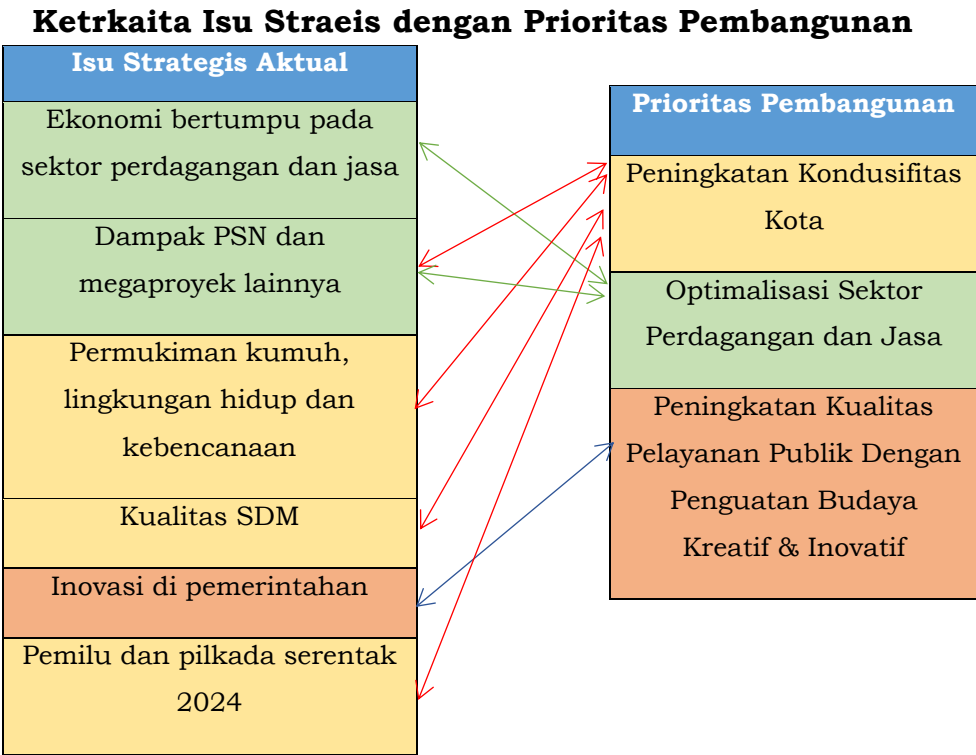
ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			2) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka apabila kita sandingkan antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dapat kita petakan diakomodir pada program prioritas yang mana, sehingga kita dapat memastikan bahwa isu strategis dan prioritas pembangunan yang bermula dari berbagai permasalahan dan kondisi terkini Kota Sukabumi dapat diselesaikan melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2025.

Apabila kita gambarkan lebih detail, maka keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.12



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi 2024 (diolah)

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan, maka ketiganya harus bisa disandingkan dan bisa terlihat jelas arah kebijakan mana yang menjadi dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan tersebut. Berikutnya dalam proses implementasi prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan bisa sesuai dengan harapan awal ketika proses penyusunan perencanaan disusun dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan hubungan antara prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan dengan 36 (tiga puluh enam) arah kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 4.19
Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Priotas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
1	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Memberdayakan pelaku UMKM
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Memanfaatkan dan melindungi HKI
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatkan obyek daya tarik wisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan pemasaram wisata
		Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
		Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan literasi masyarakat
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
		Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
2	Peningkatan Kondusifitas Kota	Penyelenggaraan Jalan	Meningkatkan kualitas jalan kota
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Mengurangi luas kawasan kumuh
		Kawasan Permukiman	Mengurangi RTLH
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatkan pengelolaaan keragaman hayati
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatkan kerukunan umat beragama

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
		Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
		Penanganan Bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan transparansi pemerintahan
		Penyelenggaraan Pengawasan	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Aplikasi Informatika	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi
			Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
			Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Pembangunandaerah Kota Sukabumi Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program prioritas pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus dan terarah, maka telah ditetapkan tema pembangunan untuk setiap tahunnya. Tema tersebut tentunya harus bisa sinergi dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan agar dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Selanjutnya akan digambarkan sinkronisasi antara arah kebijakan dengan fokus/tema pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Tema Pembangunan Tahun 2024-2026 per tahun

NO	ARAH KEBIJAKAN	TEMA PEMBANGUNAN		
		Tahun 2024: Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan	Tahun 2025: Memperkuat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Tahun 2026: Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
1	Meningkatkan pelayanan penanaman modal	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
2	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
3	Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
4	Memberdayakan pelaku UMKM	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
5	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
6	Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
7	Memanfaatkan dan melindungi HKI	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
8	Meningkatkan obyek daya tarik wisata	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
9	Meningkatkan pemasaran wisata	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026

NO	ARAH KEBIJAKAN	TEMA PEMBANGUNAN		
		Tahun 2024: Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan	Tahun 2025: Memperkuat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Tahun 2026: Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
10	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
11	Meningkatkan literasi masyarakat	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
12	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
13	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
14	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
15	Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
16	Meningkatkan kualitas jalan kota	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
17	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
18	Meningkatkan pengelolaan persampahan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026

NO	ARAH KEBIJAKAN	TEMA PEMBANGUNAN		
		Tahun 2024: Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan	Tahun 2025: Memperkuat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Tahun 2026: Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
19	Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
20	Mengurangi luas kawasan kumuh	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
21	Mengurangi RTLH	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
22	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
23	Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
24	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
25	Meningkatkan kerukunan umat beragama	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
26	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
27	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026

NO	ARAH KEBIJAKAN	TEMA PEMBANGUNAN		
		Tahun 2024: Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan	Tahun 2025: Memperkuat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Tahun 2026: Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
28	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
29	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
30	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
31	Meningkatkan transparansi pemerintahan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
32	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
33	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
34	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
35	Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
36	Implementasi pemanfaatan inovasi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya pemerintah daerah sangat membutuhkan saran masukan dari berbagai pihak terutama dari pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saran masukan dari DPRD berupa pikir senantiasa disampaikan kepada Pemerintah daerah melalui Bappeda setiap satu minggu sebelum dilaksanakannya Musrenbang Tingkat Kota. Saran masukan tersebut tentunya harus seiring dengan isu strategis dan program prioritas daerah yang sudah ditetapkan dalam RPD. Keterkaitan tersebut digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.21
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan Kondusifitas Kota	1. Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW. 2. Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria/Aturan yang berlaku. 3. Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria/Aturan yang berlaku. 4. Untuk segera membuat <i>Master plan Drainase</i> sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir. 5. Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi. 7. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi. 8. Pendataan RTLH serta penaggulangan nya. 9. Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan. 10. Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). 11. Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). 12. Melakukan Pendataan dan Mentertibkan Hak Kepemilikan Tanah yang belum Bersertifikat. 13. Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		14. Memberikan Bantuan Operasional kepada para Petugas Pos Yandu Balita dan Lansia. 15. Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung/Tempat peninggalan Sejarah/Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran. 16. Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah 17. Tersedianya <i>database</i> tentang Produk-produk Hukum baik peraturan daerah dan peraturan wali kota (Perwali)nya. 18. Memverifikasi peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. 19. Tersedianya sarana dan prasarana yang representative. 20. Meningkatkan kerukunan hidup beragama. 21. Meningkatkan peran lembaga/ <i>stake holders</i> dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama. 22. Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi. 23. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana. 24. Menciptakan sistem proteksi dalam bencana kebakaran. 25. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam setiap pembangunan gedung di Kota Sukabumi. 26. Perlunya standarisasi gedung/bangunan untuk mengantisipasi bencana/kebakaran. 27. Penanganan <i>Covid-19</i> termasuk penyediaan APD, tempat tidur, pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pengadaan mobil siaga desa; 28. Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu; 29. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU); 30. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegah banjir; 31. Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau;
2	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	1) Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat. 2) Melakukan Koordinasi dengan pihak Perusahaan dalam penentuan Hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		3) Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi. 4) Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat. 5) Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok. 6) Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). 7) Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola <i>typing fee</i>. 8) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM. 9) Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM. 10) Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan. 11) Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi. 12) Menyediakan Mall pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di DPMPTSP. 13) Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan. 14) Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata. 15) Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri. 16) Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan melalui Sukabumi <i>Great sale</i>. 17) Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri 18) Pengembangan SDM dan profesionalismer pariwisata. 19) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 20) Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat. 21) Peningkatan keanekaragam industri tanaman pertanian. 22) Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal. 23) Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi. 24) Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok. 25) Membuka dan memperluas akses pemasaran baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		26) Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional. 27) Perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern. 28) Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi. 29) Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar tradisional secara optimal, terutama terkait jaringan instalasi listrik di Pasar-Pasar tradisional secara keseluruhan. 30) Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional. 31) Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional. 32) Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha. 33) Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 34) Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha- usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi. 35) Peningkatan kerja sama daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang secara infrastruktur memadai. 36) Peningkatan pembekalan Calon Transmigran yang akan dikirim dengan pelatihan yang memadai. 37) Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat. 38) Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi. 39) Menekan tingkat kebocoran air. 40) PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	1) Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 2) Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah. 3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		PAD. 4) Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen. 5) Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara <i>online</i>. 6) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. 7) Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD. 8) Perlunya ada penambahan Formasi / Pengangkatan Guru Agama baik melalui Seleksi P3K maupun seleksi CPNS . 9) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan Tunjangan Kinerja 10) Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas PNS 11) Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan. 12) Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan. 13) Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Dalam melaksanakan program prioritas pembangunan yang telah ditentukan, maka harus dilakukan mapping dengan program pembangunan yang dilaksanakannya serta dikaitkan dengan sasaran, indikator serta strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Kesesuaian sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta pagu anggaran pada perangkat daerah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.22
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 1 “Peningkatan Kondusifitas Kota”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan Kondusifitas Kota	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	86,00	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jalan kota	Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	* Persen * Persen	* 86	7,878,398,545	DPUTR
									Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	* Persen	83.87		
							Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	100	2,117,811,612	DISHUB
							Meningkatkan pengelolaan persampahan	Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	100	1,527,901,450	DLH
							Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	58.73	2,108,111,500	DPUTR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	Mengurangi RTLH	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	Persen	33.88	861,930,800	DPUTR
							Mengurangi luas kawasan kumuh	Kawasan Permukiman	Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	20	3,110,568,900	DPUTR
						Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	564,660,000	DLH
							Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	indeks RTH	m2/orang	26	297,887,000	DLH
		Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Persen	75,40	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persen	100	2,662,859,500	SATPOLPP DAMKAR
							Meningkatkan kerukunan umat beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan	persen	100	424,431,000	KESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Diantisipasi	persen	100	3,039,197,600	KESBANGP OL
						Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir WS Kewenangan Kota	Persen	67.03	2,754,684,000	DPUTR
							Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	Penanggulanga n Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Poin	56	522,965,500	BPBD

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	405,475,400	DINSOS
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,58	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	persen	100	16,690,645,700	DISDIKBUD
							Meningkatkan literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	71	625,055,120	DISPUSIP
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,33	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	persen	100	39,829,956,500	DINKES
									Prevalensi stunting pada balita	persen	5.75		
									Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	persen	100		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	persen	18.16		
									Persentase kepesertaan JKN	persen	96.6		
							Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	persen	65.5	356,381,400	DALDUKKB P2A
												85,778,921,527	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Tabel 4.23
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 2 “Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,00	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan pelayanan penanaman modal	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	82	310,251,300	DPMPSTP
							Meningkatkan kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1,259,851,250	DISKUMIN DAG
							Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Dilaksanakan	Persen	100	74,000,000	DISKUMIN DAG
							Memberdayakan pelaku UMKM	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0.02	1,752,283,950	DISKUMIN DAG BAZNAS Shopee Tokopedia

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	6.38	80,050,500	DISKUMIN DAG
							Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Persen	100	556,669,250	DKP3
		Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	30,93	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Meningkatkan obyek daya tarik wisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	19	96,947,500	DISPORAP AR
							Meningkatkan pemasaram wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	21.9	325,320,000	DISPORAP AR
						Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang	Memanfaatkan dan melindungi HKI	Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Event	6	231,835,500	DISPORAP AR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						perekonomian							
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	34,001	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	82	432,200,000	DISNAKER
							Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	87.5	85,000,000	DISNAKER
												5,204,409,250	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Tabel 4.24

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 3 “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif”**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73,00	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar	Persen	100	2,944,254,000	BAPPEDA
									Persentase Pencapaian IKU	Persen	100		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Tingkat Kota	Persen	100	3,874,089,050	BAPPEDA
							Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	97.66	15,504,051,272	BPKPD
								Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	8	1,157,321,334	BKPSDM

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan transparansi pemerintahan	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	77	968,825,000	INSPEKTORAT
									Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	81		
							Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	Persen	100	541,978,000	SETDA
									Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	Persen	100		
									Persentase Penyelenggaraan Pengadaan yang Dilaksanakan secara Online	Persen	100		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	41,077,960,834	
									Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Menenuhi Aspek Penilaian	Persen	90		
									Indeks Pelayanan Publik	Persen	3.6		
								Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Persen	100	12,137,393,419	SETDA
									Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	90		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100		
								Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	15,806,345,000	SETWAN
								Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,845,192,200	KEC. CIKOLE
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,409,187,900	KEC. GUNUNG PUYUH
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,287,712,550	KEC. CITAMIAN G
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,628,793,550	KEC. WARUDOY ONG
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,174,550,800	KEC. BAROS

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,505,255,400	KEC. LEMBURS ITU
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,192,612,400	KEC. CIBEURE UM
								Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	95	398,762,000	DISKOMIN FO
								Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan adminisrai kependudukan	Persen	100	148,642,500	DISDUKC APIL
		Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predika t	Inovatif	Penguatan ekosistem inovasi	Meningkatkan fasilitas dan pendampingan litbang serta inovasi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	1,019,797,000	BAPPEDA
							Meningkatkan pemberdayaan masyarakat						

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dalam inovasi						
							Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi						
						Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Implementasi pemanfaatan inovasi						
Jumlah												105,622,724,209	

Sumber: Analiss Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024

4.2.6 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2025

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan Kota Sukabumi harus saling berkaitan dan saling mengisi satu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa Barat, dan isu strategis Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.25
Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Sukabumi Tahun 2025

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional/Provinsi	Isu Strategis Aktual Kota Sukabumi
Perpindahan IKN	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Dampak PSN dan megaprojek lainnya
Ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
Bonus demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas SDM
Konektivitas dan infrastruktur dasar	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Dampak PSN dan megaprojek lainnya

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional/Provinsi	Isu Strategis Aktual Kota Sukabumi
Perubahan iklim dan ketahanan bencana	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan
Konflik sosial	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pemilu dan pilkada serentak 2024
Desentralisasi dan otonomi daerah	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	Inovasi di pemerintahan

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Selain isu strategis, maka prioritrs pembangunan juga harus senantiasa sinergis dan selaras untuk memastikan bhwa prioritas pembangunan yang dilakukan Kota Sukabumi selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dan Nasional sehingga terjadi kolaborasi pembangun di setiap wlayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 4.26
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
			Pengembangan Pariwisata
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.	Peningkatan Kondusifitas Kota	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama
			Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
			Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan,

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
			serta Pengembangan Pariwisata
			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Kondusifitas Kota	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Sukabumi dengan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.27
Persandingan Keselarasan Sasaran Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2025

Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2025		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025	
S1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	S4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2025		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025	
S1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S1.3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
S1.4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
S1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
S2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan daerah	S1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
S2.3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	S2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
S2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	S5	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
S3.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
S3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
S3.3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
		S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2025		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025	
S4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
S4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
S4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	S9	Meningkatnya inovasi daerah

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Apabila dilihat dari keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional, indikator prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan indikator prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.28
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi, Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru	2	Asia Power Index (Military Capability)		Indeks Rasa Aman
		3	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		
		4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		Indeks Rasa Aman

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
		5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)		
		6	Indeks Ketahanan Energi		
		7	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)		
		8	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
		9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
		10	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global		
		11	Indeks Ekonomi Hijau		
		12	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		13	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
		14	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		16	Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	17	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	ProporsikreditUMKM terhadaptotalkredit (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
		18	Rasio Kewirausahaan (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		19	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		
		20	Rasio PDB Pariwisata (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB(%)	Indeks Kota Kreatif
		21	Devisa Pariwisata (miliar USD)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB(%)	Indeks Kota Kreatif
		22	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		Indeks Kota Kreatif
		23	Aset Perbankan/PDB (%)		
		24	Aset Dana Pensiun/PDB (%)		
		25	Aset Asuransi/PDB (%)		
		26	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
		27	Total Kredit/PDB (%)		
		28	Inklusi Keuangan (%)		

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.	29	Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) c. Harapan lama sekolah (tahun)	a. Rata-rata Lama Sekolah b. Rata-rata Lama Sekolah c. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	a. Indeks Pendidikan b. Indeks Pendidikan c. Indeks Pendidikan
		30	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Rata-rata Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
		31	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
		32	Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	b. Indeks Reformasi Birokrasi	b. Indeks Reformasi Birokrasi

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
		33	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
		35	Usia Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		36	Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	a. Angka Harapan Hidup (Tahun) b. Prevalensi Stunting (%)	a. Indeks Keluarga Sehat Sukabumi b. Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		37	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
		39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	Indeks Pendidikan
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	41	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sektor industri (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		42	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		43	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan(%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		44	Biaya Logistik (% PDB)		

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	45	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)		
		46	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		47	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)		
		48	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)		
		49	Persentase desa mandiri (%)		
		50	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Persentase rumah tangga hunian layak (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.	51	Return on Asset (ROA) BUMN (%)		
		52	Indeks Integritas Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		53	Indeks Materi Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		54	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Reformasi Birokrasi
		55	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		56	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		57	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	IndeksReformasi Birokrasi
		58	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		
		59	Tingkat Inflasi (%)		

No	Prioritas Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	60	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
		61	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	IndeksReformasi Birokrasi (Poin)	IndeksReformasi Birokrasi
		62	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Indeks Risiko bencana (Poin)	Indeks Rasa Aman

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Kota Sukabumi telah mensinkronkan program-program pembangunan daerah Tahun 2024 untuk pencapaian target tersebut. Berikut program-program pembangunan tersebut.

Tabel 4.29
Perbandingan Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025
dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming)
Pembangunan Nasional Tahun 2025

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	
- Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. - Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. - Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pengelolaan Pendidikan 8. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	
- Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. - Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	
- Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. - Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. - Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. - Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan. - Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. - Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. - Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 7. Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. - Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	
- Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. - Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. - Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. - Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	
- Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. - Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. - Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. - Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. - Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. - Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua - Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. - Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. - Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. - Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
- Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. - Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. • Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. • Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	
Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	
• Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. • Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. • Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	
- Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. - Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. - Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 2. Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	
Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengelolaan Persampahan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. - Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. - Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	
- Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. - Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	
- Target 15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. - Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	
Tujuan 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	
- Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. - Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak. - Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. - Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. - Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. - Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. - Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. - Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 3. Program Kepegawaian Daerah 4. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. - Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. - Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. - Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. - Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 8 (delapan) prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut, maka telah dilakukan pemetaan pencapaian prioritas nasional berdasarkan program perencanaan pembangunan yang bisa mendukung pencapaiannya. Lebih jelas pemetaan tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.30
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)										
1	Indeks Demokrasi Indonesia	1) memperkokoh ideologi Pancasila	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	Peren	100	424,431,000	KESBANG POL
		2) penguatan demokrasi			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diantisipasi	Peren	100	3,039,197,600	KESBANG POL
		3) penegakan			Peningkatan Ketenteraman	Persentase pemenuhan standar	Peren	100	2,162,885,500	KESBANG POL

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		hak asasi manusia			dan Ketertiban Umum	pelayanan minimal trantibmas				
PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru										
2	1) Asia Power Index (Military Capability)	1) penguatan pertahanan negara	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan			424,431,000	KESBANG POL
3	2) Asia Power Index (Diplomatic Influence)	2) pembangunan dan pengembang								

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		an industri pertahanan								
4	3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	3) penguatan keamanan negara			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas			2,162,885,500	SatpolPP
5	4) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	3) profesionalisme dan pelayanan kepolisian								

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	5) Indeks Ketahanan Energi	4) penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi								
7	6) Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	5) keamanan siber, sandi, dan sinyal			Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase keterhubungan jaringan sandi		82.5	125,041,450	Diskominfo
8	7) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	6) pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif								

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	8) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7) penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Person	85.3	9,978,398,545	DPUTR
10	9) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	8) Kerja Sama Pembangunan Internasional								
11	10) Indeks Ekonomi Hijau	9) Penguatan diplomasi ekonomi								
12	11) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	10) swasembada pangan			Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan	Persentase ketersediaan pangan pokok	Person	100	556,669,250	DKP3

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					pangan masyarakat					
13	12) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	11) Swasembada Energi			Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah	Person	100	1,443,901,500	DLH
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Person	58.09	2,108,111,500	DPUTR
14	13) Indeks Pengelolaan Keanekaragam	11) swasembada air			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks RTH	M2/orang	26	297,887,000	DLH

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	aman Hayati				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS	Person	57.42	2,954,684,000	DPUTR
15	14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	12) pengembangan ekonomi syariah			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	564,660,000	DLH
16	15) Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%)	13) ekonomi digital			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Person	19	96,947,500	DIPORAPAR

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kumulatif (%)				Hak Kekayaan Intelektual					
		14) ekonomi hijau								
		15) ekonomi biru								
PN.03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi										
17	1) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	(1) melanjutkan pembangunan infrastruktur,	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Peningkatan Kondusifitas Kota	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase saran perdagangan yang ditingkatkan	Person	80	1,259,851,250	DISKUMI NDAG

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	2) Rasio Kewirausahaan (%)	(2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Person	0.02	1,752,283,950	DISKUMI NDAG
19	3) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	(3) penguatan koperasi,			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Person	6.38	80,050,500	DISKUMI NDAG
20	4) Rasio PDB Pariwisata (%)	(4) mengembangkan industri kreatif, serta			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Person	19	96,947,500	DIPORAPAR

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Hak Kekayaan Intelektual					
21	5) Devisa Pariwisata (miliar USD)	(5) pendalaman sektor keuangan.			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	21.9	325,320,000	DIPORAPAR
22	6) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)				Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Persen	19	96,947,500	DIPORAPAR
23	7) Aset Perbankan/ PDB (%)									
24	8) Aset Dana									

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pensiun/PDB (%)									
25	9) Aset Asuransi/PDB (%)									
26	10) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)									
27	11) Total Kredit/PDB (%)									
28	12) Inklusi Keuangan (%)									
PN.04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.										

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1) Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	1) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Person	100	16,690,645,700	Disdikbud
30	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	2) Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi,	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Person	100	16,690,645,700	Disdikbud
31	c. Harapan lama sekolah (tahun)	3) Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional,	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Person	100	16,690,645,700	Disdikbud

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	4) Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas,	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Person	100	16,690,645,700	Disdikbud
33	3) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	5) Meningkatkan Prestasi Olahraga,	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Raihan Medali pada Event Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional	medali	25	2,321,050,450	Dinkes

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	4) Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global		Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Person	100	16,690,645,700	Disdikbud
35	5) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Person	82	432,200,000	Disnaker

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Person	82	432,200,000	Disnaker
37	7) Usia Harapan Hidup (tahun)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Person	92	37,958,209,000	Dinkes

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	8) Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Person	92	37,958,209,000	Dinkes
39	9) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Person	92	37,958,209,000	Dinkes

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kesehatan Masyarakat					
40	10) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Person	92	37,958,209,000	Dinkes
41	11) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Usia Nikah Pertama (Tahun)	Tahun	21	356,381,400	Dalduk KBP3A
42	12) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota	Person	80	152,527,000	Dalduk KBP3A

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					AN PEREMPUAN					
PN.05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri										
43	1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	(1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Dilaksanakan	Perse n	100	74,000,000	DISKUMI NDAG

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	(2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional;	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/ Kota	Person	4.05	1,106,351,000	DISKUMINDAG
45	3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	(3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mendapatkan Legalitas Usaha	Person	100	75,550,000	DISKUMINDAG
46	4) Biaya Logistik (% PDB)									

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PN.06 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan										
47	1) Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	(1) membangun desa dan membangun dari desa	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Persen	92	37,958,209,000	Dinkes
48	2) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	(2) pemerataan ekonomi;	yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	87.5	85,000,000	Disnaker

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	3) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	(3) memberantas kemiskinan.	yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	19	96,947,500	DISPORAPAR
50	4) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)									

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	5) Persentase desa mandiri (%)		Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa							
52	6) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)		yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Peningkatan Kondusifitas Kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	Person	1.36	861,930,800	DPUTR
PN.07 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.										

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	1) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	1) reformasi politik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Person	100	18,252,597,200	Sekretariat DPRD
54	2) Indeks Integritas Nasional	2) reformasi hukum	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Person	100	11,445,400,436	Sekretariat Daerah
55	3) Indeks Materi Hukum	3) reformasi tata kelola pemerintahan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Person	100	11,445,400,436	Sekretariat Daerah

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	4) Indeks Pelayanan Publik	4) pencegahan dan pemberantasan narkoba	Penguatan SistemPerlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	Perse n	100	424,431,000	KESBANG POL
57	5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5) penanggulangan judi dan penyelundupan	Penguatan SistemPerlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	Perse n	100	424,431,000	KESBANG POL
58	6) Indeks Persepsi Korupsi	6) perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan	Penguatan SistemPerlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Perse n	82	432,200,000	Disnaker

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		keamanan insani								
59	7) Indeks Pembangunan Hukum	7) penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	80	1,259,851,250	Diskumin dag
60	8) Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)			Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	Persen	100	541,978,000	Setda

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	9) Tingkat Inflasi (%)			Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	Persentase	100	541,978,000	Setda
PN.08 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur										
62	1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persentase	100	16,690,645,700	Dinas Pendidikan dan kebudayaan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	2) Melestarikan budaya	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	Person	100	424,431,000	KESBANG POL
64	3) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	3) Penanganan bencana	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Poin	0.57	522,965,500	BPBD

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATU AN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	Person	100	405,475,400	Dinas sosial
JUMLAH TOTAL									372,001,728,617	

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2024

4.2.7 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Pada dasarnya tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan penataan ruang Daerah yang produktif, aman, nyaman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada bidang Pendidikan, Kesehatan, pariwisata, perdagangan dan jasa.

4.2.7.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota

Kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

1. perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan lainnya secara optimal;
2. peningkatan aksesibilitas dan transportasi; dan
3. peningkatan kualitas

Pusat-pusat Pelayanan yang direncanakan di Daerah meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), Pusat pelayanan Daerah ditetapkan di 2 lokasi yaitu pusat kota di Kecamatan Cikole dan Kecamatan Cibeureum. Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan pusat pemerintahan. Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2042 adalah Pusat Pelayanan Pusat Kota Cikole dan Cibeureum. Pusat Pelayanan Pusat Kota melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Utara, sedangkan Pusat pelayanan Babakan melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Selatan;
 2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Sub pusat pelayanan kota terdiri 5 (lima) sub pusat pelayanan kota yang dikembangkan yaitu:
 - a. SPPK di Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh;
 - b. SPPK di Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang;
-

- c. SPPK di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong;
 - d. SPPK di Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros; dan
 - e. SPPK di Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu.
3. Pusat Lingkungan (PL), merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

4.2.7.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Daerah meliputi:

1. pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan Wilayah utara kota;
2. Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
3. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
4. pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana; dan
5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4.2.7.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:

1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan strategis sosial budaya; dan
3. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan ini terdiri atas 3 (tiga) kawasan yaitu:

- 1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang bertujuan untuk:
 - a) mengembangkan Kawasan agrowisata dan Kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;
 - b) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah; dan

- c) memberikan Insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan Kawasan strategis ekonomi.
- 2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, yang bertujuan untuk:
 - a) mengembangkan Kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan
 - b) mengembangkan Kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
- 3) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk:
 - a) mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang yang memiliki fungsi ekologis tinggi; dan
 - b) mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang.

Secara rinci kebijakan pembangunan kewilayahan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.31
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Kota Sukabumi
Tahun 2025

No.	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
1.	KSK I Pertumbuhan Ekonomi KSK II Sosial Budaya KSK III Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	KSK I Pertumbuhan Ekonomi : a. Kecamatan Cibeureum b. Baros c. Lembursitu d. Warudoyong KSK II Sosial Budaya a. Kecamatan Gunungpuyuh b. Kecamatan Warudoyong c. Kecamatan Citamiang	1. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan berskala regional; 2. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; 3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana kota.	1. pengembangan Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi a. menetapkan kawasan pusat kota dan kawasan selatan kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional; dan b. menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal serta mendorong masuknya investasi.	Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek pertumbuhan ekonomi a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kecamatan Cibeureum (Kelurahan Babakan) dan Jl. Lingkar Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek social budaya a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasam Pusat Kota Sukabumi (Kecamatan

No.	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
		d. Kecamatan Cikole e. Kecamatan Cibeureum KSK III Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup : a. Kecamatan Gunungpuyuh b. Kecamatan Cikole c. Kecamatan Baros d. Kecamatan Lembursitu		2. pengembangan Kawasan Strategis sosial budaya a. mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan b. mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. pengembangan Kawasan Strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup a. Mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang	Cikole) dan Pusat Pemerintahan baru di Kecamatan cibeureum b. Penataan pedestrian dan jalur hijau, pembangunan fasilitas parkir bersama, dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Pusat Kota Sukabumi (Kecamatan Cikole) dan Pusat Pemerintahan baru di Kecamatan Cibeureum Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sungai Cipelang

No.	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
				yang memiliki fungsi ekologis tinggo; dan b. Mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cimentiri dan hulu Sungai Cipelang	(Kecamatan Gunungpuyuh) dan Kawasan Sungai Cimentiri (Kelurahan Cikundul dan Situmekar)

Sumber: Hasil Analisis Bappeda

Secara definisi pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan pada BAB II, masih ditemukan SPM yang memang masih belum tercapai atau belum optimal dalam implementasinya di lapangan. Hal tersebut disebabkan berbagai hal seperti adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana pendukung serta tentunya sumber daya manusia yang juga mengalami keterbatasan atau difokuskan pada hal lain yang sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pencapaian target SPM tahun 2024 perlu dilakukan berbagai strategi agar SPM ini bisa terlaksana dengan baik bahkan bisa mencapai target secara keseluruhan. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.27 berikut.

Tabel 4.32
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 s.d 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
SPM PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 Tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah WNI usia 7-15 Tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan Dasar	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WNI usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
SPM KESEHATAN							
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM							
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	DPUTR
SPM PERUMAHAN RAKYAT							

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
21	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
22	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
23	Peayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana;	BPBD
25	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
SPM SOSIAL							

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
26	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
28	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
29	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
30	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

4.3 Inovasi Daerah

Keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi. Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung oleh berbagai inovasi dari segala bidang, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan tahunan daerah, dalam program pembangunan daerah serta proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kota Sukabumi. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

Dengan di implementasikannya berbagai inovasi di Kota Sukabumi, maka hal tersebut sangat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sehingga mendukung pula capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, berbagai inovasi yang telah dilakukan ternyata juga telah mendapat penilaian dari berbagai pihak baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi sehingga terdapat beberapa inovasi yang mendapat penghargaan. Penghargaan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pula pendapatan yang akan diterima Kota Sukabumi dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk apresiasi kinerja daerah salah satunya melalui anggaran Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Pada Tahun 2023 dan awal 2024 terdapat beberapa penghargaan bagi Kota Sukabumi baik yang berupa inovasi ataupun bukan termasuk inovasi baik dari tingkat Provinsi, Nasional maupun tingkat Internasional. Penghargaan tersebut diantaranya adalah:

1. Festival UNJ Martial Art Competition 2020 INA/Kumite Kelas 40 Kg Tingkat Internasional;
2. Penghargaan BKN Awards;
3. Penghargaan APBD Awards, Penyerapan tertinggi ketiga;

4. Piala Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya Tingkat Nasional Tahun 2023;
5. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya Tingkat Nasional Tahun 2023;
6. Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023 dari Kemenpan RB;
7. Pencapaian *Universal Health Coverage* Tingkat Nasional;
8. Penghargaan Nirwasita Tantra;
9. Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Selain inovasi di atas masih terdapat banyak jenis inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun unit kerja di bawahnya sebagaimana yang akan disampaikan pada tabel 4.29 di bawah ini. Inovasi yang akan ditampilkan tersebut seluruhnya masih dilaksanakan atau berjalan sampai akhir Tahun 2023 ini, hal tersebut didapatkan dari hasil pemetaan dan kunjungan lapangan ke perangkat daerah atau unit kerja yang melaksanakan inovasi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pembinaan dari pemerintah daerah sekaligus juga dalam mengumpulkan dokumen pendukung inovasi sebagai langkah dalam memenuhi persyaratan Inovasi Government Award (IGA).

Dalam tabel di bawah ini juga akan dilengkapi penjelasan atau deskripsi dari masing-masing inovasi yang dilakukan serta penambahan keterangan tertentu seperti apabila inovasi tersebut berbasis teknologi informasi. Hasil pendataan tersebut dilakukan pada Inovasi yang masih berjalan yang terbaru yaitu yang di inisiasi pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Secara rinci penjelasan tersebut terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.33
Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	PKM Cibeureumhilir				
1	OKE DIGI (Optimalisasi Kesehatan Gigi melalui video digital)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan
2	PERAWAN CAKEP (PEduki RAhim WANita dengan Cek ivA KE Puskesmas)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
3	API ASMARA (Ayo Lengkapi Arsip Sendiri dengan Cermat dan Rapi)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	kearsipan, Kepegawaian
4	SEMUT HITAM (Sehat dengan Jamu Tradisional Hindari Penyakit Menular dan Tidak Menular)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
5	TUA BANGKA (SANTUN LANSIA BAHAGIA DENGAN KELOLA PENYAKIT)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
6	ALADIN (Ayo Kenali dan Berantas Dengue Secara Dini)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
7	MUSIKALISASI MELODI (Optimalisasi Layanan Konseling Sanitasi melalui Video Edukasi)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan
8	TAMAN BERSERI (Pendaftaran Nyaman Berbasis Komputerisasi)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan
9	MUKBANG PENTING (MenU maKan gizi seimBANG PENcegah stunTING)	PKM CIBEUREUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
10	PISTOL TB (Peduli Sadari Obati Konsultasi Tuberkulosis)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
11	RESEP GAUL (Remaja sehat dan pintar generasi unggul)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
12	GEGEBER AKTIF (Gelora Gerakan Bersih bersih dan Aktifitas Fisik)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
13	Konseling dan Penyuluhan Untuk Mulut Bersih dan Sehat dari Karies (SENYUM BERSERI)	PKM CIBEUEUMHILIR (pkmcibeureumhilir)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
	PKM Pabuaran				
14	JAMALI TB (JADIKAN MASYARAKAT PEDULI TB)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
15	POLA JITU (PENGELOLAAN LAYANAN KONSELING Jiwa TERPADU)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
16	KALAPA (KADER PEDULI AKTIF PROGRAM KIA)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan,sosial
17	LASEGAR (LAPAS SEHAT DAN BUGAR)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan,sosial
18	Rencanakan Persalinan Aman Dan ASI Eksklusif (REKAN ASIK)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa
19	Konseling Gizi Cegah Penyakit Tidak Menular (SE-GIZI CEPAT)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
20	Selasa sabtu Bahas Masalah Kesehatan Bersama Dan Merata (SABA KOTA)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
21	Ragam Acara Edukasi Dan Obrolan Interaktif Masalah Kesehatan (RADIO AKTIF)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
22	Tanggap Waspada Penganggulungan COVID-19 (TAWA MAS DAVID)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
23	Partisipasi Masyarakat Terhadap Rendahnya Cakupan D/S Di Posyandu (PASTI RENYAH)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
24	Gerakan Leungitkeun Stunting (GEULIS)	PKM PABUARAN (puskesmaspabuaran)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
	PKM Sukakarya				
25	Optimalisasi Penyimpanan Reagen melalui Pembuatan SOP (PERISOP)	PKM SUKAKARYA (puskesmassukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
26	Pengendalian, Pengelolaan Obat Kadaluwarsa melalui Pelabelan, Pembukuan, dan Penataan Obat dengan Metode FIFO dan FEFO (LATO LATO)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
27	Kartu Pantau Hipertensi (KAPANSIH)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
28	SITAMU (Sistem Pencatatan Imunisasi)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Kesehatan ,kearsipan
29	UPAYA MENGATASI HIPERTENSI DENGAN MEMINUM OBAT SECARA TERATUR (UYAH BATUR)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
30	GOOGLE SHEET DAN ALUR BERKAS (GOALS)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, kearsipan
31	GERMAN (GIGI SEHAT LAHIRAN NYAMAN)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Kesehatan, komunikasi dan informatika
32	ELING (Edukasi Keliling)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
33	Informasi Edukasi kesehatan Mom'S Masa Kini (INDUKSI)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
34	BERSALIM (PELABELAN SARANA PEWADAHAN LIMBAH MEDIS)	PKM SUKAKARYA (puskesmasmasukakarya)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, lingkungan hidup
	PKM Limusnunggal				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
35	KLIK UP (KELOLA LAYANAN PUSKESMAS TERINTEGRASI PADA KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
36	KASEP PIS-AN (KEGIATAN AKSELERASI, SINERGITAS DAN ELABORASI PIS-PK ANTAR PROGRAM)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
37	HAI CINTA (HIMBAUAN AKTIF IKUT IMUNISASI CERMIN PEDULI BAYI DAN BALITA)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
38	WEDANG JAHE (WISATA EDUKASI TINGKATKAN PENTINGNYA BELAJAR HIDUP SEHAT)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
39	RASA AMAN (Gerakan Atasi Sampah Aktifkan Jamban)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
40	GELORA CINTA MANIS (GERAKAN OLAHRAGA BERSAMA ATASI CEPAT PENYAKIT MENAHUN DAN KRONIS)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
41	GUCI EMAS (GERAKAN CUKUPI GIZI MELALUI EDUKASI MASYARAKAT)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
42	MASAGI (MASYARAKAT SADAR KESEHATAN GIGI)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
43	PDKT (PROGAM DAMPINGI KASUS TB)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
44	GEMAR MENGAJI (GERAKAN MASYARAKAT MEMPERDULIKAN KESEHATAN JIWA)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan,sosial
45	DARI HATI (KENDALIKAN BERSAMA IBU HAMIL RISIKO TINGGI)	PKM LIMUSNUNGGAL (puskesmaslimusnunggal)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
	PKM Sukabumi				
46	ANTAR DIRI SEHAT SUKABUMIKU (ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI, SISTEM INFORMASI KEPUASAN PASIEN DAN EDUKASI KESEHATAN PUSKESMAS SUKABUMI)	PKM SUKABUMI (pkmsukabumikotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, komunikasi dan informatika

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
47	CIAUL (CAPAI IMUNISASI ANAK UPAYAKAN LENGKAP)	PKM SUKABUMI (pkmsukabumikotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
48	CEKAL PAPA (CEGAH DAN TANGKAL PENYAKIT PARU)	PKM SUKABUMI (pkmsukabumikotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, komunikasi dan informatika
49	MOCIDAKU (MODAL CINTA TIDAK CUKUP)	PKM SUKABUMI (pkmsukabumikotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
50	POT TRIGO (PENGELOLAAN OBAT DENGAN TEKNIK TRAFFIC LIGHT DAN INDIGO)	PKM SUKABUMI (pkmsukabumikotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
51	SIAP MERDEKA (SADARI IKUTI PERILAKU ANTI MEROKOK DENGAN KONSELING AKSI BERHENTI MEROKOK)	PKM SUKABUMI (pkmsukabumikotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial
52	PEDATI (PEMADAM DARAH TINGGI)	PKM SUKABUMI (pkmsukabumikotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
53	SI PENTING (AKSI PEDULI STUNTING DAN WASTING)	PKM SUKABUMI (pkmsukabumikotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pertanian
	PKM Benteng				
54	SAJAGI (SATU JAM BERSAMA GIZI)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
55	Aksi Keluarga Sehat Enyahkan Penyakit (siKaSEP)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
56	KESAMBET (Penkes untuk Pasien Sambil Antri berobat)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
57	SULTAN PERGI (Konsultasi Kesehatan Gigi)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga
58	PANDAWA (PENANGANAN KHUSUS PASIEN DENGAN GANGGUAN JIWA)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial
59	SIKAP SEHAT (Sistem Informasi dan Kepuasan Pasien dan Sistem Edukasi Kesehatan)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
60	PASTIKAN (Pantau Status Gizi dan Kesehatan)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
61	Sistem Pendaftaran online Lansia (SITALAS)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
62	Startegi Imunisasi Mobile Cegah PD3I (SIMOCHI)	PKM BENTENG (Puskesmasbentengkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial
	Kelurahan Jayamekar				
63	WAR ROOM K-23	KELURAHAN JAYAMEKAR (jayamekarkotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	Perencanaan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
64	KUPAT TAHU (KUPAS ATURAN TAMBAH PENGETAHUAN)	KELURAHAN JAYAMEKAR (jayamekarkotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	pendidikan, Kepegawaian
65	Keluarga Si Paman (Kelurahan dan Warga Sadar Informasi Pangan Aman)	KELURAHAN JAYAMEKAR (jayamekarkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial, pangan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
66	Beas Perelek	KELURAHAN JAYAMEKAR (jayamekarkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial
67	Kotak Saran Kelurahan Jayamekar (KORAN JAYAMEKAR)	KELURAHAN JAYAMEKAR (jayamekarkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
					ketentuan peraturan perundang-undangan
68	Layanan SI MEKAR	KELURAHAN JAYAMEKAR (jayamekarkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
69	Gerakan Literasi Keuangan (GARASI KEUANGAN)	KELURAHAN JAYAMEKAR (jayamekarkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, Pendidikan dan Pelatihan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
70	Panel Informasi Seni (PASINI)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dinaspendidikankotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, kebudayaan
71	SIIBU (Sistem Informasi Kebudayaan dan Promosi Pariwisata)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dinaspendidikankotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pendidikan, kebudayaan, pariwisata
72	SIRAKSA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dinaspendidikankotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, Kepegawaian
73	Pojok Urang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dinaspendidikankotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kebudayaan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
74	Small Museum Kota Sukabumi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dinaspendidikankotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata
75	Pojok Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dinaspendidikankotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
76	Cahaya Museum Kota Sukabumi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dinaspendidikankotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata
	PKM Lembursitu				
77	GARDU ASIK (GERAKAN TERPADU LANSIA AKTIF SEHAT BERENERGIK)	PKM LEMBURSITU (puskesmaslembursitu)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
78	SENSASI (SENIN SELASA INFORMASI)	PKM LEMBURSITU (puskesmaslembursitu)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, kesehatan
79	JELITA (Jejaring Lintas Kota	PKM LEMBURSITU (puskesmaslembursitu)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	kesehatan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
80	FOSIL (FORUM ASI EKSKLUSIF)	PKM LEMBURSITU (puskesmaslembursitu)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	pendidikan, kesehatan
81	AKSI CEGAH STUNTING (CETING)	PKM LEMBURSITU (puskesmaslembursitu)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	pendidikan, kesehatan
82	Aksi Masyarakat Cinta HiduP Sehat	PKM LEMBURSITU (puskesmaslembursitu)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
83	Aksi Masyarakat Cinta Hidup Bersih Dan Sehat (SIMANIS)	PKM LEMBURSITU (puskesmaslembursitu)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
84	LAYANAN BATIK MILIK ANDA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (disdukcapilkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, statistik

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
85	LAYANAN MOCI LEGIT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (disdukcapilkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika
86	Layanan PATEPANG SONO	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (disdukcapilkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika
87	Layanan KITA CERDAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (disdukcapilkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
88	Layanan KADO TERINDAH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (disdukcapilkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika
89	Layanan KAMI HEBAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (disdukcapilkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika
	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan				
90	SAPAR (Sekolah Agro untuk Pelajar)	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN (dinasketahananpangankotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, pertanian

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
91	ONE ROOF (ONE REGION ONE OFFTAKER)	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN (dinasketahananpangankotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pangan, pertanian
92	Terapi Simola (Terapan Pakan Ikan Nila System Molase)	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN (dinasketahananpangankotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pangan, kelautan dan perikanan
93	E-CPPD Kota Sukabumi ((Layanan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN (dinasketahananpangankotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	sosial, pangan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	Daerah Kota Sukabumi Secara Elektronik)				
94	Gelar Pangan Murah Keliling (GPM LING)	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN (dinasketahananpangankotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pangan
95	Gerakan Tanam Ikan Sebagai Penyelang (GEMILANG)	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN (dinasketahananpangankotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kelautan dan perikanan
	Kecamatan Baros				
96	Sistem Informasi Manajemen Data (SIMAJA) RTRW	KECAMATAN BAROS (kec.baros)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
97	Sistem Kepuasan Pelayanan (SIKAP)	KECAMATAN BAROS (kec.baros)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Kepegawaian, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
98	Elektronik Pengaduan (E-PENGADUAN)	KECAMATAN BAROS (kec.baros)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
99	Survei Kepuasan Masyarakat (SURKAT)	KECAMATAN BAROS (kec.baros)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
100	Sistem Informasi dan Surat Keterangan Melalui LINK (SISKAMLINK)	KECAMATAN BAROS (kec.baros)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	Kelurahan Benteng				
101	BOS SUPEL (Benteng Online Service Surat Pelayanan)	KELURAHAN BENTENG (kelurahanbenteng)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
102	CILUKBA (Cinta Literasi Untuk Kecerdasan Ibu Dan Anak)	KELURAHAN BENTENG (kelurahanbenteng)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
103	BLASTERAN BERSIN (Blusukan Bagi-bagi Masker Gratis, Sosialisasi Protokol Kesehatan dan Bereskan Target Vaksin)	KELURAHAN BENTENG (kelurahanbenteng)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
			kewenangan Daerah		
104	GEROBAK KAGETS (Gerakan Obral Kebaikan - Ketagihan Berbagi Terhadap Sesama)	KELURAHAN BENTENG (kelurahanbenteng)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial
105	PERPUSTAKAAN DIGITAL "GELEDEG BENTAR" (Gerakan Literasi Digital Untuk Benteng Pintar)	KELURAHAN BENTENG (kelurahanbenteng)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Digital	pendidikan, perpustakaan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
			kewenangan Daerah		
	Kelurahan Jayaraksa				
106	MAS PEJABAT (Masyarakat Jayaraksa Peduli Jamban Sehat)	KELURAHAN JAYARAKSA (kel.jayaraksakotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa
107	SI RASA MANIS (Aksi Bersama Jayaraksa Mencegah Dan Menanggulangi Stunting)	KELURAHAN JAYARAKSA (kel.jayaraksakotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
					pelindungan anak, lingkungan hidup
108	SI CERDAS (Aksi Bersama Cegah Resiko Penularan Demam Berdarah Terintegrasi)	KELURAHAN JAYARAKSA (kel.jayaraksakotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, sosial, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa
109	MELATI GAMBIR (Melayani Sepenuh Hati Agar Warga Gembira)	KELURAHAN JAYARAKSA (kel.jayaraksakotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan
	PKM Cikundul				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
110	KEPING TOGE (KELOMPOK PENDAMPING TOLONG ODGJ)	PKM CIKUNDUL (puskesmascikundul)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial
111	MEPELING (METODE PENYULUHAN KELILING)	PKM CIKUNDUL (puskesmascikundul)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
112	GEMA AFICK (GERAKAN MASYARAKAT BERAKTIFITAS FISIK DENGAN PUSKESMAS CIKUNDUL)	PKM CIKUNDUL (puskesmascikundul)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
113	KEKAR (KELAS EDUKASI KADER REMAJA)	PKM CIKUNDUL (puskesmascikundul)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
114	Sistem Penyimpanan Arsip Dinamis Tertib dan Aman (SPIDERMAN)	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SUKABUMI (perpustakaanotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	pendidikan, perpustakaan, kearsipan
115	Hallo Restorasi Arsip (HARTOP)	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SUKABUMI (perpustakaanotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, perpustakaan, kearsipan
116	YANA SULASTRI (Pelayanan Penanganan Encapsulasi Penyelamatan Arsip)	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SUKABUMI (perpustakaanotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, kearsipan
117	Cerita Dongeng Online (CENDOL)	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SUKABUMI (perpustakaanotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, perpustakaan
	PKM Cipelang				
118	RUTAN BESI (RUMAH TANGGA BEBAS POLUSI)	PKM CIPELANG (puskesmascipelang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, lingkungan hidup

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
119	LEGIT (LANSIA ENERGIK DAN PRODUKTIF)	PKM CIPELANG (puskesmascipelang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial
120	JERUK AMIS (JADWAL EDUKASI RABU DAN KAMIS)	PKM CIPELANG (puskesmascipelang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika
121	KRIWIL (KURILING WILAYAH)	PKM CIPELANG (puskesmascipelang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial, lingkungan hidup
	PKM Selabatu				
122	MANJA MANIS (Pemantauan Makanan Jajanan Aman Hygienis dan Sehat)	PKM SELABATU (selabatu)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
123	Dilan Milea (Peduli Kesehatan Mileneal Kita)	PKM SELABATU (selabatu)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
124	SICANDU KERJA (SISTEM PENCATATAN TERPADU KESEHATAN PEKERJA)	PKM SELABATU (selabatu)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, tenaga kerja
	RSUD Syamsudin, S.H.				
125	Pelayanan Ramah Teman Tuli (MANTUL)	RSUD SYAMSUDIN, SH (rsudsyamsudin)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
126	Hallo Bunut	RSUD SYAMSUDIN, SH (rsudsyamsudin)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan
127	Sistem Informasi Manajemen Tracing Covid-19 (SIMTRAC- 19)	RSUD SYAMSUDIN, SH (rsudsyamsudin)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	kesehatan
	PKM Gedongpanjang				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
128	DEWA ULAR (DETEKSI AWAL PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR)	PKM GEDONGPANJANG (gedongpanjang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
129	SILATIN (SKRINING LABORATORIUM CALON PENGANTIN)	PKM GEDONGPANJANG (gedongpanjang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
130	GERA CETING (GERAKAN CEGAH STUNTING)	PKM GEDONGPANJANG (gedongpanjang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
	PKM Tipar				
131	MELINGAN (MEMO KONSELING KLINIK SANITASI)	PKM TIPAR (Puskesmas tipar)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
132	GERCEP CIN (GERAKAN PERCEPATAN IMUNISASI DASAR LENGKAP)	PKM TIPAR (Puskesmas tipar)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
133	GEMAR CETING	PKM TIPAR (Puskesmas tipar)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan
	Kecamatan Citamiang				
134	DITAHAN MAMANG (Digital Katalog Kewilayahan Kecamatan Citamiang)	KECAMATAN CITAMIANG (kecamatan citamiang)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
135	Sistem WhatApps Pelayanan dan Pengaduan Administrasi Kecamatan (SWALAYAN)	KECAMATAN CITAMIANG (kecamatan citamiang)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
136	Pelayanan Teknologi Informasi Keluar Masuk Surat (PETI KEMAS)	KECAMATAN CITAMIANG (kecamatan citamiang)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	komunikasi dan informatika
	Kelurahan Baros				
137	Gerakan Masyarakat Peduli Penanganan Stunting (GEMA PENTING)	KELURAHAN BAROS (kel.baros.kotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
138	Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT)	KELURAHAN BAROS (kel.baros.kotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
			menjadi kewenangan Daerah		
139	Aplikasi Pelayanan Masyarakat Humanis (APELMANIS)	KELURAHAN BAROS (kel.baros.kotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa, komunikasi dan informatika
	PKM Baros				
140	Kucegah Stunting dengan Sekolah Gizi Keluarga (KUOTA SAGIGA)	PKM BAROS (puskesmasbaros)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan
141	Terminal Sehat Jawara Supirna (TERAJANA)	PKM BAROS (puskesmasbaros)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, lingkungan hidup
142	JALAN PAGI GERAKAN PUNGUT SAMPAH CEGAH PENYAKIT MENULAR DAN	PKM BAROS (puskesmasbaros)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, lingkungan hidup

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	TIDAK MENULAR (JPGPS CEPAT)				
	Kelurahan Sudajayahili				
143	Asosiasi Remaja Mesjid Dan Pemuda Serta Edukasi Talikasih Ibu Dan Anak (ARMADA SETIA)	KELURAHAN SUDAJAYAHILIR (kel.sudajayahilir.kotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kepemudaan dan olah raga

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
144	Investasi Menabung Sampah Untuk Membuat Septick Tank (IMAH BERSEPTICK TANK)	KELURAHAN SUDAJAYAHILIR (kel.sudajayahilir.kotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, Pendidikan dan Pelatihan
	Kecamatan Cikole				
145	SISTEM INFORMASI APLIKASI DISPOSISI SURAT MASUK DAN KELUAR KECAMATAN CIKOLE (SIADIKKECIL)	KECAMATAN CIKOLE (kecamatan cikole kotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	komunikasi dan informatika, kearsipan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
146	SIPALING KECE (SISTEM PELAYANAN KELILING KECAMATAN CIKOLE)	KECAMATAN CIKOLE (kecamatan cikolekotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah				
147	Youth Planner Conference	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (bappedakotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	Perencanaan
148	SIBASI (Sistem Basis Data Inovasi)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (bappedakotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Teknologi	Penelitian dan Pengembangan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	Dinas Kepemudaan olahraga dan Pariwisata				
149	Danakitri by Sukabumi Creative Hub	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA (Dinaskepemudaanolahraga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kepemudaan dan olahraga, pariwisata
150	SURAK-OY (Sukabumi Bergerak-Olahraga Yuk)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA (Dinaskepemudaanolahraga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kepemudaan dan olahraga

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	Dinas Sosial				
151	Rumah Singgah Bandung	DINAS SOSIAL (dinassosialkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan,sosial
152	Udunan Online	DINAS SOSIAL (dinassosialkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,sosial
	RSUD Al-Mulk				
153	SIPRAJA (Sistem Informasi Pendaftaran Rawat Jalan)	RSUD AL - MULK (Al-Mulk)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, komunikasi dan informatika
154	CETEK (CUKUP EKTP SERTAKAN KARTU KELUARGA)	RSUD AL - MULK (Al-Mulk)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	Dinas Lingkungan Hidup				
155	PLASTIK (Pelayanan SPPL Terpadu di Kelurahan/Kecamatan)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (dlhkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	lingkungan hidup, penanaman modal
156	PEDULI (PENGADUAN LINGKUNGAN ONLINE KOTA SUKABUMI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (dlhkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	lingkungan hidup
	Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran				
157	pasigit	SATPOLPP (satpolppkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
158	PAJAKA PLUS	SATPOLPP (satpolppkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
159	AVATAR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN (dpuprkcotsi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	Kelurahan Cikole				
160	Cikole CERIA (Pelayanan Online Kelurahan Cikole yang Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas dan Amanah)	KELURAHAN CIKOLE (kelurahancikole)	Inovasi pelayanan publik	Digital	sosial
	Inspektorat Daerah				
161	Meta Data Terintegrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (MATATERPANA)	INSPEKTORAT (inspektoratkotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Kelurahan Cikundul				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
162	Warung Sabtu Berkah	KELURAHAN CIKUNDUL (cikundul)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, perpustakaan, Pendidikan dan Pelatihan
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A				
163	MENTARI BERDASI (Mengatasi Stunting Terkolaborasi Bersama DALDUKKBP3A Serap Informasi)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (daldukkbp3a)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
164	Sistem Informasi Kesbangpol Terintegrasi (SIKOI)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUKABUMI (kesbangpolkotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial
	PKM Nanggaleng				
165	Sarana Informasi Tentang Kandungan Melalui Media Sosial (SI ITEUNG MODIS)	PKM NANGGELENG (pkmnanggaleng.kotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
166	Pelayanan Tera/Tera Ulang Terpadu (Pelayanan TER..LA..LU)	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (diskumindagkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	perdagangan
	UPTD Labkesda Dinas Kesehatan				
167	LABKESDA On The Way Rumah Pasien (LABKESDA OTW)	UPTD LABKESDA (uptdlabkesda)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informatika
	Kecamatan Lembursitu				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
168	Sistem Pelayanan Siap Antar (SIPINTAR)	KECAMATAN LEMBURSITU (kecamatanlembursitu)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa
	Kelurahan Kebonjati				
169	SERULING JATI (Sarana Edukasi Ruang Literasi Keliling di Kebonjati)	KELURAHAN KEBONJATI (kel.kebonjati.kotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, perpustakaan
	Sekretariat Daerah				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
170	PeDe HaDe	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI (setdakotsi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	Perencanaan, Keuangan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
171	Spada Santun (Screening Pajak Daerah Satu Pintu)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH (bpkpdkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Keuangan
	PERUMDA BPR				
172	SIRAYA (SIMPANAN HARI RAYA) PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI	PERUMDA BPR (perumdabprkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial,Keuangan

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia				
173	Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur (SiPeKa)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (badankepegawaian)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Kepegawaian
	Kecamatan Gunungpuyuh				
174	Sistem Kotak Layanan Elektronik Mandiri (SIKALEM)	KECAMATAN GUNUNGPUYUH (kecamatangunungpuyuh)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Sekolah Dasar Negeri Lamping 3				
175	EMPO ORI (PEMBELAJARAN PROJEK MEMBUAT BIOPORI)	SEKOLAH DASAR NEGERI LAMPING 3 KOTA SUKABUMI (sdnlamping3)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan,pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
	Kelurahan Gunungparang				
176	KADOMU (Kartu Dokumen untukMu)	KELURAHAN GUNUNGPANG (kel.gunungparang.kotsi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Kelurahan Warudoyong				
177	Beberesih Jumat Pagi Sapa Warga Lingkungan Bersih dan Sehat (BERJUMPA)	KELURAHAN WARUDOYONG (kelurahanwarudoyong)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup
	Kelurahan Cikondang				
178	Sistem Pelayanan Efektif dan Transparan (SILET)	KELURAHAN CIKONDANG (kel.cikondang.kotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
					pemberdayaan masyarakat dan Desa, kearsipan
	Kelurahan Citamiang				
179	Sistem Pelayanan Online Ti Orang Citamiang (SiPOTONG)	KELURAHAN CITAMIAN (kel.citamiang.kotsi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Kelurahan Limusnunggal				

No	Judul Inovasi	PD / Instansi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	2	3	4	5	6
180	Sistem Antar-jemput Surat Kematian (SASUKE)	KELURAHAN LIMUSNUNGGAL (Kel.Limusnunggalkotsi)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Tahun 2023 dan 2024 untuk penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Musrenbang menjadi media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Sukabumi. Selain dari Musrenbang, sebagai bentuk dari implementasi Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif, maka telah dilakukan beberapa kegiatan lain yaitu Sukabumi *Youth Planner Conference* serta *Focus Group Discussion* Disabilitas. Hasil kegiatan tersebut juga telah mewarnai proses perencanaan yang telah dilakukan, walaupun tentu hasil tersebut tetap di proses sebagaimana mekanisme yang berlaku.

Di Kota Sukabumi, penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, khususnya pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan program prioritas pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPD.

5.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2025 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan

urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta hasil pemutakhirannya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Program dan kegiatan hasil pemetaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Pusat Data dan Informasi, dimana dalam SIPD tersebut menggunakan rincian objek belanja sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh perangkat daerah mengusulkan rencana kerja pada SIPD RI dengan melakukan entri rincian objek belanja, selanjutnya usulan tersebut dilakukan proses verifikasi oleh Tim Bappeda. Proses verifikasi dilakukan terutama dengan melihat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per sub kegiatan, guna melihat apa rincian aktivitas yang ada di dalamnya sehingga dari awal proses perencanaan sudah dapat diketahui apa tujuan, siapa sasaran dan bagaimana pelaksanaan kegiatannya, sehingga nanti dapat dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian dengan indikator kinerja yang akan dicapainya sebagaimana dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam proses pengusulan pagu anggaran Tahun 2025, perangkat daerah pada awalnya diarahkan untuk mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, namun demikian setelah dilakukan analisis, penelaahan dan verifikasi ternyata kebutuhan belanja masih belum terpenuhi terutama dalam mendukung kegiatan yang dianggap prioritas di masing-masing perangkat daerah. Untuk itu maka berdasarkan hasil analisis dan diskusi dengan seluruh tim penyusun RKPD, maka kebutuhan tersebut dipenuhi dengan kembali

melakukan verifikasi ulang serta mengurangi aktivitas yang dianggap bukan prioritas.

Rekapitulasi usulan pagu anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 serta SIPD RI disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Pagu Usulan Perangkat Daerah dan Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PAGU RPD Tahun 2025	JUMLAH PAGU RKPD 2025
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	149,150,250,534	141,408,766,580
2	Dinas Kesehatan	452,147,524,117	467,790,540,857
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	41,043,075,549	49,486,021,507
4	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12,316,864,597	13,677,121,900
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,576,194,877	4,143,887,569
6	Dinas Sosial	8,267,616,141	7,859,105,837
7	Dinas Tenaga Kerja	4,051,503,751	4,810,521,206
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7,267,523,979	9,247,119,322
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11,570,927,229	13,461,311,869
10	Dinas Lingkungan Hidup	26,558,001,603	30,662,117,393
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,601,829,312	6,670,085,445
12	Dinas Perhubungan	17,053,675,695	19,151,713,450
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,960,382,200	7,061,435,112
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	13,999,231,334	11,736,915,800
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,205,689,341	6,032,849,166

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PAGU RPD Tahun 2025	JUMLAH PAGU RKPD 2025
1	2	3	4
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11,595,690,062	11,167,233,376
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,200,883,245	6,566,039,248
18	Sekretariat Daerah	51,738,027,367	53,115,738,840
19	Sekretariat DPRD	53,769,951,224	54,355,143,189
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15,515,184,396	18,388,817,153
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	65,950,488,074	62,211,301,738
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,711,164,520	8,289,139,962
23	Inspektorat Daerah	9,120,975,647	10,720,720,760
24	Kecamatan Cikole	13,645,319,075	14,438,273,800
25	Kecamatan Gunung Puyuh	10,405,448,204	10,878,135,777
26	Kecamatan Citamiang	11,039,252,087	12,006,760,484
27	Kecamatan Warudoyong	11,804,315,513	12,915,653,909
28	Kecamatan Baros	9,336,508,621	9,473,887,650
29	Kecamatan Lembur Situ	10,654,694,006	11,882,722,429
30	Kecamatan Cibeureum	10,022,318,259	10,242,381,969
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9,362,684,625	10,584,245,073
JUMLAH		1,071,643,195,184	1,110,435,708,370

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Apabila dilihat dari urusannya, dan dikaitkan dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka akan terlihat sebagaimana tabel dibawah ini,

Tabel 5,2
Jumlah Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran
Per Urusan Pada RKPD Tahun 2025

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	140,967,652,580	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	467,790,540,857	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	43,937,587,864	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5,527,683,643	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan	20,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13,677,121,900	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
7	Urusan Pemerintahan Bidangketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4,143,887,569	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7,859,105,837	Dinas Sosial
9	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4,713,521,206	Dinas Tenaga Kerja
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	872,631,860	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	11,078,407,989	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
12	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	30,662,117,393	Dinas Lingkungan Hidup
13	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6,670,085,445	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8,374,487,462	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
			Perempuan, Perlindungan Anak
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	19,151,713,450	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6,885,270,662	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	10,346,193,050	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6,032,849,166	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	10,246,465,376	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	51,123,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	125,041,450	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	441,114,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	6,263,115,698	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	302,923,550	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	617,316,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	920,768,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	1,765,587,180	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	957,671,750	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	433,051,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	97,000,000	Dinas Tenaga Kerja

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
31	Sekretariat Daerah	53,115,738,840	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat DPRD	54,355,143,189	Sekretariat DPRD
33	Perencanaan	17,369,020,153	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
34	Keuangan	62,211,301,738	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
35	Kepegawaian	7,131,818,712	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Pendidikan Dan Pelatihan	1,157,321,250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	Penelitian Dan Pengembangan	1,019,797,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38	Inspektorat Daerah	10,720,720,760	Inspektorat Daerah
39	Kecamatan Administrasi	14,438,273,800	Kecamatan Cikole
40	Kecamatan Administrasi	10,878,135,777	Kecamatan Gunung Puyuh
41	Kecamatan Administrasi	12,006,760,484	Kecamatan Citamiang
42	Kecamatan Administrasi	12,915,653,909	Kecamatan Warudoyong
43	Kecamatan Administrasi	9,473,887,650	Kecamatan Baros
44	Kecamatan Administrasi	11,882,722,429	Kecamatan Lembur Situ
45	Kecamatan Administrasi	10,242,381,969	Kecamatan Cibeureum
46	Kesatuan Bangsa Dan Politik	10,584,245,073	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah		1,110,435,708,370	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Penyusunan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2025 sangat mempertimbangkan prioritas pembangunan dan program prioritrs yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, Dari hasil analisis yang dilakukan, maka didapatkan data bahwa pagu anggaran RKPD Tahun 2025 yang mendukung pencapaian tiga prioritas pembangunan dan indikator kinerja utama kepala daerah adalah sebesar Rp, **183,330,014,255,-** atau sekitar 20 % dari total belanja RKPD yang tersebar di berbagai

perangkat daerah pengampu, Lebih jelasnya rincian pagu anggaran tersebut seperti tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5,3
Rekapitulasi Anggaran Pada RKPD Tahun 2025
Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Pencapaian IKU Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kondusifitas Kota		73,006,312,358	
		Penyelenggaraan Jalan	9,978,398,545	DPUTR
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,476,230,950	DISHUB
		Pengelolaan Persampahan	1,443,901,500	DLH
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,073,111,500	DPUTR
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	861,930,800	DPUTR
		Kawasan Permukiman	4,162,266,243	DPUTR
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	564,660,000	DLH
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	297,887,000	DLH
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,162,885,500	SATPOLPP DAMKAR
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	420,381,000	KESBANGPOL
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,039,197,600	KESBANGPOL
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2,954,684,000	DPUTR
		Penanggulangan Bencana	522,965,500	BPBD
		Penanganan Bencana	405,521,000	DINSOS
		Pengelolaan Pendidikan	16,640,645,700	DISDIKBUD
		Pembinaan Perpustakaan	625,055,120	DISPUSIP
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	24,020,209,000	DINKES

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	356,381,400	DALDUKKBP2A
2	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		3,550,361,600	
		Pelayanan Penanaman Modal	310,251,300	DPMPTSP
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	418,351,250	DISKUMINDAG
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	74,000,000	DISKUMINDAG
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	914,783,950	DISKUMINDAG
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80,050,500	DISKUMINDAG
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	556,669,100	DKP3
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	96,900,000	DISPORAPAR
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	325,320,000	DISPORAPAR
		Pemasaran Pariwisata	231,835,500	DISPORAPAR
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	457,200,000	DISNAKER
		Penempatan Tenaga Kerja	85,000,000	DISNAKER
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		106,773,340,297	
		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,114,254,000	BAPPEDA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4,194,088,500	BAPPEDA
		Pengelolaan Keuangan Daerah	14,572,738,507	BPKPD
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,157,321,250	BKPSDM

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Penyelenggaraan Pengawasan	857,418,000	INSPEKTORAT
		Perekonomian dan Pembangunan	541,978,100	SETDA
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,025,860,932	SETDA
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12,547,899,808	SETDA
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18,252,597,200	SETWAN
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,845,192,200	KEC, CIKOLE
			1,409,187,900	KEC, GUNUNG PUYUH
			1,261,455,750	KEC, CITAMIANG
			1,598,887,550	KEC, WARUDOYONG
			1,154,732,700	KEC, BAROS
			1,508,114,000	KEC, LEMBURSITU
			1,192,612,400	KEC, CIBEUREUM
		Pengelolaan Aplikasi Informatika	370,562,000	DISKOMINFO
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	148,642,500	DISDUKCAPIL
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,019,797,000	BAPPEDA
Jumlah			183,330,014,255	

Bappeda: Hasil Analisis Bappeda

Usulan dan program strategis Tahun 2025 diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan program seperti Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), Honor Ketua RT-RW, BPJS Tenaga Kerja untuk Ketua RT, Ketua RW, Anggota Linmas dan Kader, Termasuk didalamnya penanganan kekumuhan dan *stunting*, Sementara usulan masyarakat

melalui Musrenbang Kelurahan Tahun 2025 prioritas untuk 5 usulan fisik, 5 usulan non fisik, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan serta inovasi, Untuk strategi percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui konvergensi 3F (3 Fokus), yaitu: Fokus Lokasi (Kelurahan), Fokus Intervensi Aksi (Sensitif dan Spesifik), dan Fokus Kelompok Sasaran (1000 Hari Pertama Kehidupan),

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa proses perencanaan harus mengakomodir harus mengakomodir kebutuhan atau usulan masyarakat melalui Musrenbang serta pokok-pokok pikiran DPRD, Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, usulan masyarakat serta pokok pikiran DPRD yang seluruhnya sudah diakomodir oleh perangkat daerah pengampu sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5,4
Rekapitulasi Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang
Yang Diakomodir Perangkat Daerah

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
1	Air minum / air bersih	5
2	Bantuan / pelatihan pemulasaraan jenazah	10
3	Bantuan modal koperasi rw	2
4	Bantuan pendidikan/beasiswa	3
5	Biaya operasional kegiatan	1
6	Bimtek kepemudaan	3
7	Bimtek penguatan pengurusan kampung KB	2
8	Bimtek penurunan stunting	5
9	Bimtek/pelatihan RT/RW	5
10	Bimtek/pelatihan/sosialisasi mitra sosial (PSM, TKSK, PUSKESOS)	4
11	Digital marketing	5
12	Insentif anggota linmas	1

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
13	Insentif guru ngaji, guru MI, marbot, RA, TPQ	1
14	Insentif kader posyandu	5
15	Jalan pemukiman / rehab / pengaspalan/	33
16	Pelatihan bengkel dan las	1
17	Pelatihan bina bina (BKB, BKR, BKL)	1
18	Pelatihan budidaya ikan	10
19	Pelatihan budidaya magot	2
20	Pelatihan hidroponik	4
21	Pelatihan kader posyandu	6
22	Pelatihan kepedulian terhadap lingkungan hidup	1
23	Pelatihan keterampilan / pelatihan kerja (tata boga, las pelatihan sablon dstnya)	10
24	Pelatihan kewirausahaan	6
25	Pelatihan komputer	4
26	Pelatihan linmas, kebakaran	3
27	Pelatihan literasi dan pengadaan buku bacaan	2
28	Pelatihan menjahit	6
29	Pelatihan merajut	1
30	Pelatihan Pembuatan Proposal Rencana Pembangunan bagi Pengurus RT dan RW	1
31	Pelatihan penanganan persampahan	7
32	Pelatihan Pengolahan air hujan	1
33	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	1
34	Pelatihan pertanian	1
35	Pelatihan pkk / kader posyandu/ dasa wisma	3
36	Pelatihan pola asuh anak	1
37	Pelatihan relawan perpustakaan	1
38	Pelatihan teknis pertanian	7

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
39	Pelatihan tentang perilaku remaja dan pergaulan remaja	1
40	Pelatihan umkm pemuda	8
41	Pemasangan CCTV	3
42	Pembangunan gedung olahraga (gor)	1
43	Pembangunan gedung serbaguna	3
44	Pembangunan gedung/ kantor	3
45	Pembangunan gorong-gorong/drainase	13
46	Pembangunan jalan pemukiman	11
47	Pembangunan Jembatan di pemukiman	2
48	Pembangunan posyandu	3
49	Pembangunan rabat beton dan TPT pagar	7
50	Pembangunan sumur serapan	1
51	Pembangunan talud/ irigasi / embung/ bendungan dan penampungan air	17
52	Pembangunan tpt irigasi sawah	4
53	Pembangunan wc umum	1
54	Pembuatan sumur artesis	2
55	Pembuatan TPS	1
56	Pembukaan Lahan untuk kelompok tani	1
57	Pemeliharaan/rehab talud/ irigasi / normalisasi sungai/embung/ bendungan dan penampungan air	8
58	Pemicuan STBM	1
59	Pemuktahiran data keluarga (mdk)	1
60	Penambahan modal uppks	1
61	Penerangan jalan umum (PJU)	6
62	Pengadaan alat olahraga	1
63	Pengadaan Benih padi, Pupuk dan Obat hama	1
64	Pengadaan bibit pertanian dan perikanan	1
65	Pengadaan honorarium linmas	3

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
66	Pengadaan meja dan kursi di kelurahan	1
67	Pengadaan mesin sedot air	1
68	Pengadaan roda sampah	4
69	Pengadaan sarana air bersih	9
70	Pengadaan sarana dan prasarana kamtibmas	1
71	Pengadaan sarana prasarana posyandu	5
72	Pengadaan seragam kader posyandu	1
73	Pengadaan seragam linmas	4
74	Pengembangan percontohan bibit tanaman toga, sayuran dan buah buahan	1
75	Pengerukan/pendalaman dan perbaikan selokan	1
76	Peningkatan kapasitas karang taruna	4
77	Penyediaan Makanan PMT Ibu hamil, bayi, balita	1
78	Penyuluhan hukum	1
79	Penyuluhan kepedulian terhadap lingkungan hidup	1
80	Penyuluhan ketahanan keluarga untuk upaya pencegahan stunting (Tribina)	1
81	Penyuluhan/ promosi kesehatan tentang septic tank	1
82	Perbaikan jembatan	1
83	Perbaikan kampung Pelangi	1
84	Perbaikan pos paud	1
85	Rehab / pemeliharaan gedung kantor	4
86	Rehab peningkatan perluasan peningkatan prasarana air limbah/ mck	1
87	Rehabilitasi/Pemeliharaan bangunan gedung sarana pendidikan	1
88	Rehabilitasi/pemeliharaan gorong-gorong / drainase	15

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
89	Revitalisasi posyandu	2
90	Rumah tidak layak huni	7
91	Sarana prasarana olahraga	1
92	Sosialisasi penanggulangan bencana, pelatihan relawan bencana alat perlindungan kesipsiagaan bencana	4
93	Sosialisasi/penyuluhan bidang kesehatan	2
94	Trotoar jalan	1

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi

Pendapatan Kota Sukabumi masihlah sangat terbatas, dan sebagian besar masih mengandalkan dana transfer dari Provinsi maupun pusat, Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan strategi pembiayaan pembangunan melalui sumber lain yang sah secara ketentuan yang berlaku, Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan meminta dukungan pembiayaan Non APBD melalui program CSR (*Corporate Social Responcibility*) atau TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan),

Pada tahun 2025 rencana pembiayaan Non APBD bersumber CSR akan difokuskan pada penanganan masalah persampahan dan lingkungan hidup, Pemerintah Kota akan mengundang semua perusahaan yang telah terdaftar dan akan di paparkan proposal untuk penanggulangan sampah untuk dapat menggugah seluruh perusahaan untuk memberikan pembiayaan CSR dalam program tersebut,

Program yang akan diluncurkan untuk bisa didanai dari dukungan pembiayaan Non APBD khususnya CSR adalah berupa:

- 1) Pengadaan Gerobak Sampah di seluruh RW di Kota Sukabumi
- 2) Pengadaan Motor Sampah (Mosam) untuk 33 Kelurahan
- 3) Pengadaan Mobil/Truck Sampah
- 4) Sosialisasi dan kampanye gerakan memilah sampah dalam rangka *sirkular economy*
- 5) Penghargaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat peduli sampah,

5,2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian sasaran daerah, dimana sasaran daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output setiap pelaksanaan sub kegiatan yang mendukung pencapaian output kegiatan serta selanjutnya mendukung pencapaian outcome program yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan lima tahunan serta diterjemahkan dalam dokumen perencanaan tahunan,

Daftar kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan dalam bentuk Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) menurut kelompok Perangkat Daerah serta berdasarkan urusan yang diampunya pada Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 atau **Buku II**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 ini,

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja suatu keluaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kinerja tersebut diukur dengan indikator yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketercapaian indikator menjadi parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang disajikan dalam tabel lampiran ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja *outcomes* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kota sukabumi, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Namun demikian seiring perjalanan waktu dilakukan penyelarasan ulang yang di inisiasi oleh Provinsi dan pada akhirnya disepakati oleh pihak Provinsi dan Kota Sukabumi. Target indikator makro hasil penyelarasan tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Target Indikator Makro Kota Sukabumi

INDIKATOR	RPJMN 2025 (Target)	RPD JAWA BARAT 2025 (Target)	KOTA SUKABUMI 2023 (Capaian)	KOTA SUKABUMI 2024 (Target)	RPD KOTA SUKABUMI 2025 (Target)
LPE (%)	5,3-5,6	5,68	5,12	5.37	5,39
Kemiskinan (%)	7,0-8,0	7,24	7,50	8,00	7,00
TPT (%)	4,5-5,0	8,16	8,53	8,41	8,25
Indeks Modal Manusia /IPM (Poin)	0,56	73,78	77,16	75.55	77,80
Rasio Gini (Poin)	0,388	0,406	0,450	0,475	0,440

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dan kesepakatan Provinsi

Selanjutnya Kota Sukabumi telah menentukan Indikator Pembangunan Daerah yang merupakan indikator antara bagi pencapaian Indikator Makro sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas. Indikator tersebut kemudian disusun target pencapaiannya yang mengacu pada realisasi pada tahun sebelumnya serta kondisi terkini pencapaian indikator. Indikator Pembangunan Daerah tersebut sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2025
1	Inflasi (%)	%	3,04
2	Jumlah Penduduk Miskin	Juta Orang	25.5
3	Jumlah Penganggur	Orang	13.715
4	PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	27,61
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rupiah	45,33
6	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	11,800
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,31
8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,70
9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,63

Sumber: Hasil analisis BAPPEDA

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian *outcome* dan *output* saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan baik internal dan eksternal.

Penetapan IKU yang dijabarkan dalam bentuk target setiap tahun akan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam penentuan target IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKU pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU tersebut. Karena itu, IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 akan terdiri dari 12 indikator. Adapun IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.3 dibawah ini.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sukabumi
Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		
			2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,37	5,39	5,41
2	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,00	4,20	4,40
3	Indeks Kota Kreatif	Poin	30,93	32,43	33,95
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,55	75,75	75,80
5	Indeks Pendidikan	Poin	71,58	71,68	71,77
6	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,33	0,35	0,37
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	34,001	35,769	37,736
8	Indeks Kota Layak Huni	Poin	65,00	65,25	65,50
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	86,00	86,20	86,50
10	Indeks Rasa Aman	Poin	75,40	75,55	75,60
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73	74	75
12	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Di mana keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut direfleksikan dalam tiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, serta inovasi dan kreativitas daerah. Adapun aspek pelayanan umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar dan urusan pilihan.

IKD berisikan IKK dan indikator program prioritas lainnya yang terdapat dalam RPD Kota Sukabumi. IKK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Dalam penentuan target IKD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKD pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKD tersebut. IKD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,37	5,39	5,41	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPTSP, Disnaker, Bappeda
2	Rasio Gini	Poin	0,475	0,470	0,460	Diskumindag, Disnaker, Dinsos, Bappeda
3	Angka Kemiskinan	Persen	8,00	7,96	7,94	Dinsos, Bappeda
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,55	75,75	75,80	Disdikbud, Dinkes, Diskumindag, Bappeda
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,41	8,25	8,00	Diskumindag, Disnaker, Bappeda
6	Pendapatan Per Kapita					Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPTSP, Bappeda
	a. ADHK	Juta	27,132	27,897	29,298	
	b. ADHB	Juta	42,608	44,977	47,477	
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.15	10.17	10.19	Disdikbud
8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.59	13.6	13.61	Disdikbud
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	73	73,20	73,5	Dinkes
10	Prevalensi Stunting	Persen	14	13.9	13.85	Dinkes
11	Indeks Ketahanan Keluarga	Poin	79,64	79,69	79,74	DalduKBPPA
12	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	86.5	87.3	88.1	DKP3
13	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91.93	92.03	92.13	DalduKBPPA
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp/Oran g	966.69	982.55	998.66	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPTSP, Bappeda
2	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	85	86	87	DPUTR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78.13	78.16	78.19	Kesbangpol, Kesra, SatpolPP
4	Rasio Ketergantungan	Persen	44,90	44,83	44,73	Disdukcapil, Bappeda
ASPEK PELAYANAN UMUM						
PENDIDIKAN						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100	100	100	Disdikbud
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100	100	Disdikbud
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	Disdikbud
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	Disdikbud
KESEHATAN						
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Angka	320/1000 pddk	322/1000 pddk	324/1000 pddk	Dinkes
2	Persentase RS Rujukan tngkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	Dinkes
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	Dinkes
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	Dinkes

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	Dinkes
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen	62,18	67,03	71,89	DPUTR
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	56,18	56,94	57,70	DPUTR
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	DPUTR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	58,30	58,73	59,16	DPUTR
5	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	100	100	100	DPUTR
6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	85,00	86,00	87,00	DPUTR
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	Persen	40,94	55,56	73,10	DPUTR
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	DPUTR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	9,95	23,02	32,82	DPUTR
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,96	0,53	0,01	DPUTR
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	DPUTR
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	Satpol PP Damkar
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	Satpol PP Damkar
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	94	95	95	BPBD
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	94	95	95	BPBD
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	94	95	95	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	Satpol PP Damkar
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	< 12	< 12	< 12	Satpol PP Damkar
8	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Poin	0,55	0,56	0,57	BPBD
SOSIAL						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	Dinsos
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	Dinsos
TENAGA KERJA						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	Disnaker
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	Persen	28	28.5	29	Disnaker
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	27,5	30	32,5	Disnaker
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	90	90	90	Disnaker
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	50	60	80	Dalduk KB P2A

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Angka	0,034	0,0335	0,033	Dalduk KB P2A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	0,008	0,0075	0,007	Dalduk KB P2A
PANGAN						
1	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok Pemerintah	Persen	22	23	23	DKP3
PERTANAHAN						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	86,37	87,37	88,37	DPUTR
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0,04	0,05	0,06	DPUTR
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	86,37	87,37	88,37	DPUTR
LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota	Poin	59,80	59,90	60,00	DLH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	99,00	100	100	DLH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	0,04	0,05	0,06	DLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	100	100	Disdukcapil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	60	70	80	Disdukcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	Disdukcapil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	73,91	87	100	Disdukcapil
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,16	2,14	2,12	Dalduk KB P2A
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	67	67,5	68	Dalduk KB P2A
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	11,13	11,12	11,12	Dalduk KB P2A
PERHUBUNGAN						
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Angka	1	1	1	Dishub
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	Angka	0,36	0,35	0,34	Dishub
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	40	50	60	Diskominfo
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	40	45	50	Diskominfo
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Persen	65	65	70	Diskominfo
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	19,83	20,68	21,53	Diskumindag
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,47	0,63	0,78	Diskumindag
PENANAMAN MODAL						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	10	10	10	DPMPTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	25,47	26,69	27,99	Disporapar
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	22,63	22,64	22,68	Disporapar
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	18	25	50	Disporapar
STATISTIK						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	55	60	65	Diskominfo
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	55	60	65	Diskominfo
PERSANDIAN						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	20	25	25	Diskominfo
2	Persentase keterhubungan jaring komunikasi sandi	Persen	60	70	80	Diskominfo
KEBUDAYAAN						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Unit/ Persen	76	77	78	Disdikbud
PERPUSTAKAAN						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72	73	74	Dispusip
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	98	98,02	98,05	Dispusip
KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	64	64,50	64,80	Dispusip

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	67	67,50	68	Dispusip
KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota	Jumlah (ton)	25,87	26,08	26,29	DKP3
PARIWISATA						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	3.1	3.2	3.3	Disporapar
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	2	23.5	24	Disporapar
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen/ Hari	85	86	87	Disporapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	272	272.1	272.2	Disporapar
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	22.448 .213.6 89	22.448. 213.698	22.448 .213.6 98	Disporapar
PERTANIAN						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	19.316	19.464	19.512	DKP3
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	100	DKP3

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
PERDAGANGAN						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	80	80	80	DPMPTSP
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	55	65	75	DKP3
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persen	28,57	33,33	38,1	Diskumindag
PERINDUSTRIAN						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	3,55	4,05	4,55	Diskumindag
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	10	10	10	DPMPTSP
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	80	80	80	DPMPTSP
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	80	80	80	DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	1	1	1	Diskumindag
SEKRETARIAT DAERAH						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	Setda
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	3	2,5	2	Setda
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	63	64	65	Setda
4	Prosentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Persen	38	39	40	Setda
5	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	Setda
6	Indeks Pelayanan Publik	Persen	3,40	3,50	3,60	Setda
7	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan	Persen	100	100	100	Setda
SEKRETARIAT DEWAN						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
1	Persentase proper pemda yang ditetapkan dengan peraturan daerah	Persen	100	100	100	Setwan
PERENCANAAN						
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	Bappeda
2	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	Bappeda
3	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	Bappeda
KEUANGAN						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	BPKPD
2	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	29,54	30,27	31,02	BPKPD
3	Rasio PAD	Persen	2,82	2,96	3,11	BPKPD
4	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	87	88	89	BPKPD
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	4	5	6	BPKPD
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1,5	2	3	BPKPD
7	Manajemen aset	Persen	90	90	90	BPKPD
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	9	8	7	BPKPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	BPKPD
10	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	97,33	97,66	98	BPKPD
KEPEGAWAIAN						
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	78	79	80	BKPSDM
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	8,1	8,5	8,7	BKPSDM
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	38	38,5	39	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,9	8	8,5	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	Bappeda
PENGAWASAN (INSPEKTORAT)						
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	76	77	78	Inspektorat
2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	80	81	82	Inspektorat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	Inspektorat
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	Inspektorat
KEWILAYAHAN (KECAMATAN)						
1	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Cikole	Persen	100	100	100	Kecamatan Cikole
2	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Gunung Puyuh	Persen	100	100	100	Kecamatan Gunung Puyuh
3	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Citamiang	Persen	97	97.3	97.5	Kecamatan Citamiang
4	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Warudoyong	Persen	88,25	88,3	88,35	Kecamatan Warudoyong
5	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Baros	Persen	100	100	100	Kecamatan Baros
6	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Lembur Situ	Persen	100	100	100	Kecamatan Lembur Situ
7	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Cibeureum	Persen	80	80	80	Kecamatan Cibeureum
PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)						
1	Persentase konflik antar/inter umat beragama yang terselesaikan	Persen	100	100	100	Bakesbangpol

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dengan tema pembangunan **“Menguatkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan”**. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2025 disusun dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 yang dijabarkan melalui RKPD Tahun 2025 ini disusun dengan tetap memperhatikan point-point sebagai berikut:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah dengan 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority programs*) serta program prioritas dan unggulan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan dan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder baik dari pemerintah maupun diluar pemerintah.

Selanjutnya RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 ini akan dijadikan :

1. Dasar bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terutama bagi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

2. Merupakan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD Tahun 2025, yang nantinya akan dibahas bersama DPRD Kota Sukabumi.

Akhirnya semoga perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga seluruh pihak yang terkait dapat berkontribusi aktif dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang unggul.

Sukabumi, 5 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,



KUSMANA HARTADJI